



**NUSANTARA
PALESTINA CENTER**
Education And Social Working

PERJUANGAN BELUM SELESAI;

PALESTINA

dan Sejumlah Tantangan Sosial-Ekonomi

“Buku ini menambah khazanah literatur mengenai isu Palestina. Buku ini juga mengupas lebih dalam aspek-aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian dari masyarakat internasional dalam upaya penyelesaian isu Palestina, terutama permasalahan yang dihadapi Palestina di bidang ekonomi, sosial-budaya dan kemanusiaan.”

Dr. Teuku Faizasyah MIS

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI

Perjuangan Belum Selesai; Palestina dan Sejumlah Tantangan Sosial-Ekonomi

**Nusantara Palestina Center (NPC) & El-
Sharq Center for Dialogue and Civilization
(CDC) 2021**

Perjuangan Belum Selesai; Palestina dan Sejumlah Tantangan Sosial-Ekonomi, Seri Kertas Kebijakan Sosial-Ekonomi Palestina

Penanggung Jawab

Muhammad Anas, Lc, M.Si.

Penyusun

- *Agung Nurwijoyo, S.Sos., M.Sc.*
- *Muhammad Anas, Lc., M.Si,*
- *Septi Dwi Andini, S.Hum.*

Editor dan Penyelia Aksara

- *Libasut Taqwa, SHI., M.Si*
- *Agung Nurwijoyo, S.Sos., M.Sc.*

Desain dan Layout

- *Alfy Isya Muharam*

Halaman: 142 halaman

Buku ini merupakan edisi lengkap dari seri Kertas Kebijakan Sosial-Ekonomi Palestina yang disusun El-Sharq Center for Dialogue and Civilization. Sebagian besar hasil kajian dalam buku ini didasarkan pada serial diskusi dalam jaringan (daring) sosial-ekonomi Palestina yang diselenggarakan pada rentang waktu Agustus-Desember 2020 oleh El-Sharq Center for Dialogue and Civilization bekerjasama dengan Nusantara Palestina Center (NPC).

Diterbitkan 16 September 2021 oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bekerjasama dengan El-Sharq Center for Dialogue and Civilization (CDC).

Penerbit Pemancar Ilmu

Kab. Bogor, Jawa Barat

redaksi.pemancarilmu@gmail.com

+62 852 1652 4087

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR KEMENLU RI	viii
KATA PENGANTAR NPC	xi
KATA PENGANTAR CDC EL-SHARQ	xiii
TESTIMONI BUKU PERJUANGAN BELUM SELESAI; PALESTINA DAN SEJUMLAH TANTANGAN SOSIAL – EKONOMI	xvi
BAB I	
MENGUKUR KESEHATAN EKONOMI PALESTINA	
Pendahuluan	01
Kerangka Konsep	02
Pertumbuhan Ekonomi	02
Diplomasi Ekonomi	03
Variabel Ekonomi Palestina	04
Sumber Daya Manusia (SDM) Palestina	04
Perdagangan	06
Industri	06
Sektor Pertanian	07
Komparasi Ekonomi Palestina dengan Negara-Negara Tetangga di kawasan Timur Tengah	08
Ekspor Barang dan Jasa	09
Impor Barang dan Jasa	09
Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB / GDP)	10
Pengangguran	11
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	11
Industri	12

Potensi dan Hambatan Ekonomi Palestina	12
Potensi Ekonomi di Palestina	13
Hambatan ekonomi di Palestina	16
Peran Indonesia Membangun Ekonomi Palestina	21
Rekomendasi	24

BAB II

URGENSI BANTUAN INTERNASIONAL BAGI PALESTINA

Pendahuluan	25
Paradoks Bantuan Internasional	27
Peta Bantuan Internasional Di Palestina	28
Bantuan Negara dan Peran Aktor Non-Negara	28
Dampak bantuan internasional bagi Palestina	32
Sektor infrastruktur	32
Pendidikan dan Kesehatan	35
Pemberdayaan Ekonomi	37
Peran Indonesia dalam Bantuan Internasional terhadap Palestina	39
Ragam Skema Bantuan Indonesia	39
Sokongan Pemerintah, Parlemen dan Kelompok Sosial- Masyarakat	42
Rekomendasi	45

BAB III

KRISIS PANGAN, LISTRIK DAN AIR PALESTINA

Pendahuluan	46
Krisis Listrik	46
Akses Terhadap Air yang Layak	49

Ketersediaan Pangan	50
Dampak Okupasi Israel terhadap Krisis Air Palestina	51
Dampak Okupasi Israel terhadap Krisis Pangan Palestina	53
Dampak Okupasi Israel terhadap listrik Palestina	55
Bantuan Internasional dalam Krisis Pangan Palestina	55
Bantuan Internasional dalam Krisis Air Palestina	57
Bantuan Internasional dalam Krisis Listrik Palestina	58
Peran Indonesia dalam Krisis Air, Listrik dan Pangan Palestina	59
Nusantara Palestina Center (NPC)	61
Aksi Cepat Tanggap (ACT)	62
Tuntaskah Tugas Indonesia dalam Respon Krisis Air, Pangan dan Listrik Palestina?	63
Rekomendasi	65

BAB IV

PALESTINA DAN PERSOALAN PENGUNGSI

Pendahuluan	66
Kondisi Pengungsi Palestina di Berbagai Negara	68
Yordania	68
Libanon	69
Pengungsi di negara Timur Tengah dan Wilayah lainnya	70
Sejumlah Tantangan Pengungsi Palestina	71
Tantangan Politik	72
Buruknya Harapan di Sektor Pendidikan	75
Kompleksnya Kondisi Sosial Ekonomi	76
Pengungsi dan Hak untuk Kembali	78
Great Return March (Pawai Kepulangan Akbar)	78

Peran Indonesia dalam Masalah Pengungsi Palestina	81
Upaya Pemerintah	81
Peran Kelompok Sosial Masyarakat dan Filantropis	
Individual	84
Tantangan ke Depan	86
Rekomendasi	87

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK DASAR KELOMPOK RENTAN DI PALESTINA

Selayang Pandang Kelompok Rentan Palestina	88
Kondisi Anak-Anak di Palestina	89
Perempuan sebagai bagian Kelompok Rentan di Palestina	91
Buruknya Penanganan Kalangan Lanjut Usia	93
Tantangan Kelompok-Kelompok Rentan di Palestina	95
Perampasan Hak Asasi Anak	96
Dari Penangkapan Hingga Pembunuhan	97
Kekerasan terhadap Anak dari Lingkungan hingga Sekolah	99
Fenomena Putus Sekolah	100
Penderitaan Perempuan Palestina	101
Dampak Okupasi Israel terhadap Hak-Hak Wanita dan Anak	
Perempuan	103
Kelompok Disabilitas	105
Advokasi terhadap Hak-Hak Kelompok Rentan dari Dunia	
Internasional	106
Advokasi terhadap Hak Anak-Anak Palestina	106
Advokasi terhadap Hak Perempuan Palestina	109
Advokasi terhadap Hak Lansia Palestina	111

Peran Indonesia bagi Kelompok Rentan Palestina	112
Peran dan Kontribusi Pemerintah Indonesia	113
Peran dan Kontribusi Civil Society	115
DAFTAR PUSTAKA	119
PROFIL NUSANTARA PALESTINA CENTER (NPC)	139

SAMBUTAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Dr. Teuku Faizasyah MIS

*Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia*

Konflik Arab-Israel dan utamanya konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah menjadi tantangan tersendiri bagi perdamaian dan keamanan internasional untuk kurun waktu yang lama. Konflik yang dipicu oleh deklarasi pendirian negara Israel pada tahun 1948, kerap kali dikisahkan sebagai “penghulu dari semua konflik” (*mother of all conflicts*).

Sikap Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel atau isu Palestina dicirikan oleh dukungan konsisten terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Selain berlatarbelakang hubungan historis dan sosio-kultural yang erat, bahkan sejak era pra-kemerdekaan, dukungan Indonesia terhadap Palestina juga dilandasi amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga aktif berkontribusi pada upaya penyelesaian isu Palestina demi terciptanya satu tatanan dunia yang didasari kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bagi Indonesia, isu Palestina harus diselesaikan berdasarkan hukum dan parameter yang disepakati internasional, termasuk Solusi Dua Negara. Harapannya, Palestina dapat menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan hidup berdampingan secara damai dan bermartabat bersama bangsa-bangsa lainnya di dunia.

Konsistensi sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dapat dicermati dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu Palestina mendapat

penekanan tersendiri dalam politik dan kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk selama masa keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB 2019–2020. Secara politik, dalam pidato yang disampaikan secara virtual pada Sidang Majelis Umum PBB, 22 September 2020, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa “Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir pada Konferensi Asia-Afrika 1955 yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten mendukung Palestina untuk mendapatkan hak-haknya.”

Lebih dari sekedar dukungan politik, Presiden RI menggarisbawahi melalui pesan tertulis kepada PBB dalam rangka Peringatan Hari Internasional Solidaritas terhadap Rakyat Palestina, 29 November 2020, bahwa “dukungan Indonesia tidak berhenti di meja perundingan, tetapi juga dilanjutkan di sejumlah medan juang dalam berbagai bentuk, termasuk kerja sama bilateral dan teknis, dukungan peningkatan kapasitas, serta bantuan kemanusiaan, baik dari Pemerintah maupun rakyat Indonesia.”

Buku ini menambah khazanah literatur mengenai isu Palestina. Dengan tetap memberikan gambaran mengenai dimensi politik, buku ini juga mengupas lebih dalam aspek-aspek lain yang juga perlu mendapat perhatian dari masyarakat internasional dalam upaya penyelesaian isu Palestina, terutama permasalahan yang dihadapi Palestina di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan kemanusiaan. Berbagai permasalahan ini sebenarnya berakar pada satu masalah utama, yaitu kerugian dan penderitaan akibat pendudukan asing.

Sementara itu, beragam dimensi yang dikupas dalam buku ini juga mencerminkan betapa isu Palestina sangatlah kompleks, sehingga diperlukan solusi yang komprehensif dan kredibel. Suatu solusi berdasarkan hukum/parameter internasional yang memberi keadilan bagi bangsa Palestina untuk hadirnya sebuah perdamaian yang langgeng.

Uraian dalam buku ini disajikan dengan sistematika yang cukup unik melalui pendekatan yang komprehensif. Selain memaparkan fakta mengenai kebijakan serta peran yang diambil oleh para aktor lembaga/organisasi internasional serta aktor negara/pemerintah, buku ini juga menyajikan peran dan kontribusi yang signifikan dari aktor-aktor non-pemerintah dalam membantu penyelesaian isu Palestina. Narasi kualitatif juga banyak didukung dengan penyajian data kuantitatif dan statistik. Pada akhir uraian setiap bab, juga dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk memenuhi tujuan penulisannya sebagai semacam *policy paper*.

Kiranya tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa buku ini perlu dibaca oleh para pemerhati serta pemangku kepentingan/kebijakan mengenai isu Palestina. Selain dapat memperkaya pengetahuan, perspektif, dan pemahaman secara akademis mengenai isu Palestina, data-data yang disajikan dalam buku ini juga dapat menjadi pelengkap rujukan dan bahan pertimbangan.

Akhirnya, sebagaimana tertuang pada judul buku ini, “Perjuangan Belum Selesai”, penyelesaian isu Palestina masih akan menghadapi jalan yang panjang dan berliku. Karena itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, pada kesempatan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, 6 Januari 2021, menegaskan bahwa “dukungan Indonesia terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan.”

Selamat membaca, semoga mendapat lebih banyak pencerahan dari buku ini.

Jakarta, 12 September 2021

PENGANTAR NUSANTARA PALESTINA CENTER (NPC)

Ihsan Zainuddin, Lc. Dipl

Direktur Pelaksana Nusantara Palestina Center (NPC)

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Peperangan yang berlangsung sampai sekarang ini, telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina.

Sudah selayaknya sebagai Warga Negara Indonesia; usaha untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina merupakan nafas kehidupan bangsa ini. Nusantara Palestina Center (NPC) senantiasa hadir sebagai pionir advokat isu kemanusiaan Palestina sejak 2018 bahkan jauh sebelum itu, pendiri sekaligus pembina NPC; Bapak Abdillah Onim, SE.I atau yang akrab disapa Bang Onim sudah mewakafkan dirinya untuk kemanusiaan khususnya di Palestina.

Dalam keadaan yang setiap waktunya diancam ketidakpastian, masyarakat Palestina senantiasa bertahan dan memperjuangkan kedaulatannya. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa mendukung perjuangan yang mulia ini. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Palestina.

Buku “Perjuangan Belum Selesai; Palestina dan Sejumlah Tantangan Sosial-Ekonomi” ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait kondisi sosial ekonomi Palestina. Melalui buku ini, kita akan menemukan analisis dan penelitian yang akurat terhadap kondisi sosial ekonomi saudara-saudara kita di Gaza.

Disusun dengan bahasa yang mudah dipahami serta dilengkapi dengan penelitian yang akurat, tentunya buku ini akan memberikan sebuah petunjuk kepada kita semua supaya segala usaha yang kita lakukan untuk saudara kita di Palestina dapat tepat sasaran dan memberikan pemahaman yang tepat terhadap kondisi Palestina. Sehingga dukungan terhadap Palestina dapat benar-benar dimaknai secara mendalam.

Buku ini hadir di tengah kerasnya isu-isu dan gerakan yang berusaha melunturkan dukungan kita terhadap perjuangan panjang Bangsa Palestina. Oleh karena itu, NPC sebagai pionir advokat isu kemanusiaan Palestina berusaha menghadiahkan buku ini sebagai kado kemerdekaan Indonesia ke-76. Keikhlasan yang diberikan oleh Bangsa Palestina ketika negeri ini memperjuangkan kemerdekaannya mesti dibalas dengan hal yang serupa.

Kehadiran buku ini merupakan bentuk dukungan nyata bangsa Indonesia untuk Palestina. Terima kasih kepada CDC El-Sharq yang sudah melakukan riset yang penting dan luar biasa, tak lupa kepada Pemerintah RI yang berada di garis terdepan dalam mendukung kedaulatan Palestina serta kepada seluruh Masyarakat Indonesia yang senantiasa mendukung dan mendoakan kemerdekaan untuk Palestina.

Selamat membaca!

Jakarta, 12 September 2021

PENGANTAR CENTER FOR DIALOGUE & CIVILIZATION EL-SHARQ

Muhammad Anas, Lc., M.Si

Direktur CDC El-Sharq

Kota Jalur Gaza terbelah oleh bentangan tembok-tembok pembatas yang dibangun Israel. Jika Anda berdiri dan menghadap ke utara dan timur, di depan mata terhampar pemukiman-pemukiman Yahudi seperti Ghilat Gaza dan Sedirot yang populasinya menikmati layanan lengkap mulai dari fasilitas kesehatan, sambungan listrik, jaringan telepon, sistem pembuangan limbah, pelayanan kesehatan publik, termasuk jaringan jalan yang menghubungkan segenap penduduk dengan kota-kota Israel lainnya. Mereka bebas beraktivitas tanpa mencemaskan keselamatan jiwanya, tanpa rasa takut menghadapi seragam militer lengkap dengan senjatanya di pos-pos pemeriksaan. Anak-anak juga tanpa rasa khawatir pulang pergi bersekolah.

Sementara kehidupan warga Gaza Palestina yang berada di balik tembok di dinding- dinding pembatas Israel sangat jauh berbeda; fasilitas kesehatan yang buruk, listrik yang hanya menyala sekitar 3-4 jam per hari, konsumsi air di bawah standar WHO pun sudah tercemar. Belum lagi 80 persen warganya berada di bawah garis kemiskinan dan pengangguran. Dengan mobilitas warga dan barang dagangan yang dibatasi, anak-anak Gaza bahkan terancam ketika berangkat sekolah dan harus melewati pos-pos pemeriksaan yang dijaga ketat militer dan polisi berseragam lengkap.

Bagaimana wilayah-wilayah itu bisa begitu jauh berbeda? Palestina dan Israel, boleh dibilang dua negara satu atap, berpijak di atas satu tanah yang sama, hidup dengan iklim dan geografi yang sama,

namun jurang kesenjangan sosial ekonomi membelah keduanya. Seperti apa kondisi sosial ekonomi di Tepi Barat dan Gaza? Serta apa tawaran solusi yang bisa diberikan oleh para pemangku kebijakan baik pemerintah maupun aktor non pemerintah?

Buku “Perjuangan Belum Selesai; Palestina dan Sejumlah Tantangan Sosial- Ekonomi” ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait kondisi sosial ekonomi Palestina. Buku ini disusun dengan Bahasa yang mudah dinikmati berbagai kalangan tetapi khas dengan data akademik. Sebagian besar data yang dihasilkan buku ini berawal dari seri diskusi kajian kondisi sosial ekonomi Palestina dari Agustus hingga Desember 2020 yang diselenggarakan oleh El Sharq Center for Dialogue & Civilization (CDC EL SHARQ) bekerja sama dengan Nusantara Palestina Center (NPC) yang menghadirkan narasumber nasional dan internasional.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Pertama kepada Direktur Eksekutif NPC, Mas Ihsan Zainuddin, pelopor kolaborasi dunia kepalestinaan dengan knowledge based dan kajian, juga kepada teman-teman TIM NPC, Mba Hanifah, Mba Dewi dan lainnya yang sejak awal mendampingi TIM CDC ELSHARQ menyelenggarakan kajian via Zoom.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber seri Kajian Sosial Ekonomi Palestina, kepada Bapak Yon Machmudi, Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Mba Maria Rita, Eks Jurnalis Tempo, Dubes Palestina di Jakarta, H.E. Zuhair Al Shun, Dr. Bassem Naim, Mantan Menteri Kesehatan Palestina, Wafa Aludaini, Jurnalis Gaza Palestina, dan lainnya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman peneliti CDC EISHARQ, Mas Agung Wijoyo, Mas Libasut Taqwa, Mba Andini dan lainnya, yang menyatukan segenap potensi dan waktunya hingga buku ini bisa dinikmati publik dan para pegiat-pengamat Palestina.

Ini adalah salah satu kontribusi yang bisa kami berikan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina yang menjadi amanat konstitusi dan sejarah negara kita tercinta Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh *founding father* negara ini bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Hal senada diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, "Perjuangan Palestina selalu ada di jantung politik luar negeri Indonesia. Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ ada Palestina."

Selamat membaca!

TESTIMONI BUKU PERJUANGAN BELUM SELESAI; PALESTINA DAN SEJUMLAH TANTANGAN SOSIAL - EKONOMI

“Sebagai Pendiri dan Pembina NPC, saya terus mendorong agar NPC menjadi lembaga terdepan di dalam aksi-aksi sosial dan kemanusiaan di Palestina, karena itu spirit awal lahirnya NPC. Namun, lebih dari itu NPC harus bekerja lebih baik dan terarah, dan upaya menuju ke sana kita buktikan dengan karya seperti ini, Pesan mendalam dari buku ini adalah ajakan peduli sesama, merangkul, memotivasi, tidak pilih kasih dalam berbuat baik”

Abdillah Onim, SE.I (Pendiri dan Pembina Nusantara Palestina Center).

“Buku ini tampil di tengah kelangkaan referensi tentang Palestina di tanah air. Buku ini menyajikan pengalaman aktifis kemanusiaan Indonesia membantu rakyat dan pengungsi Palestina. Selain faktual, buku ini juga menjadi bukti bahwa perjuangan Palestina belum selesai. Karena itu, dukungan politik, ekonomi, kerja sama teknik dan bantuan kemanusiaan perlu terus dilanjutkan. Indonesia selalu bersama Palestina!”

Andy Rachmianto (Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, 2017-2020).

“Palestina adalah episentrum kawasan Timur Tengah. Dinamika di Palestina sangat mempengaruhi kondisi global secara umum. Kontribusi Indonesia bagi kemerdekaan Palestina sangatlah penting karena ini akan separuh lebih masalah dunia. Indonesia harus semakin memperkuat perannya demi mewujudkan *two states solution* dan perdamaian abadi bagi dunia.”

Yon Machmudi, Ph.D (Ketua Prodi Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia).

“Jika duo Al-Haramain (Mekkah & Madinah) adalah dua katup jantung ummat Islam global, maka kita dapat memersepsikan Palestina - negeri para Nabi - sebagai paru-parunya. Dalam sejarah panjang konflik tak berkesudahan dengan Zionis Israel, Palestina adalah tolok ukur bernafas leganya ummat Islam yang sejatinya satu ummah (ummatan wahidah) . Faktanya, selama lebih dari 70 tahun, bangsa Palestina masih berkubang tidak hanya dengan tragedi kemanusiaan akibat aneksasi wilayah penuh kezaliman Israel, tetapi juga terjerat dilema besar dalam operasi juga isolasi aktivitas sosial dan perekonomiannya.

Buku yang Anda pegang ini menyajikan data dan fakta mengenai beragam aspek problematika sosio-ekonomi yang dialami bangsa Palestina hingga saat ini - dari susahya akses terhadap kebutuhan elementer para warga, tingginya ketergantungan ekonomi kepada Israel, eksodus pengungsi dari Palestina, menyusutnya atensi dan frekuensi bantuan dunia internasional, isu pelanggaran HAM hingga penistaan terhadap masjid suci Al Aqsha. Harapan kami, nilai faktual dan informatif dalam kandungan buku ini mampu menjadi booster bagi kita bangsa Indonesia, ummat Islam terbesar di dunia, agar lebih memainkan peran strategisnya seraya terus turut bergerak berbuat dan berkontribusi bagi keberlangsungan kemanusiaan Palestina, sebagaimana telah didedikasikan dan dirintis dengan istiqomah oleh Nusantara Palestina Center (NPC) yang kita banggakan ini.”

Ahmad Arafat Aminullah (Ketua Umum Prima DMI).

BAB I

Mengukur Kesehatan Ekonomi Palestina

Pendahuluan

Dalam sebelas hari terakhir selama bulan Agustus 2020, Israel gencar melakukan serangan ke Gaza yang diklaim sebagai balasan atas serangan balon api yang dilepaskan dari lokasi para pejuang Palestina di Gaza, Palestina. Tak hanya itu, Israel juga melarang para nelayan di Gaza untuk menangkap ikan di lepas pantai Gaza. Israel juga menutup jalur penyeberangan barang Karam Abu Salem (*Kerem Shalom*)¹ untuk memotong pengiriman bahan bakar ke satu-satunya pembangkit listrik di wilayah Gaza.

Menurut perusahaan listrik di Gaza dengan kondisi ini, listrik di Gaza dalam sehari hanya menyala 3-4 jam yang diakibatkan kekurangan 75% pasokan listrik.² Sementara itu, Ketua Jaringan Neonatal Gaza (GNN) Nabil al-Baraoun, mengatakan, pemadaman listrik yang terjadi setiap hari itu dapat mengancam nyawa lebih dari 100 bayi baru lahir yang saat ini berada dalam inkubator perawatan intensif di rumah sakit Gaza.³ Pemadaman listrik ini juga sangat berdampak secara ekonomi Palestina di Gaza, menurut Kepala Asosiasi Pekerja Palestina di Gaza, Sami Al-Amshi, Selasa (18/08), krisis pembangkit listrik yang tidak beroperasi mengancam 90% pabrik sekitar 500 pabrik dan sekitar 50 ribu pekerja.⁴

Kondisi di atas merupakan gambaran sederhana dari sejarah panjang aneksasi dan agresi Israel terhadap Palestina yang menyisakan wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza yang memberikan pengaruh besar terhadap kondisi perekonomian penduduk Palestina. Oleh karena itu, Kertas Kebijakan ini hadir untuk berusaha melihat lebih dalam mengenai kesehatan

¹ Karam Abu Salem adalah salah satu penyeberangan masuk ke Gaza, penyeberangan ini khusus untuk memasukkan barang-barang perdagangan ke Gaza yang dikuasai oleh Israel dijaga ketat oleh Kementerian Pertahanan Israel. Titik penyeberangan lainnya adalah Eretz Crossing (Beit Hanun di utara) jalur penyeberangan ini khusus buat orang, penyeberangan lainnya adalah Rafah Crossing yang hanya dibuka 32 hari per tahun pada tahun 2015, 44 hari pada tahun 2016, dan 10 hari berturut-turut pada tahun 2017.

² aawsat.com, *Tawaqquf mahathah taulid al-kahruba al-wahid fi Gaza an al-amal*, shorturl.at/pIRU9, terakhir diakses, 21 Agustus 2020.

³ Msn.com, Sadis, Tank-Tank Israel Tembaki Gaza Tiap Malam Ratusan Bayi Terancam, <https://www.msn.com/id-id/berita/other/sadis-tank-tank-israel-tembaki-gaza-tiap-malam-ratusan-bayi-terancam/ar-BB18bJyJ?li=AAfukE3> terakhir diakses 21 Agustus 2020

⁴ Shehab News, 90% *min mashani gaza muhaddah bitawaqquf anil amal bisabab taqaqquf mahatha al-Kahruba*, shorturl.at/nyT17 terakhir diakses 21 Agustus 2020.

perekonomian Palestina berikut mengenai berbagai potensi dan tantangannya. Kertas kebijakan ini berusaha menjawab bagaimana perkembangan kesehatan perekonomian Palestina dewasa ini melalui pendekatan kualitatif disertai data yang bersumber dari pandangan para ahli dan pengolahan data sekunder yang berasal dari buku, artikel ilmiah dan laporan terkait. Kertas Kebijakan ini akan melihat beberapa aspek kunci terkait dengan variabel dasar ekonomi Palestina, perbandingan variabel ekonomi Palestina dengan negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah, potensi dan hambatan dalam perkembangan perekonomian Palestina, dan melihat peran Indonesia dalam membangun perekonomian Palestina serta rekomendasi bagi para pemangku kebijakan dan *stakeholders*.

Kerangka Konsep

Dalam penyusunan Kertas Kebijakan ini menggunakan dua kerangka konsep utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan diplomasi ekonomi. Kedua pandangan ini digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian Palestina baik dalam skala domestik maupun global.

Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan hakiki bagi terbentuknya suatu negara yang dicapai melalui suatu pembangunan yang berkesinambungan. Untuk melihat keberhasilan dari pembangunan yang dilakukan maka secara makro dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang tercermin melalui Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Todaro dan Smith menuliskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menandakan semakin baik kegiatan ekonomi.⁵

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, telah berkembang berbagai pandangan baik ekonomi klasik, neo-klasik dan sebagainya. Sebagai gambaran, ekonomi klasik-nya Adam Smith lebih melihat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan output total dan pertumbuhan pendudukan. Pertumbuhan output tersebut yang oleh teori pertumbuhan neo-klasik bersumber dari kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal dan penyempurnaan teknologi.⁶ Pandangan pertumbuhan ekonomi neo-klasik disempurnakan Mankiw, Romer dan Weil dengan penggunaan variabel akumulasi *human capital*.⁷

⁵ Todaro, Michael P dan Stephen C Smith, 2008, Pembangunan Ekonomi, ed.9, Jakarta: Erlangga

⁶ *Ibid.*

⁷ Mankiw, Gregory. 2006. Makroekonomi. Ed.6, Jakarta: Erlangga

Pertumbuhan ini yang didorong oleh produktivitas berbagai sektor dalam menggunakan faktor produksinya yang dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik.⁸ Disamping itu, kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) juga berikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti pandangan Solow. Hal ini disebabkan semakin banyaknya angkatan kerja yang bekerja maka kemampuan menghasilkan output semakin tinggi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan kata lain bahwa kenaikan jumlah angkatan kerja selaras dengan kenaikan laju pertumbuhan penduduk suatu negara.

Dalam melihat pertumbuhan ekonomi juga signifikan dalam melihat ekonomi yang berorientasi ekspor.⁹ Ekspor membuka akses pasar domestik dalam meningkatkan daya saing dalam pasar global. Dua jenis ekspor yang diperhatikan secara serius adalah barang manufaktur dan bahan baku. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan inflasi di suatu negara. Hal ini terkait dengan stabilitas nilai mata uang yang terlihat dari stabilitas tingkat harga.

Diplomasi Ekonomi

Selain pandangan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dalam Kertas Kebijakan ini juga memuat ragam pandangan terkait dengan diplomasi ekonomi. Pemahaman ini penting untuk memperkuat landasan akademik dalam melihat urgensi dilakukannya kerja sama dan usaha-usaha yang konstruktif dalam meningkatkan perekonomian Palestina.

Secara definisi, diplomasi ekonomi diartikan sebagai formulasi dan negosiasi kebijakan berkaitan dengan aktivitas produksi, pertukaran barang dan jasa serta tenaga kerja berikutan tentang investasi di negara lain.¹⁰ Dalam perkembangannya, diplomasi ekonomi sangat dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan pasar.¹¹

Dalam diplomasi ekonomi, Lee dan Hocking membuat empat kategorisasi diplomasi ekonomi yang meliputi: Pertama, diplomasi komersial yang tercermin dalam pemberian *commercial intelligence*, pemasaran

⁸ Sukirno, Sadono. 2008. Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁹ McCombie, J.S.L dan A.P Thilwall, 1994, Economic Groth and the Balance of Payment Constraint. New York: St Martins.

¹⁰ Rashid, H.U, 2005. Economic Diplomacy in South Asia. Address to the Indian Economy & Business Update

¹¹ Woolcock, S. 2007a. "Theoretical Analysis of Economic Diplomacy" dalam Bayne, N & Woolcock, S (eds). 2007. The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International Economic Relations. Ashgate Publishing Company

pariwisata, pembentukan hubungan dan mitra bisnis, dan pemberian bantuan usaha. Kedua, diplomasi perdagangan yang sifatnya *intergovernmental* dan diplomasi yang dilakukan juga melalui forum multilateral maupun regional. Ketiga, diplomasi keuangan dengan menciptakan stabilitas keuangan. Keempat, layanan konsuler dalam penerbitan visa karena peningkatan pergerakan manusia lintas-negara yang membawa konsekuensi ekonomi.¹²

Variabel Ekonomi Palestina

Adanya isolasi dan blokade, membuat Palestina memiliki ketergantungan terhadap Israel dalam memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini juga dimanfaatkan Israel dengan menjadikan Palestina sebagai pasar produk-produk Israel yang membanjiri pasar-pasar Palestina. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dalam mengenai variabel dasar ekonomi Palestina yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Palestina. Dalam hal ini penulis melihat empat variabel utama yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa berdasarkan berbagai pandangan ekonomi yang berkembang secara sederhana yaitu variabel sumber daya manusia (SDM), variabel sektor perdagangan, variabel Industri dan variabel pertanian.

Sumber Daya Manusia (SDM) Palestina

SDM Palestina dapat dicermati dengan melihat beberapa data mendasar yang membangun kualitas manusianya seperti jumlah penduduk usia muda, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakatnya serta tingkat kemiskinan masyarakat Palestina.

Secara demografi, Biro Pusat Statistik Palestina (PCBS / Palestinian Central Bureau of Statistics) menyebutkan jumlah penduduk Palestina di dunia pada akhir tahun 2019 mencapai sekitar 13,35 jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2018 dari 13,05 juta jiwa. Jumlah penduduk Palestina menurut tempat tinggalnya terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di dalam Palestina sebanyak 6.637 juta jiwa (49,7%). Mereka menempati wilayah Palestina sekarang (perbatasan 1967) dan wilayah yang diduduki Israel sejak 1948. Sedangkan penduduk Palestina diaspora jumlahnya mencapai 6.713 juta jiwa (50.3%) pada tahun 2019. Mereka tersebar di negara-negara Arab, khususnya di Yordania (mayoritas

¹² Donna Lee and Brian Hocking (2010) "Economic Diplomacy" in Robert A. Denemark (ed). *The International Studies Encyclopedia*, Vol. II pp 1216-1227 Wiley Blackwell

berkewarganegaraan Yordania) yang mencapai 4,29 juta jiwa dan di negara-negara Arab lainnya mencapai 1.696 juta jiwa.¹³

Sepertiga dari populasi penduduk Palestina adalah kelompok muda yang mencapai 38,3% dari total penduduk Palestina. Mayoritas mereka tinggal di Gaza (41,4%) dan Tepi Barat (36,3%). Sebaliknya populasi penduduk berumur lebih dari 65 tahun hanya 3,3% dari total penduduk Palestina.¹⁴ Artinya, penduduk Palestina mayoritas berada pada usia produktif. Namun, kondisi ini berkelindan dengan permasalahan pengangguran yang cukup tinggi di Palestina.

Pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Palestina semakin meningkat, khususnya di kalangan pemuda. Menurut PCBS pada Maret 2020, Covid-19 berdampak pada seluruh lapisan masyarakat Palestina khususnya kelompok pemuda. Tingkat pengangguran pemuda Palestina meningkat 38% pada tahun 2019. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Gaza (63%) sedangkan di Tepi Barat mencapai 23%. Pengangguran tertinggi adalah pemuda lulusan pendidikan tingkat menengah (18-29 tahun) yang mencapai 52% selama tahun 2019.¹⁵ Tingkat pengangguran ini juga disebabkan Palestina hanya mampu menyerap 8 ribu angkatan kerja pertahun, dan selebihnya bekerja di Israel sebanyak 133 ribu angkatan kerja. Data 2019 juga menyebutkan angkatan kerja baru pertahun sekitar 40 ribu angkatan kerja.¹⁶

Sementara itu, tingkat kemiskinan Palestina berdasarkan data PCBS mencatat sepertiga penduduk Palestina berada dalam garis kemiskinan (29%) sesuai dengan statistik 2017, sementara tingkat kemiskinan tertinggi berada di Gaza yang mencapai 53,3% dan jauh empat kali lipat melampaui tingkat kemiskinan di Tepi Barat yang berada di kisaran 13,9%. PCBS juga mencatat Indeks Kemiskinan Tinggi berada di Gaza dimana sepertiga penduduknya 33,7% menghadapi kemiskinan tinggi dibanding dengan penduduk Tepi Barat yang mencapai 5,8%. Ini berarti bahwa keluarga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik makanan, pakaian dan tempat tinggal, juga menunjukkan tingkat kemiskinan keluarga jauh lebih besar di Gaza dibanding dengan Tepi Barat.¹⁷

¹³ Markaz Al-Zaitunyah li Ad-Dirasat wa al-Istisyyarat, Beirut, *Al-Taqrir al-Istratiji al-Filistini 2018-2019* pdf.

¹⁴ Ibid, hal. 75.

¹⁵ *Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), demonstrating the situation of youth in the Palestinian society*, 12 Agustus 2020, <http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3787> terakhir diakses 23 Agustus 2020.

¹⁶ Markaz Al-Zaitunyah li Ad-Dirasat wa al-Istisyyarat, Beirut, *Al-Taqrir al-Istratiji al-Filistini 2018-2019*, hal. 109

¹⁷ *Al-Jihaz al-Markazi li Al-Ihsha' al-Filastin* (PCBS), *al-Faqr Mutaaddid al-Ab'ad fi Falastine*, 2017, Juni 2020, hal. 13.

Perdagangan

Walaupun krisis ekonomi dan politik dihadapi Palestina pada tahun 2019 tetapi tingkat pertumbuhan PDB Palestina tetap stabil yang mencapai 0,9% dibanding dengan 1,2% pada tahun sebelumnya. Hal ini karena kontribusi Tepi Barat mengalami pertumbuhan dengan menyumbang 1% selama tahun 2019 dan PDB Gaza yang stabil di tahun yang sama.¹⁸ Tingkat konsumsi merupakan komponen terbesar dalam PDB ekonomi Palestina, yang menyumbang 109,4% dari nilai PDB Palestina. Hal tersebut nilainya tercatat mengalami peningkatan 2,1% pada tahun 2019 yang mencapai USD 17.250,7 juta, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar dari nilai total pengeluaran konsumsi sebesar 79% yang menyebabkan nilai pengeluaran konsumsi naik pada tahun 2019.¹⁹

Sektor layanan dan jasa menjadi menyumbang pertama ekonomi Palestina dari segi nilai tambah, dimana ekonomi Palestina disebut sebagai ekonomi jasa, aktifitas sektor ini mengalami peningkatan 2,7% selama tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,6%, sektor layanan ini juga mengalami kenaikan di Gaza sebesar 2,9%. Sektor ini mampu menyumbang 33,5% pada PDB Palestina.²⁰

Nilai impor Palestina tahun 2018 mencapai USD 6.539,6 atau meningkat 11,7% dibanding impor 2017. Nilai ekspor Palestina juga meningkat 8,5% tahun 2018 mencapai USD 1.155,6 dibanding ekspor 2017. Dengan nilai ini, Palestina mengalami defisit neraca perdagangan tahun 2018 mencapai USD 5.384 atau meningkat 12,4% dibanding tahun 2017. Volume pertukaran perdagangan pada tahun 2018 mencapai USD 7.695,2 atau meningkat 11,2% dibanding volume perdagangan 2017.²¹

Industri

Laporan PCBS 2018 menyebutkan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri mencapai 3.742 perusahaan industri, 80% di Tepi Barat dan 20% di Gaza. Sebesar 94% dari sektor ini didominasi oleh industri manufaktur. Dalam industri manufaktur ini, industri produk mineral non-logam berada pada urutan pertama sebesar 26,8% sementara perusahaan industri produk makanan sebesar 19,6%, perusahaan industri furnitur sebesar 13,3%,

¹⁸ *Al-Jihaz al-Markazi li Al-Ihsha' al-Filastin* (PCBS), *Ada' al-Iqtishad al-Filastini 2019*, Mei 2020

¹⁹ *Ibid*, hal. 19.

²⁰ *Ibid*, hal. 19.

²¹ PCBS, *Ihsha'at al-Tijarah al-Kharijiah al-Marshudah al-Sila' al-Khadamat 2018*, Oktober 2019, hal. 21.

disusul perusahaan industri pakaian sebesar 10,3%, sementara perusahaan industri produk logam terbentuk sebesar 8,35, selebihnya perusahaan industri lainnya sebesar 21,8%.²² Jumlah pekerja pada sektor industri ini mencapai 57.776 pekerja, dengan distribusi pekerja di Tepi Barat sebesar 80,8% dan pekerja di Gaza sebesar 19,2%.²³

Aktifitas industri ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 1,8% dan membaik secara terbatas tahun 2019 sekitar 0,2%. Pada sector ini, ekspor produk *building stone* adalah ekspor sebesar 13% dari total ekspor Palestina tahun 2018.²⁴

Sektor Pertanian



Area A, B dan C Berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1995
(Sumber: <https://www.welcometopalestine.com/article/areas-a-b-c-explained-west-bank-israel-gaza->

Berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1995, wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dipecah menjadi tiga area, yakni Area A, B, dan C (lihat gambar). Area A adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Palestina. Kemudian Area B merupakan wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina, namun sektor keamanannya dikontrol Israel. Sedangkan Area C adalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai Israel.²⁵

Dimana wilayah C ini adalah sebagian besar adalah lahan pertanian seperti Beit Lahem, Ariha, dan Yerusalem berada di wilayah C yang dikuasai Israel.²⁶ Di samping itu, lahan-lahan pertanian Palestina juga terus berkurang dari tahun ke tahun. Penyusutan besar lahan pertanian Palestina mulai dari 240.000 hektar pada tahun 1980 menjadi 183.000 hektar pada tahun 1996 dan menjadi 103.000 hektar pada tahun 2010.²⁷

Pertanian Palestina mengalami volatilitas tinggi, pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 1% dengan PDB Pertanian sebanyak USD

²² *Al-Jihaz al-Markazi li Al-Ihsha' al-Filastin (PCBS), al-Mash al-Shinai 2019*, hal. 17.

²³ *Ibid*, hal. 18.

²⁴ *Markaz al-Zaituniyah, Al-Taqrir al-Istratiji al-Falastini 2018 - 2019*, hal.111.

²⁵ *Republika, Indonesia: Palestina Harus Selesai dengan Solusi Dua Negara*, 30 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q4vof5366/indonesia-palestina-harus-selesai-dengan-solusi-dua-negara> diakses 25 Agustus 2020.

²⁶ UNCTAD, *Qitha' al-Ziraah al-Falastiniyah al-Muhashir*, 2015, hal. 7.

²⁷ *Ibid*, hal. 8.

1.080,2 tahun 2019 menurun dibanding tahun 2018 sebanyak USD 1.091,1 USD (tumbuh 1.6%).²⁸ Walaupun memiliki iklim dan tanah yang sama, sektor pertanian Palestina tertinggal jauh dengan pertanian Israel dan negara-negara tetangga di kawasan, hal menurut laporan laporan UNCTAD (2015) disebabkan oleh pengaruh pendudukan dan pembatasan yang dilakukan oleh Israel.²⁹

Palestina menurut Pakar Timur Tengah, Yon Machmudi menghadapi hambatan struktural-politik sebagai bangsa yang masih berada dalam pendudukan, hal ini membuat Palestina tidak memiliki system ekonomi mandiri, yang memungkinkan orang-orang Palestina memiliki kebebasan penuh untuk mengatur, mengolah sumber daya yang ada.

Komparasi Ekonomi Palestina dengan Negara-Negara Tetangga di kawasan Timur Tengah

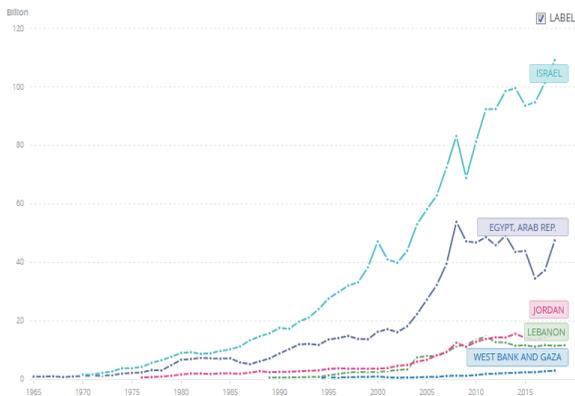
Setelah melihat variabel dasar dalam ekonomi Palestina, penting untuk melihat juga bagaimana perbandingan antara beberapa variabel dalam ekonomi Palestina dengan kawasan khususnya adalah negara-negara yang berbatasan dengan Palestina baik Tepi Barat maupun Gaza.³⁰ Beberapa variabel utama yang dijadikan komparasi meliputi (1) Ekspor barang dan jasa, (2) Impor barang dan jasa, (3) Tingkat Pendapatan Nasional Bruto (PNB), (4) Tingkat pengangguran, Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dan (5) Pertumbuhan industri.

²⁸ Ibid, hal. 113.

²⁹ UNCTAD, *Qitha' al-Ziraah al-Falastiniyah al-Muhashir*, 2015, hal.

³⁰ Dalam Kertas Kebijakan ini, komparasi ekonomi Palestina dilakukan terhadap negara-negara tetangga Palestina meliputi Israel, Mesir, Yordania, dan Libanon. Kemiripan wilayah dan tantangan geografis menjadi justifikasi utama komparasi dilakukan terhadap negara yang berbatasan darat langsung dengan Palestina baik wilayah Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Selanjutnya, Suriah yang juga berbatasan darat dengan Palestina tidak masuk dalam komparasi ekonomi karena ketersediaan data perekonomian Suriah hanya ada hingga tahun 2007 dalam lansiran Bank Dunia.

Ekspor Barang dan Jasa



Jumlah Ekspor Barang dan Jasa Palestina dan Negara-Negara Tetangga (dalam USD).

Sumber data: Bank Dunia

(<https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?en d=2019&locations=PS-LB-EG-JO-IL&start=1965&view=chart>)

berturut di tahun 2018, dalam prosentase jumlah ekspor Palestina dibandingkan dengan Mesir, Yordania dan Libanon adalah 6,12%, 19,29%, dan 25,49%.

Dari data tersebut menunjukkan secara agregat pertumbuhan ekspor baik barang maupun jasa Palestina berada di angka 8% dalam satu dekade terakhir. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 dimana Palestina mencatat pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencapai 24,01%. Namun, setelah 2011 tercatat fluktuatif. Khusus di tahun 2018, pertumbuhan ekspor Palestina mencapai 7,26%.

Impor Barang dan Jasa

Seperti halnya data jumlah ekspor Palestina dengan negara-negara tetangga, jumlah impor barang dan jasa Palestina dibandingkan dengan Israel, Mesir, Libanon dan Yordania tetap posisinya paling rendah. Pada tahun 2018, dengan jumlah impor USD 8,731 trilyun Palestina masih jauh di bawah Israel yang sejumlah USD 107,539 trilyun. Jumlah tersebut sepadan dengan 8,11% dari jumlah impor barang dan jasa Israel di tahun 2018. Jumlah Impor Palestina dibandingkan dengan Mesir, Libanon dan Yordania di tahun 2018 adalah berturut sebesar 11,85%, 33,49%, dan 37,89% dari jumlah impor masing-masing negara.

Terlihat bahwa jumlah perdagangan khususnya ekspor barang dan jasa Palestina dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang meliputi Israel, Mesir, Yordania dan Libanon menempati posisi terendah.³¹

Di tahun 2018, jumlah ekspor Palestina sebesar USD 2,904 trilyun. Jumlah tersebut hanya 2,66% dari jumlah ekspor Israel di tahun yang sama yang mencapai USD 109,124 trilyun. Secara

³¹ Palestina dalam data yang dikeluarkan Bank Dunia menggunakan nama Tepi Barat dan Gaza (West Bank and Gaza) alih-alih Palestina.

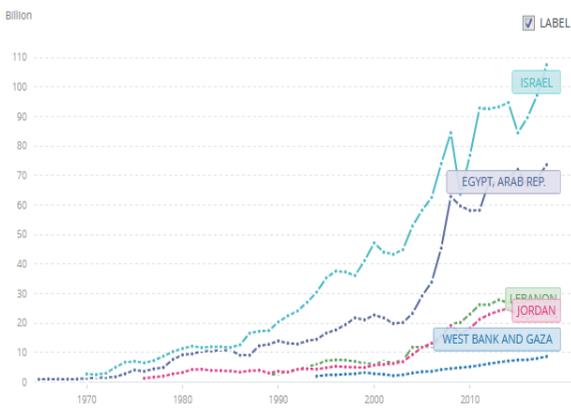
Mengukur Kesehatan Ekonomi Palestina



Jumlah Impor Barang dan Jasa Palestina dan Negara-Negara Tetangga (dalam USD). (Sumber data: Bank Dunia, <https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD?locations=PS-LB-EG-JO-IL>)

Tercatat di tahun 2018, pertumbuhan impor barang dan jasa mencapai 7,6%. Berdasarkan olahan data peneliti dari data Bank Dunia menunjukkan bahwa rerata dalam 1 dekade terakhir pertumbuhan impor barang dan jasa Palestina mencapai 6,09%. Seperti halnya dalam ekspor, dalam pertumbuhan impor tertinggi Palestina tercatat di tahun 2012 yakni mencapai 9,15%.

Tingkat Produk Domestik Bruto (PDB / GDP)



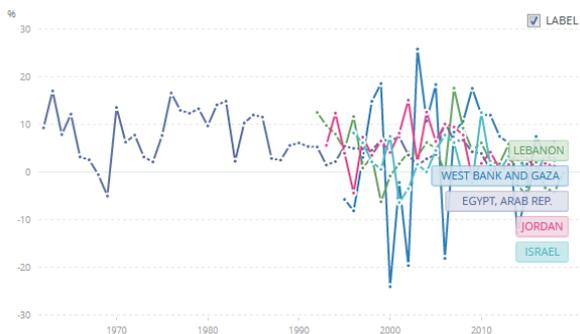
Besar PDB (dalam USD) Palestina dan Negara-Negara Tetangganya. Sumber Data: Bank Dunia, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PS-LB-EG-JO-IL>

PDB Palestina dibandingkan dengan negara-negara tetangganya khususnya Israel, Mesir, Libanon dan Yordania masih menempatkan Palestina dalam posisi terendah. Pada tahun 2018, PDB Palestina (USD 14,616) hanya 3.94% dari PDB Israel (USD 370,588). Besar PDB Palestina dibandingkan dengan Mesir, Libanon dan Yordania, berturut sebesar 5,82%, 26,59%, dan 34,6%

dari PDB Palestina 2018.

Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan PDB Palestina sifatnya fluktuatif dengan rerata pertumbuhan mencapai 7,36% setiap tahunnya. Pertumbuhan PDB tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 18,45% atau USD 8.913. Sedangkan di tahun 2015 PNB Palestina mengalami pertumbuhan negatif sebesar -0.33 atau USD 12,673.

Pengangguran

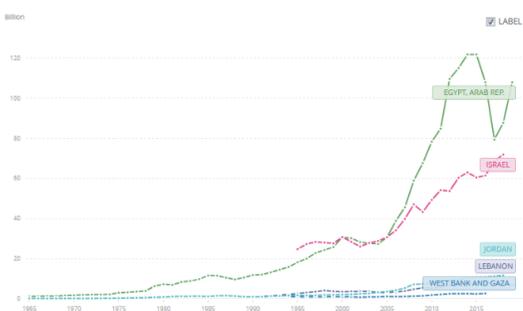


Tingkat Pengangguran di Palestina dan Negara-Negara Tetangga. (Sumber Data: Bank Dunia, <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=PS-LB-EG-JO-IL>)

tinggi yang mencapai 26,256% (2018). Kondisi ini bertolak belakang dengan Israel yang justru memiliki tingkat pengangguran terkecil yakni 3,99% (2018).

Sejak tahun 2000, Palestina mencapai tingkat pengangguran tertinggi di tahun 2002 (27,46%). Tingkat pengangguran Palestina setelahnya bersifat fluktuatif. Meskipun pada tahun 2018 mencapai 26,256% tetapi berhasil mencapai penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 25,35%.

Pertanian, Perkebunan dan Perikanan



Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Palestina dan Negara-Negara Tetangga (% pertumbuhan). (Sumber data: <https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG?locations=PS-EG-LB-IL-JO>)

sektor ini di Palestina berada di atas Yordania, Mesir, Israel dan Libanon.

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Palestina merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Timur Tengah. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan darat langsung dengan Palestina yaitu Yordania, Mesir, Libanon dan Israel terlihat Palestina menempati posisi pertama yang memiliki tingkat pengangguran

Bagan di samping menunjukkan bahwa sektor pertanian, perkebunan dan perikanan mengalami fluktuasi yang sangat tajam baik Palestina sendiri maupun negara-negara tetangganya.

Di tahun 2018, sektor ini mengalami pertumbuhan di Palestina sebesar 7,23%. Sebelumnya pada 2017, pertumbuhannya mengalami -5%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara, pertumbuhan

Industri



Pertumbuhan Industri di Palestina dan Negara-Negara Tetangga (dalam %) Sumber Data: Bank Dunia, <https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.KD.ZG?locations=PS-LB-EG-JO-IL>

Pertumbuhan sektor Industri Palestina masih berada di bawah Israel dan Mesir. Di tahun 2016, sektor industri Palestina berjumlah USD 2,6 Milyar. Pertumbuhan sektor industri ini masih berada di bawah Libanon (USD 8,18 Milyar), Yordania (USD 10,8 Milyar), Israel (USD 61,4 Milyar) dan Mesir (USD 108,05 Milyar)

Dari Kelima instrumen yang menunjukkan komparasi antara ekonomi Palestina dengan negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah yaitu Mesir, Israel, Yordania dan Libanon menunjukkan bahwa secara umum, perkembangan ekonomi Palestina masih berada di bawah negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah. Secara khusus dengan Israel, Palestina memiliki gap ekonomi yang sangat tinggi dalam berbagai variabel yang dilihat. Selain itu, rendahnya perekonomian Palestina dibandingkan dengan negara-negara tetangga memberikan pengaruh dalam persepsi masyarakat internasional terhadap Palestina. Dan, kondisi perekonomian Palestina menghadapi berbagai hambatan baik dalam level domestik dan kawasan (dijelaskan dalam bagian berikutnya).

Potensi dan Hambatan Ekonomi Palestina

Dalam perkembangannya, muncul berbagai potensi dan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Palestina. Ragam potensi dan hambatan tersebut sebagian tidak dapat dipisahkan dari pemetaan komoditas atau variabel ekonomi Palestina itu sendiri. Namun, faktor ekonomi tidak menjadi faktor tunggal yang menentukan potensi dan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi Palestina. Ada ragam faktor non-ekonomi yang juga memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisisnya, berikut beberapa potensi dan hambatan ekonomi yang dihadapi oleh Palestina.

Potensi Ekonomi di Palestina

1. Sektor Pertanian sebagai Penghasil Devisa Utama Palestina

Dalam perekonomian Palestina, pertanian merupakan sektor dominan dan sumber devisa utama yang memasok kebutuhan dasar mayoritas penduduk lokal.³² Hasil pertanian Palestina tersebut telah mampu menembus pasar Eropa, bahkan dunia termasuk Indonesia.

Salah satu sektor utama produksi pertanian Palestina adalah budidaya pohon buah-buahan. Setidaknya sebesar 97,3% pohon buah-buahan dibudidayakan di bawah sistem tadah hujan dan 2,7% sisanya dengan sistem pengairan. (*Agricultural Department of the West Bank, 1993-1994*).

	Produksi (ton)	Produktivitas (kg)
1993 - 1996	77.328	95
1997 – 2000	82.110	90
2001 – 2004	113.943	123
2005 - 2008	89.949	96
2010 - 2011	75.130	152

Produksi dan Produktivitas Zaitun Palestina, 1993-2011

(Sumber: Laporan UNCTAD, *The Besieged Palestinian Agricultural Sector*, 2015)

Komoditas unggulan lain Palestina adalah minyak zaitun. Minyak zaitun yang berasal dari pohon zaitun merupakan tanaman terkenal di seluruh Palestina.³³ Produksi minyak zaitun menyumbang 57% dari lahan pertanian di wilayah Palestina dengan 7,8 juta pohon zaitun pada tahun 2011. Dalam tabel 1 tergambar adanya peningkatan dalam produksi zaitun di Palestina. Pada tahun 2014 diperkirakan 108.000 ton produksi buah zaitun menghasilkan 24.700 ton minyak zaitun. Komoditas ini berkontribusi memberikan nilai tambah sebesar USD 10,9 juta. Sekitar 100.000 keluarga bergantung pada buah zaitun sebagai pendapatan utama mereka.³⁴

Ciri khas minyak zaitun dari Palestina disamping warna dan rasanya yang khas, kualitasnya dipengaruhi oleh jenis pohon, wilayah, iklim, metode

³² Understanding Agriculture in Palestine and How Aid Can Help. <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/understanding-agriculture-palestine-and-how-aid-can-help>. Data diakses pada 1 Agustus 2020

³³ Impacts of Water and Export Market Restrictions on Palestinian Agriculture. <https://socialsciences.mcmaster.ca/kubursi/ebooks/water.htm>

³⁴ The Besieged Palestinian Agricultural Sector. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2015d1_en.pdf

perawatan, metode penanganan, dan tingkat kematangan buah zaitun yang dipanen. Sebagian besar buah zaitun Palestina berasal dari pohon asli Palestina, baladi atau nabali serta souri dan mallisi. Ketiga jenis ini menghasilkan minyak zaitun kualitas tertinggi di dunia.³⁵

Selain zaitun, buah anggur adalah tanaman buah utama kedua di Tepi Barat dengan total luas 22.000 hektar dan produksi tahunan 27.000 ton. Sekitar 68% dari total area perkebunan anggur berlokasi di distrik Hebron. Keuntungan anggur mencapai USD 35 juta per tahun yang menjadikan sumber pendapatan strategis untuk wilayah Hebron. Sebanyak 7.500 keluarga hidup dari pertanian anggur.³⁶ Terdapat juga komoditas almond sebagai komoditas unggulan di Palestina. Komoditas ini menempati area terbesar ketiga di antara pohon buah-buahan yang dibudidayakan.³⁷

Selanjutnya, komoditas kurma sebagai salah satu tanaman buah terpenting di Palestina. Di wilayah Gaza, total terdapat 250.000 pohon kurma. Sebagian besar pohon kurma dibudidayakan di wilayah Gaza Tengah, khususnya di wilayah Deir Balah. Rata-rata produksi pada tahun 2017 adalah 12.000-15.000 ton per tahun. Komoditas kurma unggulan Palestina khususnya di wilayah Gaza adalah kurma basah (al-ruthab atau al balah). Sebagian besar pohon kurma Palestina tumbuh di bibir pantai yang memiliki tingkat kelembapan tinggi sehingga kurma kering tidak dihasilkan di Palestina.³⁸

Komoditas lain yang memiliki potensi dari Palestina adalah stroberi. Di wilayah Gaza bagian utara, sekitar 170 hektar lahan pertanian dimanfaatkan untuk menanam stroberi. Akhir tahun 2019, Gaza mampu mengekspor 3 ton stroberi ke negara-negara Teluk (UEA, Kuwait dan Bahrain) melalui pintu perbatasan Karam Abu Salem.³⁹

2. Palestina mulai memberikan perhatian khusus kepada Diplomasi Ekonomi

Kehadiran delegasi Palestina ke Indonesia yang mayoritas berisi pengusaha di tahun 2013 atas kemauan sendiri menjadi gambaran adanya

³⁵ About Olives and Olive Oil in Palestine. <https://zatoun.com/more-about-olives-and-olive-oil-in-palestine/>

³⁶ Hebron Grape Profits Reach \$35 Million per Year. <https://www.palestineconomy.ps/en/Article/149/Hebron-Grape-Profits-Reach-35-Million-per-Year>. diakses pada 24 Agustus 2020

³⁷ Impacts of Water and Export Market Restrictions on Palestinian Agriculture. <https://socialsciences.mcmaster.ca/kubursi/ebooks/water.htm>

³⁸ The Current Status of the Date Palm Sector in the Gaza Strip, Palestine. <https://www.grin.com/document/358860>

³⁹ Gaza ekspor tiga ton strawberry ke negara teluk. <https://suarapalestina.com/post/9294/gaza-ekspor-tiga-ton-strawberry-ke-negara-teluk>. 05 Dec 2019. diakses pada 1 Agustus 2020

perhatian Palestina terhadap diplomasi ekonomi. Tujuan kunjungan tersebut adalah usaha untuk mencari pasar bagi produk-produk Palestina ke Indonesia.⁴⁰ Setidaknya dalam kunjungan tersebut, Palestina telah membawa daftar 61 komoditas unggulan dengan preferensi pemberian tarif bea masuk 0%. Pada 2019, 2 dari 61 komoditas tersebut yaitu kurma dan zaitun diberikan tarif 0% untuk masuk ke Indonesia.⁴¹

3. Potensi Pengembangan Kerja Sama Sektor UKM

Pemberdayaan kerja sama dalam sektor UKM menjadi potensi yang dapat dikembangkan Palestina. Sektor UKM ini salah satu sektor yang berkembang di Palestina yang dikembangkan oleh para pengusaha kecil.⁴²

Potensi yang dimiliki Palestina tersebut setidaknya tercermin dalam inisiatif Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hasyimiyah merangkap Negara Palestina menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan sektor kewirausahaan usaha kecil dan menengah (UKM) bagi warga Yordanian dan Palestina.⁴³ Selanjutnya pada Juni 2020, Yayasan Jaminan Kredit Eropa-Palestina (EPCGF) meningkatkan pemberian akses terhadap pembiayaan usaha bagi UKM. Bank-bank mitra EPCGF memberikan tawaran pinjaman senilai 65 juta shekel atau USD 18,7 juta melalui program-program baru untuk membantu pemulihan perusahaan-perusahaan yang terdampak Covid-19.⁴⁴

4. Pengembangan Sektor Jasa

Sektor layanan dan jasa menjadi menyumbang pertama ekonomi Palestina dari segi nilai tambah, dimana ekonomi Palestina disebut sebagai ekonomi jasa, aktifitas sektor ini mengalami peningkatan 2,7% selama tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,6%, sektor layanan ini juga mengalami kenaikan di Gaza sebesar 2,9%. Sektor ini mampu menyumbang 33,5% pada PDB Palestina.⁴⁵

⁴⁰ Maria Rita, *Jurnal Tempo* dalam Webinar xx

⁴¹ Dua Produk dari Palestina Ini Bebas Bea Masuk ke Indonesia. <https://bisnis.tempo.co/read/1152968/dua-produk-dari-palestina-ini-bebas-bea-masuk-ke-indonesia>. December 6, 2018 diakses pada 1 Agustus 2020

⁴² Maria Rita, *Jurnal Tempo* dalam Webinar Mengukur Kesehatan Ekonomi Palestina pada 15 Agustus 2020

⁴³ Melalui Program UKM, Indonesia Tegaskan Komitmen ke Palestina. <https://fakta.news/internasional/melalui-program-ukm-indonesia-tegaskan-komitmen-ke-palestina> diakses pada 25 Agustus 2020

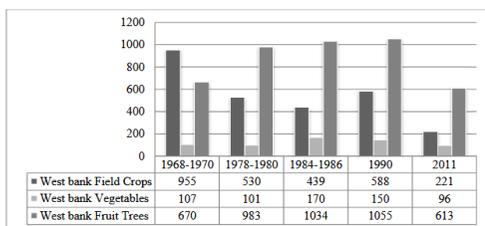
⁴⁴ Uni Eropa Sokong Pendanaan UKM Palestina Terdampak Covid-19. <https://republika.co.id/berita/qbdk09459/uni-1.eropa-sokong-pendanaan-ukm-palestina-terdampak-covid19> diakses pada 25 Agustus 2020

⁴⁵ *Ibid*, hal. 19.

Hambatan ekonomi di Palestina

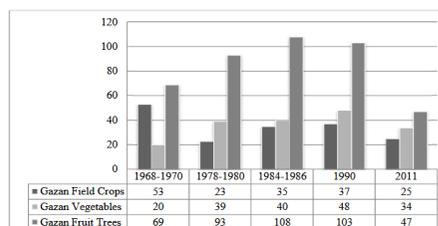
1. Aneksasi, Penyitaan Lahan dan Perluasan Pemukiman Israel

Aneksasi, penyitaan lahan serta perluasan pemukiman ilegal menjadi faktor utama hambatan ekonomi Palestina di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Penghancuran pohon zaitun di Palestina dengan cara ditebang atau dibakar telah menjadi bagian konflik antara Israel-Palestina. Sejak 2001 militer dan pemukim Israel telah menghancurkan lebih dari 548.000 pohon zaitun dan menyita ratusan hektar lahan pertanian Palestina.⁴⁶



Wilayah Pertanian di Tepi Barat (riibuan dunums)

(Sumber: Laporan UNCTAD, *The Besieged Palestinian Agricultural Sector*, 2015)



Wilayah Pertanian di Gaza (riibuan dunums)

(Sumber: Laporan UNCTAD, *The Besieged Palestinian Agricultural Sector*, 2015)

Dari kedua bagan di atas, berdasarkan data UNCTAD menunjukkan dampak dari adanya aneksasi, penyitaan lahan dan perluasan pemukiman Israel memberikan dampak signifikan terhadap luas wilayah Palestina dan khususnya terhadap wilayah pertanian Palestina. Dalam kedua bagan (Bagan 7 dan 8) terlihat adanya degradasi lahan pertanian dan perkebunan Palestina yang terjadi baik di wilayah Tepi Barat maupun Gaza.

2. Blokade Gaza dan Keterbatasan Akses di Tepi Barat

Di Gaza, blokade Israel melalui darat, laut, dan udara menjadi hambatan utama bagi petani. Blokade yang terjadi di Gaza baik darat, laut dan udara memberikan dampak yang besar bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi Palestina. Hal ini juga terjadi terhadap wilayah Tepi Barat. Perbatasan laut yang ada di wilayah Gaza diberikan jarak yang terbatas oleh Israel. Selain itu, Palestina tidak memiliki satu pun bandara.

⁴⁶ Palestinian Olive trees are being destroyed –.

<https://www.danchurchaid.org/articles/palestinian-olive-trees-are-being-destroyed-danchurchaid-is-planting-new-ones>

Bandara Internasional Yasser Arafat kondisinya kini sudah tidak bisa difungsikan akibat serangan yang dilakukan Israel lebih 20 tahun lalu.

Petani di wilayah Gaza sering kesulitan memasarkan, baik di dalam wilayah Palestina terjajah maupun ke luar negeri. Di bawah prosedur saat ini, semua ekspor dan impor Palestina di bawah kendali Israel. Israel hanya memfungsikan Karam Abu Salem, meskipun ada tiga jalur masuk (Karam Abu Salem, Karni dan Rafah) guna mencegah penyelundupan senjata dari Mesir.⁴⁷

3. Pembatasan terhadap impor berbagai komoditas khususnya sektor perikanan dan lainnya

Hambatan ini tidak hanya terjadi di Gaza tetapi juga Tepi Barat, Palestina. Pembatasan terhadap impor berbagai komoditas ini juga meluas terhadap berbagai pembatasan yang diterima oleh masyarakat Palestina yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Palestina.

Sebagian kecil penduduk Gaza berprofesi sebagai nelayan. Sejak Israel memulai blokade ekonomi di Gaza tahun 2007, impor jaring ikan, suku cadang mesin dan bahan-bahan lain yang diperlukan bagi nelayan menangkap ikan telah dibatasi secara drastis. Dalam situasi ini, bensin dan solar menjadi semakin mahal dan sulit ditemukan. Banyak nelayan Palestina yang merugi dan memutuskan untuk tidak melaut, karena biaya melonjak drastis. Sedangkan nelayan lainnya yang putus asa untuk bisa pergi melaut, menggunakan bahan bakar yang biasa dipakai untuk memasak sebagai bahan bakar motor alternatif, meskipun menyebabkan kerusakan mesin.⁴⁸

Permasalahan pembatasan juga terjadi terhadap konsumsi penggunaan listrik di Gaza yang hanya tersedia selama tiga-empat jam setiap harinya. Kondisi ini menyebabkan para petani harus merogoh kocek lebih untuk menghidupkan diesel guna mengawetkan kurma di lemari pendingin. Untuk budidaya kurma, para petani membutuhkan dana yang besar. Hal ini karena pupuk, pestisida dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk budidaya kurma dijual kepada petani Gaza dengan harga yang lebih tinggi.⁴⁹

4. Perubahan batas wilayah penangkapan ikan dan insiden penembakan serta penahanan oleh Angkatan Laut Israel

⁴⁷ Palestinian Economic Dependence on Israel. <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/palestinian-economic-dependence-on-israel>.

⁴⁸ GAZA'S FISHING INDUSTRY. https://www.cjpme.org/fs_174

⁴⁹ Gaza farmers have dates, but have nowhere to sell them.

<https://www.middleeastmonitor.com/20180926-gaza-farmers-have-dates-but-have-nowhere-to-sell-them/> diakses pada 24 Agustus 2020

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB melaporkan bahwa peningkatan atau penurunan hasil tangkapan nelayan Palestina selain bergantung terhadap komoditas yang diimpor dari Israel juga bergantung pada batas wilayah penangkapan ikan yang sering berubah, insiden penembakan dan penahanan yang dilakukan oleh angkatan laut Israel di atas laut juga masih sering terjadi.⁵⁰

5. Ketergantungan pekerja Palestina terhadap lapangan kerja di Israel

Sekitar 22% warga Palestina bekerja di Israel atau di wilayah permukiman Israel. Pekerja Palestina di Israel tersebut menerima gaji lebih besar daripada bekerja di wilayah Tepi Barat, Palestina.⁵¹ Menurut laporan Administrasi Penyeberangan Perbatasan, Kependudukan dan Imigrasi (PIBA) tahun 2019, sekitar 70.000 pekerja Palestina dari wilayah pendudukan Palestina (OPT) saat ini bekerja di Israel dan sebagian besar di bidang konstruksi, serta banyak di bidang pertanian, industri, dan jasa. 30.000 tambahan dipekerjakan di permukiman Israel.

Selanjutnya, tingkat kecelakaan kerja (kebanyakan jatuh dari ketinggian) di bidang konstruksi meningkat setiap tahun. Setelah kecelakaan ini, pekerja Palestina dibiarkan membayar tagihan rumah sakit dan tidak diberi tunjangan atau kompensasi.

Selain itu, pekerja Palestina terpaksa membuang tenaga dan waktu mereka, berjam-jam menunggu di pos pemeriksaan untuk bisa masuk ke wilayah Israel, karena kurangnya efisiensi dalam sistem pos pemeriksaan serta pelecehan dan gangguan yang dilakukan oleh tentara dan personel keamanan Israel.⁵²

6. Durasi Pengurusan Dokumen Ekspor dan Impor

Selanjutnya, hambatan dalam aspek pengurusan dokumen ekspor dan impor menjadi ganjalan dalam pertumbuhan ekonomi Palestina. Tingkat ketergantungan yang tinggi Palestina terhadap Israel yang salah satunya adalah akses memberikan implikasi terhadap pengurusan dokumen kelengkapan ekspor dan impor. Dalam bagan 9 menunjukkan gap dan ketidakadilan Israel dalam masa pengurusan dokumen baik untuk kebutuhan ekspor dan impor terhadap Palestina.

⁵⁰ Gaza's fisheries: record expansion of fishing limit and relative increase in fish catch; shooting and detention incidents at sea continue. <https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and-relative-increase-fish-catch-shooting>

⁵¹ Unemployment Rate Among Labour Force Participants of Individuals . http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-by-gov2000-2019-3-e.html

⁵² Palestinian workers. <https://www.kavlaoved.org.il/en/areasofactivity/palestinian-workers/>

	Exports				Imports			
	Israeli firms		Palestinian firms		Israeli firms		Palestinian firms	
	Duration (days)	Cost (dollars)	Duration (days)	Cost (dollars)	Duration (days)	Cost (dollars)	Duration (days)	Cost (dollars)
Document preparation	4	110	10	310	4	120	17	350
Customs clearance and technical control	1	110	6	300	1	60	12	50
Ports and terminals handling	3	250	3	250	3	250	7	400
Inland transportation and handling	3	200	4	450	2	175	4	425
Total	11	670	23	1310	10	605	40	1225

Pengurusan Dokumen Ekspor Impor Palestina dan Israel

(Sumber: Laporan UNCTAD, The Besieged Palestinian Agricultural Sector, 2015)

7. Tingkat pengangguran yang terus meningkat di Palestina

Dengan semakin beratnya penjajahan di Tepi Barat dan blokade di Gaza menyebabkan kehidupan ekonomi warga Palestina semakin terpuruk. Selama 10 tahun terakhir, tingkat pengangguran di Palestina telah meningkat. Menurut laporan Biro Pusat Statistik Palestina pada tahun 2018 disebutkan angka pengangguran jauh lebih tinggi di Gaza yang terkepung daripada Tepi Barat yang diduduki. Tingkat pengangguran memuncak pada 2008 ketika mencapai 41% di Gaza. Pada 2018, persentase pengangguran di sana mencapai 52% dari total populasi sekitar 2 juta orang. Jumlah tersebut meningkat delapan persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2017 tercatat sekitar 18,1% warga Palestina di Tepi Barat menganggur.⁵³

8. Ketiadaan jaminan keamanan di Palestina

Kurangnya jaminan keamanan di Palestina akibat konflik, khususnya Jalur Gaza, membuat investor asing termasuk Indonesia masih belum melirik Palestina untuk berinvestasi di negara itu. Tak hanya berinvestasi, Palestina masih kesulitan menembus pasar dunia termasuk Indonesia untuk menjual produk-produknya.⁵⁴ Bank Dunia menyebutkan, perekonomian Palestina

⁵³ Poverty and the Labor Market: A Sheer Lack of Jobs?.

<https://www.ecoi.net/en/document/1006795.html>

⁵⁴ Pebisnis Indonesia Diajak Berinvestasi di Palestina.

<https://dunia.tempo.co/read/1228415/pebisnis-indonesia-diajak-berinvestasi-di-palestina/full&view=ok>. Retrieved 25 August 2020

tumbuh hanya 0,9% pada 2019. Kondisi itu kemudian anjlok sebesar 7,6% hingga 11% pada 2020.⁵⁵

Perhatian Palestina terhadap diplomasi ekonomi memang telah ada peningkatan dengan dilakukannya peninjauan kerja sama dengan berbagai negara. Namun, ada bentuk kekhawatiran di semua pengusaha untuk melakukan bisnis di Palestina khususnya terkait enggan persoalan keamanan. Faktor keamanan dapat dikatakan sebagai prioritas dalam investasi ataupun perdagangan yang dilakukan.

9. Kelangkaan Air, Ketergantungan Bahan Bakar dan Listrik dari Israel

Sisi ketergantungan Palestina terhadap Israel terlihat dari dua komoditas, misalnya listrik dan minyak bumi. Palestina mengimpor 86% konsumsi tenaga listrik dan 95% konsumsi minyak bumi dari Israel. Tingginya tingkat impor dua komoditas tersebut diperparah dengan kenaikan harga yang diberikan oleh Israel yang mempersulit masyarakat Palestina. Besar tagihan impor listrik mencapai USD 500 juta per tahun. Tagihan tersebut semakin besar ketika Israel menaikkan harga impor sejak 2013 sebesar 33% menjadi USD 650 juta. Sedangkan tagihan impor minyak bumi untuk bahan bakar mencapai USD 800 juta per tahun. Impor listrik dan minyak tersebut hanya mampu menyumbang 12% PDB Palestina.⁵⁶

Terkait kebutuhan air bersih, Palestina sangat tergantung pada suplai dari Israel yang menguasai 90% sumber air dan menerapkan pembatasan penggunaannya hingga tidak mampu memenuhi kebutuhan air ideal bagi masyarakat orang-orang Palestina⁵⁷. Di sisi lain sumber air di Gaza telah 80% sudah tercemar yang mengharuskan masyarakat Palestina untuk membeli air yang disuplai dari Israel dengan harga yang tinggi.⁵⁸

⁵⁵ Palestinian Territories' Economic Update — April 2020.

<https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2020>

⁵⁶ Institut Kajian Politik Ekonomi Palestina (MAS), *Tasyji' al-Itimad ala Mashadir al-Taqa' al-Mutajaddidah. Hal Tuhadzi Hajiz al-Siyarat*, 2015.

⁵⁷ Per orang dari penduduk Palestina mengkonsumsi 70 liter per hari, ini jauh berbeda dengan Israel yang menguasai penuh sector air, per individu pemukim Israel menghabiskan 300 liter perhari. Padahal standar organisasi kesehatan dunia yang menyebutkan standar kebutuhan air per orang adalah 100 liter per hari data lebih lanjut dapat dilihat di Wafa, *Waqi Qitha' al-Miyah fi Falastin*, realitas sector air di Palestina, http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9252 terakhir diakses 22 Agustus 2020.

⁵⁸ Pflp.ps, *Al-Mawarid al-Maiyah fi Ad-Dhiffah wa Qaitha Gaza*, Sumber Air di Tepi Barat dan Jalur Gaza,

<https://pflp.ps/post/7709/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9->

Kebijakan yang dipraktekkan Israel ini, menurut Peneliti Kajian Arab Israel-Palestina Ahmad Izuddin As'ad sebagai strategi Israel untuk menghancurkan ekonomi Palestina dengan membanjiri pasar-pasar Palestina dengan produk-produk Israel, membatasi kemampuan dan kebangkitan produksi domestik Palestina serta agar masyarakat Palestina meninggalkan sektor pertanian.⁵⁹

Peran Indonesia Membangun Ekonomi Palestina

Komitmen Indonesia terhadap diplomasi tercermin dalam arahan Presiden Joko Widodo yang diperkuat dengan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan adanya pertumbuhan ekspor non-migas melalui diversifikasi ekspor berupa produk dan tujuan ekspor. Sejuah ini, Indonesia hanya menguasai 0,92% dari perdagangan dunia. Oleh karena itu, perluasan terhadap pasar baru non-tradisional diperlukan Indonesia termasuk dalam konteks ini adalah membangun hubungan ekonomi yang kokoh dengan Palestina.

Harus diakui, hubungan bilateral Indonesia-Palestina di bidang ekonomi dan perdagangan belum cukup signifikan bila dibandingkan dengan relasi di bidang politik dan diplomasi. Keadaan ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi konflik negeri Palestina dan ketatnya kebijakan pembatasan pemerintahan Israel terhadap ruang gerak masyarakat dan alur keluar-masuk barang dari dan menuju Palestina.⁶⁰

Dengan kata lain, sektor ekonomi Palestina sangat bergantung pada Israel. Pada saat yang sama konflik yang sedang berlangsung berdampak pada besarnya biaya ekonomi Palestina — baik di Tepi Barat dan Gaza sehingga sejak pertengahan 90-an, Israel dapat dikatakan menjadi satu-satunya tujuan eksklusif ekspor Palestina, atau 90 persen dari total komoditas ekspor Palestina baik legal maupun illegal.⁶¹

Walaupun potensi pasar ekspor, khususnya Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania telah cukup meningkat beberapa tahun belakangan, sayangnya sebagian besar arus ekspor-impor Palestina dari pasar non-Israel masih melalui negara Israel dan secara otomatis melewati importir-imporir Israel.⁶²

[%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9](#) terakhir diakses 22 Agustus 2020.

⁵⁹ Pusat Kajian PLO, *Syuan Filistiniah, Al-Shinaah al-Tabaiyah: Al-Haimanah Al-Isti'mariyah (1967-1993) wa Muhawalat al-Infikak Anha*, edisi 278-279 (2019-2020)

⁶⁰ <https://kemlu.go.id/amman/en/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>. Diakses pada 27 Juli, 2020

⁶¹ <https://institute.global/advisory/israeli-palestinian-trade-depth-analysis>. Diakses pada 27 Juli, 2020

⁶² Foreign-trade statistics, Palestinian Central Bureau of Statistics. http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/507/default.aspx

Melihat situasi simalakama ini, sejak satu dekade lalu Indonesia senantiasa mencari celah diplomasi untuk berperan lebih banyak dalam membantu ekonomi Palestina. Di luar banyak sumbangan finansial di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sumber daya manusia, Indonesia juga dengan konkret meningkatkan volume perdagangan dengan Palestina. Tercatat, dari hanya sejumlah USD 1,02 juta pada 2011, potensi hasil perdagangan kedua negara meningkat pesat menjadi USD 3,67 juta ada 2014. Peningkatan ini di luar bisnis pariwisata yang juga banyak menarik minat masyarakat Indonesia. Setiap tahun misalnya, ada kurang lebih 50.000 warga Indonesia yang mengunjungi Palestina.⁶³



Pada 2018, upaya mendukung kemajuan dan keluasan jangkauan potensi ekonomi Palestina kembali diperkuat. Dalam konsultasi bilateral Indonesia-Palestina di kantor Kementerian Luar Negeri, 16 Oktober 2018, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, selain dukungan politik yang selama ini diberikan, Indonesia terus berusaha memberikan bantuan konkret bagi rakyat di sana. Di antara bantuan-bantuan tersebut adalah implementasi penerapan tarif bea masuk 0% bagi produk unggulan Palestina; Seperti Kurma dan minyak zaitun.⁶⁴ Hasil pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti kedua negara dengan menerbitkan peraturan presiden nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik

⁶³ Indonesia opens honorary consulate for Palestine in Ramallah (March 21, 2016) link: <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/14/indonesia-opens-honorary-consulate-for-palestine-in-ramallah.html> Diakses pada 27 Juli, 2020.

⁶⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-indonesia-tegaskan-komitmen-bantu-palestina/4616847.html>. Diakses pada 27 Juli, 2020

Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitas Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal Dari Wilayah Palestina.⁶⁵ Peraturan presiden ini menjadi legitimasi dari *Implementing Arrangement*⁶⁶ yang ditandatangani beberapa bulan kemudian (Agustus) oleh menteri perdagangan Indonesia dan duta besar Palestina. Dalam regulasi di Indonesia, ketentuan penghapusan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.126/PMK.010/2018⁶⁷ tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina, dan PMK No.11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk.⁶⁸ Kedua aturan ini secara rinci mengatur komoditas apa saja yang mendapatkan *privilege* dari penghapusan tarif tersebut. Walaupun terbilang kecil, sejumlah kalangan menilai sisi positif yang bisa diambil Indonesia dari kesepakatan tersebut, seperti menjadi pintu masuk menggarap pasar negara-negara Timur Tengah. Dengan mempelajari potensi ekonomi pasar Palestina, Indonesia dapat meningkatkan ekspor-impor di negara-negara timur tengah lain yang memiliki komoditas serupa seperti kurma, zaitun, karpet, dan lain-lain.

Selain itu, tren potensi perdagangan Indonesia-Palestina juga kian meningkat dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada 2017, nilai perdagangan kedua negara tercatat USD 2,39 juta, turun 4,91% ketimbang 2016 sebesar USD 2,52 juta. Angka ini jauh meningkat ketimbang total perdagangan pada 2013 yang baru tercatat senilai USD 553.900. Dengan kata lain, total perdagangan Indonesia-Palestina sudah naik tiga kali lipat dalam kurun waktu lima tahun.⁶⁹

Kemajuan ini cukup potensial jika meninjau komoditas-komoditas yang menjadi pilihan ekspor-impor Indonesia-Palestina merupakan makanan seperti meliputi ekstrak, esens, dan konsentrat kopi, teh (USD 2,1 juta); pasta (USD 356 ribu); roti, pastri, kue, biskuit, dan peralatan toko roti (USD 192 ribu); piring, alas, dan perkakas dari karet vulkanisir (USD 43,3 ribu); arang

⁶⁵ Peraturan presiden nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitas Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal Dari Wilayah Palestina

⁶⁶ Lengkapnya, lihat *Implementing Arrangement of The Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The State of Palestine on Trade facilitation for Certain products Originating Form Palestinian Territories*. Pdf.

⁶⁷ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitas Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina

⁶⁸ Peraturan menteri Keuangan No.11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk

⁶⁹ <https://tirto.id/kurma-dan-zaitun-di-antara-perdagangan-bebas-indonesia-palestina-cK7z>. Diakses pada 27 Juli 2020.

kayu (USD 30 ribu).⁷⁰ Selain itu, Indonesia mengekspor parfum dan sabun. Pada 2017, total ekspor Indonesia bahkan mencapai USD 2,05 juta. Begitu juga barang impor dari Palestina, mayoritas merupakan makanan, yakni kurma dengan total nilai ekspor mencapai USD 341.000 dan minyak zaitun dan fraksi lainnya dari zaitun (USD 4.100).⁷¹

Tantangan bagi Indonesia saat ini adalah usaha untuk mengurangi berbagai hambatan dalam membangun kerja sama khususnya di bidang perdagangan dengan Palestina. Melalui diplomasi baik bilateral maupun multilateral menjadi keniscayaan bagi Indonesia karena komitmen yang dibangun dengan Palestina sudah lebih dari setengah abad. Kerja ini perlu kolaborasi lintas-sektoral dan aktor yang beragam.

Rekomendasi

1. Pemerintah Indonesia perlu menginisiasi pembentukan Satuan Tugas terkait masalah kepalestinaan yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga yang simultan dengan dorongan pentingnya kerja sama baik melalui G to G, B to B maupun P to P;
2. Pembentukan forum untuk menaungi berbagai organisasi non-negara yang memiliki kepedulian terhadap isu Palestina;
3. Pemerintah Indonesia dan *stakeholders* perlu meningkatkan pemberian beasiswa antar-universitas untuk meningkatkan kualitas SDM Palestina;
4. *Market Intelligence Study* dilakukan secara berkala untuk melihat prospek dan tantangan (terkait daya saing produk Indonesia, tren permintaan produk Indonesia, pola rantai nilai global);
5. Secara konsisten, Indonesia harus terus mendorong kemerdekaan penuh Palestina dan usaha meningkatkan perekonomian Palestina. Indonesia tidak hanya menyuarakan Palestina dalam fora internasional tetapi promosi pembukaan ruang diplomasi ekonomi Palestina dengan negara-negara sahabat, dan;
6. Keseriusan Indonesia juga dapat diwujudkan dengan adanya Atase Perdagangan di KBRI Yordan merangkap Palestina.

⁷⁰<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128641/indonesia-fasilitasi-ekspor-produk-palestina#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%20US%243%2C5%20juta.Diakses pada 28 Juli 2020>

⁷¹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128641/indonesia-fasilitasi-ekspor-produk-palestina#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%20US%243%2C5%20juta.Diakses pada 29 Juli 2020>

BAB II

Urgensi Bantuan Internasional Bagi Palestina

Pendahuluan

Bantuan internasional kepada Palestina dimulai sejak peristiwa Nakba tahun 1949. Inisiasi bantuan tersebut dilakukan melalui lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA).⁷² Kemudian pasca-Perjanjian Oslo tahun 1994, Otoritas Palestina masih mengandalkan aliran dana internasional khususnya berasal dari negara-negara Arab, Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Menurut *Palestinian Economic Council for Development & Reconstruction* (PECDAR), jumlah bantuan internasional kepada Otoritas Palestina sejak 1994 hingga 2017 mencapai USD 36,6 Milyar dan hutang luar negeri sebesar USD 1,06 Milyar.⁷³ Bantuan internasional ini tak lantas mengakhiri krisis yang dihadapi Palestina. Meskipun bantuan UNRWA telah berlangsung 72 tahun, hingga saat ini sekitar 5 juta warga Palestina bergantung kepada bantuan internasional.⁷⁴

Pengamat Politik dari Jawaharlal Nehru University India Dr. Muhammad Sirajuddeen melihat bahwa pendudukan Israel, krisis pengungsi dan imprealisme adalah alasan utama Palestina masih tergantung terhadap bantuan internasional. Pendudukan dan tindakan diskriminatif Israel terhadap rakyat Palestina tercermin pada pembatasan ekstrem dan diskriminasi terhadap hak-hak warga Palestina. Tindakan Israel tersebut membatasi mobilitas orang dan barang dari dan menuju Jalur Gaza serta justru memfasilitasi pemindahan pemukim Israel ke permukiman di Tepi Barat yang diduduki (*occupied territories*).⁷⁵

Kebijakan pembatasan ini membuat Israel menguasai penuh perekonomian Palestina di satu sisi dan sisi lain melemahkan ekonomi Palestina. Hal ini diakibatkan tidak adanya wewenang Otoritas Palestina dan

⁷² UNRWA merupakan struktur di bawah Majelis Umum PBB yang dibentuk pada 8 Desember 1949. Hingga saat ini, UNRWA menangani 5,6 juta pengungsi Palestina di lima wilayah: Yordania, Libanon, Suriah, Jalur Gaza dan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur. Data diakses dari <https://www.unrwa.org/about-unrwa>

⁷³ Anadolu Agency, *35.4 Milyar Dolar Musaadat Dauliah Munzu Ta'sis Al-Sulthah Al-Filistiniah*, 13 Februari 2020, <https://bit.ly/35vsOtJ>

⁷⁴ Disampaikan oleh Dr. Muhammad Sirajuddeen, Pusat Kajian Politik Jawaharlal Nehru University dalam Webinar "Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan oleh CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.

⁷⁵ *Ibid.*,

kebebasan untuk mengatur ekonominya secara mandiri. Kondisi ini membuat Palestina sangat tergantung pada bantuan Internasional.⁷⁶

Kondisi tersebut yang menurut pengamat Palestina George Taufik Al-Abd sebagai tabiat struktural.⁷⁷ Artinya, hal ini muncul sebagai akibat kegagalan komunitas internasional mewujudkan solusi atas konflik Palestina-Israel yaitu berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Selain itu, hal ini dipandang sebagai anomali penjajahan dan pendudukan yang membuat Otoritas Palestina terus mengalami defisit anggaran meskipun usaha reformasi sudah dilakukan.⁷⁸

Berdasarkan data UNRWA bahwa 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan. Selain itu, data UN OCHA menyebutkan lebih 80% keluarga di Gaza melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 85% penduduk Gaza membeli makanan mereka dengan cara berhutang.⁷⁹ Dengan kondisi seperti ini, diprediksi Gaza tidak layak huni.⁸⁰

Selama pandemi Covid-19, Palestina terancam merugi USD 3 milyar jika pandemi masih berlangsung enam (6) bulan ke depan.⁸¹ Pandemi COVID 19 sangat berdampak pada beragam kelompok masyarakat Palestina di mana mayoritas perusahaan dan pabrik-pabrik tutup yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Pada kuartal pertama tahun 2020 ini jumlah pengangguran mencapai 336.300 orang yang terbagi 211.300 di Jalur Gaza dan 125.000 orang di Tepi Barat.⁸² Untuk penanganan pandemi, Otoritas Palestina bersama dengan UN OCHA menggalang dana sebesar USD 72 juta yang hingga saat ini baru terkumpul USD 31,2 juta (43%).⁸³ Krisis yang dihadapi Palestina saat ini menjadikan bantuan internasional sangat vital untuk menyelamatkan jutaan pengungsi Palestina dan menjaga stabilitas kawasan.⁸⁴

⁷⁶ Perekonomian Palestina juga tergantung kepada Israel. Israel menguasai 71% perekonomian wilayah Tepi Barat dan 30% perekonomian wilayah Jalur Gaza. Kemudian, Israel juga mengatur pergerakan barang di dua wilayah tersebut. Israel masih mengontrol 19% keamanan wilayah Tepi Barat. Hal ini juga ditambah dengan penguasaan secara penuh terhadap perbatasan udara dan perairan Palestina. Kondisi ekonomi Palestina ini dikaji dalam Kertas Kebijakan Seri 1 CDC pada Agustus 2020.

⁷⁷ George Taufik Al-Abd, *Ma'had Abhats al-Siyasat al-Iqtishadiyah al-Filastiny (MAS), al-Iqtishad al-Filastiny: al-Thariq ila al-Mustaqbal*, 2016

⁷⁸ Ibid.,

⁷⁹ Brookings Doha Center, Sultan Barakat dan Farras Masri, *In'asy Amaliah l'adah l'mar Gaza al-Mutaatsirah*, Agustus 2017

⁸⁰ UNCTAD, *Taqrir an al-Musa'adah Allati Yuqaddimuha al-Unkad ila al-Sya'ab al-Filastiny: al-Tathawwurat fi Iqtishad al-Ardh al-Filistinia al-Muhtalla*, 5 September 2020

⁸¹ *Markaz al-Zaituniah, In'ikas Jaihah Corona Ala al-Wad'aen al-Filastiny wa al-Israili*, 2020, hal. 25

⁸² NN.PS, *Ajzu al-Muwazanah Aktsar min 1,4 milyar dular, Curuna Yukabbidu al-Iqtishad al-Filastiny Khasair Tuqaddir bi 3 Milyarat Dular*, 26 Agustus 2020, <https://nn.ps/news/Report-1/2020/08/26/326897/>

⁸³ OCHA.OPT.ORG, *Halah al-Thaware al-Najimah an Fairus Kuruna (COVID19) Taqrir al-Halah al-Sadisah Asyar* (Agustus 2020), 28 Agustus 2020, <https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-16>

⁸⁴ UN.ORG, *AI-UNRAW, Ta'ahudad bi Taqdim 130 Milyoun Dular, Li Al-Laji' Filastin wa al-Amin al-Am Yuakidu Anna Tsamatu Hajah Lil Al-Mazid*, 23 Juni 2020, <https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057072>

Paradoks Bantuan Internasional

Semua kontraksi ini semakin membuat Palestina mengandalkan aliran dana internasional tetapi Palestina menghadapi realitas pahit bahwa jumlah bantuan internasional terus mengalami penyusutan sejak 2018. Realitas tersebut turut diperburuk setelah AS memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada Palestina sejak 31 Agustus 2018.⁸⁵ Bantuan internasional bagi Palestina mengalami penurunan drastis menjadi USD 488 juta pada 2019. Jumlah ini berkurang 26,5% dibandingkan 2018 sebesar USD 664 juta bahkan jika dibandingkan dengan bantuan internasional bagi Palestina di tahun 2013 sebesar USD 1,358 juta menunjukkan penurunan sebesar 64,1%.⁸⁶ Sementara itu, pada tahun 2020 UNCTAD memprediksi bantuan internasional terus berkurang hingga sekitar USD 266 juta. Artinya, jumlah di tahun 2020 merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.⁸⁷

Harus diakui bahwa negara-negara penyumbang bantuan terbesar bagi Palestina adalah AS dan Uni Eropa. Kedua aktor tersebut memandang bantuan diberikan adalah dalam rangka pencapaian perdamaian dengan Israel pasca-Perjanjian Oslo tahun 1993. Hal ini juga membuat negara-negara tersebut memberikan bantuan mereka kepada Israel. Pada tahun 2008, 2009 dan 2014, AS dan negara-negara Eropa bahkan memberikan bantuan militer dan senjata kepada Israel dengan alibi untuk memperkuat pertahanan negara itu. Namun, alih-alih diperlukan untuk menyokong perdamaian, dukungan tersebut sering kali dianggap secara tidak langsung memperkuat hegemoni militer Israel atas Palestina. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah. Sebagai gambarannya, dukungan militer AS terhadap Israel pada 2009 diberikan saat dijalkannya perang beberapa hari antara Israel dan Palestina.⁸⁸

Di sisi lain, bantuan internasional yang diterima Palestina sejak Perjanjian Oslo tahun 1993 selalu mendapatkan hambatan dan tantangan. Hal tersebut muncul disebabkan tidak adanya status negara yang sah dan okupasi Israel yang berkelanjutan. Dengan demikian, apapun jenis bantuan yang diberikan akan selalu berhadapan dengan hegemoni Israel baik dalam konteks ekonomi maupun politik sehingga diperlukan perubahan paradigma dari para aktor internasional dalam menyalurkan bantuan bagi Palestina.

Paradoks yang muncul dalam bantuan internasional bagi Palestina yang disebabkan adanya berbagai tantangan dan hambatan di lapangan perlu diyakini bahwa hal tersebut tidak menurunkan urgensi bantuan

⁸⁵ Aljazeera.net, *Waqfu Idarah Tramp Tamwil al-Unraw .. Ma al-Ahdaf?* 9 September 2018, <https://bit.ly/33IIDR6>

⁸⁶ *Markaz al-Zaituniah Li al-Dirasaat wa al-Istisyyarat, al-Taqrir al-Istratiji al-Filastiny 2018-2019*, hal. 118

⁸⁷ Youm7.com, *al-Umam al-Muttahidah Tuthliq al-Taqrir al-Sanawy Limu'tamar (al-Unktad) Haula Musaadaat al-Filastiniin*, 8 September 2020. <https://bit.ly/3hyBeCJ>

⁸⁸ Nora Lester Murad. *Donor Complicity In Israel's Violations of Palestinian Rights*. al-shabaka: the palestinian policy network. 2014. Hal. 1-8.

internasional bagi pembangunan Palestina dalam berbagai sektor. Terkait dengan urgensi bantuan internasional tersebut, penting untuk melihat peta sebaran bantuan internasional di Palestina yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Peta Bantuan Internasional Di Palestina

Otoritas Palestina baik di wilayah Tepi Barat maupun Jalur Gaza merupakan wilayah penerima bantuan internasional terbesar di dunia. Sejak Perjanjian Oslo tahun 1993 hingga 2014, ada lebih dari USD 30 milyar bantuan yang telah diterima Palestina.⁸⁹ Bantuan internasional selama bertahun-tahun telah menjadi tempat bersandar hampir semua unsur di Palestina. Baik bagi otoritas resmi nasional, organisasi masyarakat sipil, hingga faksi-faksi politik. Sejak peristiwa Intifada Kedua, selain negara-negara Liga Arab yang menjadi donor substansial dalam aspek finansial, tercatat sejak 1993, Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa telah menjadi penyumbang terbesar bantuan untuk Palestina.⁹⁰

Bantuan untuk Palestina berasal dari banyak otoritas internasional yang terdiri dari pemerintah negara lain, organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil internasional, lembaga kemanusiaan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui peta bantuan dan berbagai aktor yang berkaitan dengan bantuan internasional di Palestina, subbab ini akan melihat dua aspek sekaligus yaitu peta aktor dan jenis bantuan yang diberikan.

Bantuan Negara dan Peran Aktor Non-Negara

Berdasarkan *Country Evaluation Brief* yang diterbitkan oleh Chr. Michelsen Institute tahun 2017 menyebutkan bahwa negara-negara Liga Arab mengambil porsi besar dalam membantu Palestina.⁹¹ Selain karena merupakan negara-negara yang secara geografis dekat, juga karena warisan sejarah yang mengikat mereka dengan Palestina.

Dari keseluruhan negara anggota Liga Arab dan Timur Tengah umumnya, Arab Saudi merupakan pemberi bantuan reguler sekaligus terbesar. Antara 2009-2016, Arab Saudi telah menyumbang total USD 1.47 milyar dengan rerata USD 200 juta setiap tahunnya. Selain Saudi, Qatar berada di urutan kedua dengan bantuan sebesar USD 176 juta setiap tahunnya dan disusul Uni Emirat Arab di tempat ketiga sebesar USD 88 Juta.⁹²

⁸⁹ Country Evaluation Brief. Report No. 5/2017. Chr. Michelsen Institute. Juni, 2017. Hal. 1-35.

⁹⁰ Nathan J. Brown. *Time to Rethink, But Not Abandon, International Aid to Palestinians*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. 2018. Hal. 5-9. Sebagai catatan, bantuan internasional untuk Palestina hanya diberikan kepada Otoritas Palestina, tidak diberikan kepada Hamas. Hal ini disampaikan Profesor Saul J Takahashi dari Osaka Jogakuin University dalam Webinar "Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.

⁹¹ *Ibid.* Hal. 8.

⁹² Country Evaluation Brief., Hal 1-35.

Di sektor lain, Yordania, lewat perusahaan listriknya, juga turut terlibat membantu suplai listrik sejak Januari 2020.⁹³ Sejak 2005, Turki juga menjadi negara teratas dengan bantuan hampir menembus USD 400 juta yang tersebar ke berbagai proyek pembangunan. Dalam hal ini, bantuan Turki merupakan 30% dari total bantuan yang diberikan negara-negara Timur Tengah dan Afrika kepada Palestina.⁹⁴

Bantuan terbesar juga berasal dari negara-negara maju Uni Eropa dan AS. Walaupun sering kali mendapatkan kritikan dunia internasional atas berbagai kebijakan internasionalnya terhadap Palestina, AS nyatanya masuk dalam tiga besar pemberi bantuan terbesar beserta berbagai entitas internasional seperti Uni Eropa, Jerman dan Inggris, Swedia dan Norwegia (lihat tabel 1).⁹⁵

Country	Total Committed	Total Disbursed	%
*European Commission	3,719,401,847	3,230,002,683	87
United States	1,203,982,588	1,061,958,817	88
Saudi Arabia	827,755,843	804,228,880	97
Japan	777,238,751	714,084,293	92
*United Kingdom	693,259,350	537,018,778	77
*Sweden	596,145,732	469,647,898	79
Norway	500,243,210	460,583,842	92
*Germany	808,501,952	400,632,219	50
United Arab Emirates	370,994,808	368,422,339	99
Algeria	300,004,624	300,004,624	100
*France	409,204,441	296,412,676	72
Canada	264,136,825	262,563,216	99
Kuwait	239,274,673	239,274,673	100
*Italy	286,973,587	236,721,432	82
*Spain	252,553,120	227,146,006	90
The World Bank	286,560,467	220,242,931	77
*Netherlands	245,695,649	215,613,985	88
Qatar	149,563,561	149,563,561	100
Switzerland	128,663,334	116,244,385	90
Islamic Development Bank	123,072,884	99,417,066	80

Source: Ministry of Planning PAMS Database.

Note: Percentages are rounded to the nearest whole number.

Note: Japan's position as the fourth largest donor to the WB&GS is misleading as much of their aid arrives as technical assistance not managed by the PA.

20 Pendonor Palestina Terbesar berdasarkan Komitmen dan Realisasi Bantuan (1994-2008) Sumber: <https://mepc.org/journal/missing-mark-foreign-aid-palestinians>

Tabel 1 menunjukkan dua puluh aktor baik negara maupun organisasi internasional pendonor teratas ke Palestina dari tahun 1994 hingga 2008, berdasarkan komitmen mereka dan realisasi bantuan yang diwujudkan. Tabel ini menggambarkan kebaikan setiap negara dalam mempertahankan komitmen mereka. Komisi Eropa sejauh ini merupakan donor terbesar bagi Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meskipun demikian, negara-negara Timur Tengah

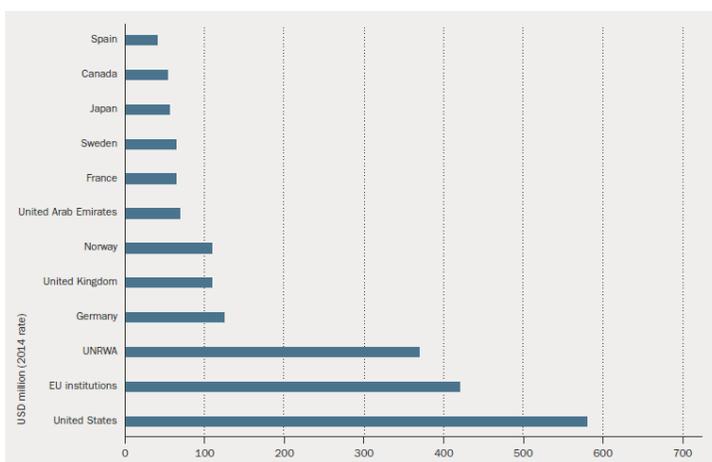
⁹³ OFFICE OF THE QUARTET (OQ). Report to the Ad Hoc Liaison Committee. 2 Juni 2020. Hal. 18

⁹⁴ Country Evaluation Brief,. Hal. 1-35.

⁹⁵ Data diakses dari <https://mepc.org/journal/missing-mark-foreign-aid-palestinians>. Diakses pada 14 September 2020.

Urgensi Bantuan Internasional Bagi Palestina

sedikit lebih baik dalam mempertahankan komitmen mereka terhadap realisasi bantuan. Arab Saudi, donor terbesar ketiga, bahkan telah memenuhi 97% dari komitmennya. Negara-negara Arab lain seperti Aljazair, Kuwait dan Qatar semuanya mencairkan bantuan 100% sebagaimana janji mereka. Di sisi lain, Islamic Development Bank (IsDB), sebuah instrumen multilateral yang menyalurkan bantuan negara-negara Arab ke Tepi Barat dan Jalur Gaza, hanya memenuhi 80% dari komitmen mereka sejak perjanjian Oslo tahun 1993, lebih rendah dari Komisi Eropa atau bahkan Amerika Serikat. Ini disebabkan salah satunya karena kemampuan mereka dalam menepati janji keuangan mereka, yang membuat donor Arab lebih memilih lembaga lain. Jika diperhatikan, hingga 2008 hanya Jepang satu-satunya wakil Asia yang masuk dalam 20 besar pendonor terbesar bagi Palestina.



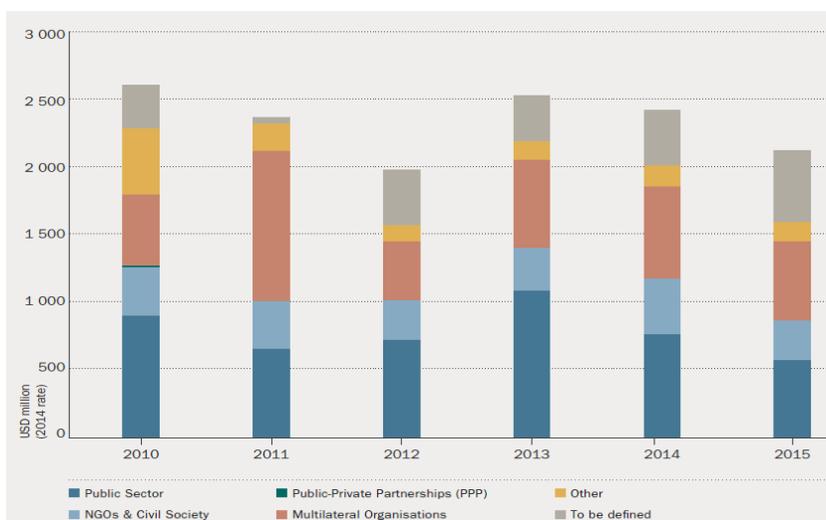
12 Pendonor Terbesar Palestina (2010-2015). Sumber: <https://norad.no/om-bistand/publikasjon/2017/country-evaluation-brief-palestine/>

Data lima tahun berikutnya (lihat Tabel 2) menunjukkan beberapa perubahan dalam urutan donor yang banyak terlibat. Walaupun masih didominasi Amerika dan Uni Eropa, ada kecenderungan negara-negara tersebut mulai mengalirkan bantuan melalui lembaga internasional seperti UNRWA. Perubahan ini sering kali juga dipengaruhi kebijakan pemerintahan AS, misalnya, di bawah Donald Trump yang banyak berubah sejak menjadi presiden Amerika.⁹⁶ Selain UNRWA, lembaga internasional lain di bawah PBB atau lainnya juga telah banyak berperan untuk Palestina seperti Bank Dunia dengan program *Multi Donor Trust Fund* (MDTF) atau *Consolidated Appeals Process* (CAP) CARE, dan *Save the Children* yang berkontribusi ke banyak sektor.⁹⁷

⁹⁶ Sejak 2019, Amerika bahkan menghentikan program USAID di Palestina. *Lihat* <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47095082>. Diakses 14 September 2020.

⁹⁷ Country Evaluation Brief,. Hal. 1-35.

Dari sejumlah Donor di atas, ditambah bantuan negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia dan Malaysia, alokasi bantuan tersalurkan dalam berbagai bentuk dan jenis. Fokus alokasi bantuan juga mengalami perubahan drastis khususnya setelah Intifada Kedua (khususnya antara 2000-2003) yang menjadi perantara perubahan besar orientasi bantuan internasional ke arah kemanusiaan dan pembangunan. Di satu sisi, perubahan orientasi ini menguntungkan Palestina sebab bantuan tidak saja hadir secara monolitik pada bidang politik, tetapi meluas dan menyasar elemen penting dampak dari perang, yaitu kemanusiaan. Namun di sisi lain, ini menunjukkan isu Palestina sedang “dikerangka” menjadi hanya persoalan kemanusiaan, yang pada akhirnya mengesampingkan fakta okupasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel.⁹⁸ Sayangnya, bantuan ini tidak selamanya berjalan lancar. Sejak 2008-2009, bantuan ke Palestina telah berkurang signifikan. Pada 2016, total bantuan internasional menurun drastis 81% sejak 2008. Pengurangan ini dilakukan baik oleh negara-negara Barat maupun Arab yang menyebabkan *gap* pembiayaan lebih dari USD 65 juta di akhir 2016.⁹⁹



Total Bantuan Pembangunan Resmi (ODA / *Official Development Assistance*) ke Palestina berdasarkan sektor (2010-2015)

Sumber: <https://norad.no/om-bistand/publikasjon/2017/country-evaluation-brief-palestine/>

selama periode 2010-2015 fokus utama bantuan ODA (*Official Development Assistant*) ada pada infrastruktur sosial termasuk dukungan anggaran langsung (44%), bantuan kemanusiaan (20%), pendidikan (14%) dan kesehatan (4%). Bantuan kemanusiaan menjadi kategori bantuan

⁹⁸ Hal ini disampaikan Profesor Saul J Takahashi dari Osaka Jogakuin University dalam Webinar “Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.

⁹⁹ *Ibid.* Hal. 1-35.

terbesar setelah infrastruktur sosial dengan USD 2,52 milyar pada periode 2012-2015. Pada periode yang sama, bantuan kemanusiaan juga disalurkan melalui UNRWA.

Dampak bantuan internasional bagi Palestina

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa bantuan internasional telah memainkan peran sentral bagi Palestina sejak penandatanganan kesepakatan Oslo 1993, baik dalam arti positif maupun negatif. Sisi positifnya, bantuan internasional telah membantu membangun dan mendukung infrastruktur, layanan sosial dan medis, serta lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil di Palestina. Di sisi negatif, bantuan internasional ini telah mengganggu politik Palestina karena beberapa donor hanya mendukung salah satu faksi politik saja.¹⁰⁰ Realitas tersebut terlihat dalam bantuan internasional yang masuk ke Jalur Gaza dimana beberapa donor mengecualikan Hamas dari bantuan internasional apapun, dan para donor menuntut LSM Palestina untuk berhenti meminta hak politik, seperti permintaan hak untuk kembali (*Right to return*).¹⁰¹

Menurut Prof. Takahashi, bantuan internasional adalah alat untuk menjaga dan memperluas penjajahan. Bantuan dari negara Barat secara politis, menjadi yang paling penting dan berpengaruh dalam mendanai bantuan sesuai kesepakatan Oslo. Donor lainnya, meskipun secara finansial sering kali penting (terutama yang berasal dari negara Teluk Arab), tidak pernah penting secara politis, dan belum mampu sepenuhnya mempengaruhi situasi.¹⁰²

Bantuan internasional yang diberikan para donor untuk Palestina digunakan mengembangkan beberapa sektor antara lain infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

Sektor infrastruktur

Usaha memperkuat fondasi kenegaraan Palestina dibangun melalui pengembangan infrastruktur publik dan sosial. Infrastruktur tidak hanya penting bagi penduduk untuk mengakses perumahan dan layanan sosial dasar, tetapi juga merupakan prasyarat agar Negara Palestina terwujud sebagai entitas fungsional. Pengembangan jaringan nasional, khususnya

¹⁰⁰ Mandy Turner. International Aid in the Absence of Palestinian Sovereignty: Notes towards a Strategy in the Aftermath of the Trump "Peace Plan". <https://www.jadaliyya.com/Print/40706>

¹⁰¹ Hal ini disampaikan Profesor Saul J Takahashi dari Osaka Jogakuin University dalam Webinar "Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.

¹⁰² Ibid.,

untuk air, listrik dan transportasi, sangat penting untuk melayani semua bagian wilayah, termasuk Gaza, Area C dan Yerusalem Timur.¹⁰³

Dengan dana lebih dari USD 91 juta dan tim profesional yang terdiri dari 60 tenaga teknis ahli di Tepi Barat dan Gaza, *United Nations Development Programme* (UNDP) mampu memberikan program berkualitas tinggi di bidang infrastruktur sosial dan permodalan, bantuan teknis dan program layanan masyarakat.

No	Bentuk Program	Total Bantuan
1	Mendukung inisiatif untuk sektor perumahan di Yerusalem Timur	USD 4,5 juta
2	Pembangunan gedung Kementerian Luar Negeri di Ramallah	USD 11 juta
3	Pembangunan <i>Place of Justice</i> di Ramallah	USD 24 juta
4	Investasi Pembangunan Pabrik Pengolahan Air Limbah Khan Younis (on plan)	USD 55 juta
5	Peningkatan pekerjaan untuk Stasiun Pembangkit Listrik Gaza	USD 3,5 juta
6	Mendukung distribusi sektor kelistrikan di Gaza	USD 6,5 juta
7	Rehabilitasi 8 institusi masyarakat sipil di Yerusalem Timur	USD 1,7 juta
8	Pembangunan 3 kegiatan sistem pengumpulan air limbah di bagian utara Tepi Barat	USD 4,5 juta
9	Pembangunan 65 unit rumah di seluruh Tepi Barat	USD 3 juta
10	Pembangunan Agro-Industrial Park dan jalan penghubung di Jericho	USD 3,8 juta
11	Pembangunan lebih dari 500 unit rumah di seluruh Gaza	USD 15 juta
12	Rehabilitasi fasilitas kesehatan ibu di lima rumah sakit dan empat puskesmas	USD 800.000
13	Rehabilitasi dan pembangunan jalan menggunakan material beton pecah	USD 2 juta

Bentuk Program UNDP dalam Proyek di Palestina Saat ini (2020). Sumber: https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/poverty_reduction/infrastructure-development.html

Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan di bidang infrastruktur, teknologi, informasi, pariwisata, manufaktur ringan, dan pertanian senilai USD 1,5 juta untuk Palestina di bawah *Conference on Cooperation among the East Asian Countries for Palestinian Development*

¹⁰³ Public and Social Infrastructure Development. https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/poverty_reduction/infrastructure-development.html

(CEAPAD). Bantuan sebesar USD 1.4 juta untuk pembangunan *Indonesian Cardiac Center* di RS As-Shifa Gaza.¹⁰⁴

Selain Indonesia, Tahun 2016 Turki telah membantu dalam pembangunan Palestina dengan proyek senilai USD 400 juta yang dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama dan Pembangunan Turki (TIKA) untuk wilayah Palestina, termasuk Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Badan tersebut melaksanakan 173 proyek di Tepi Barat, 113 proyek di Gaza dan 63 proyek di Yerusalem.¹⁰⁵

Pada tahun 2019 Jalur Gaza mendapatkan bantuan proyek rekonstruksi sebesar USD 84 juta. Pemerintah Italia mendonasikan USD 16 Juta untuk merekonstruksi Menara Italia di Jalur Gaza dan membangun 23 gedung perumahan. Sementara pemerintah Malaysia menyumbang USD 6 Juta dan Jerman USD 23 Juta di mana dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun rumah warga Gaza yang hancur dalam perang. Sementara itu, Pemerintah Kuwait menyumbang USD 35 Juta untuk infrastruktur dan USD 4 Juta untuk pembangunan Rumah Sakit Persalinan. Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan UNRWA melakukan proyek renovasi 700 unit rumah dengan biaya sebesar USD 7 Juta ditambah USD 10 Juta Pemerintah Arab Saudi.¹⁰⁶

Selain proyek rekonstruksi, listrik juga menjadi salah satu program prioritas untuk pembangunan Palestina, karena banyak sektor yang harus beroperasi dengan menggunakan energi listrik seperti industri, kesehatan, dll. Wilayah Palestina menghadapi tantangan keamanan energi yang signifikan baik di wilayah Jalur Gaza maupun Tepi Barat. Untuk mengatasi krisis listrik di Jalur Gaza pada Oktober 2018 Pemerintah Qatar menyediakan dana sebesar USD 60 juta. Tahun 2019 Bank Dunia menyetujui hibah sebesar USD 12 juta untuk upaya perluas akses listrik bagi rakyat Palestina.¹⁰⁷ Juni 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra pelaksana meresmikan pembangkit listrik tenaga surya baru di rumah sakit Nasser, salah satu rumah

¹⁰⁴ The Palestinian Issue. https://kemlu.go.id/portal/en/read/23/halaman_list_lainnya/the-palestinian-issue
Lebih lanjut mengenai kontribusi Indonesia dalam memberikan bantuan internasional ke Palestina dijelaskan pada bagian berikutnya dalam kertas kebijakan ini.

¹⁰⁵ Envoy praises Turkey's help in Palestine development.
https://www.tika.gov.tr/en/news/envoy_praises_turkey_s_help_in_palestine_development

¹⁰⁶ With Funds from the Kingdom of Saudi Arabia UNDP and UNRWA Sign US\$10 million Agreement for Reconstruction and Repair of 272 Affected Houses in Gaza. <https://www.un.org/unispal/document/with-funds-from-the-kingdom-of-saudi-arabia-undp-and-unrwa-sign-us10-million-agreement-for-reconstruction-and-repair-of-272-affected-houses-in-gaza/>

¹⁰⁷ US\$12 Million Boost for Efforts to Expand Access to Electricity for the Palestinian People.
<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/14/us12-million-boost-for-efforts-to-expand-access-to-electricity-for-the-palestinian-people>

sakit utama di Gaza. Didanai oleh Pemerintah Jepang.¹⁰⁸ Di Tepi Barat, tahun 2017, Pemerintah Jepang mendanai proyek penggantian kabel listrik sepanjang 8 kilometer kabel listrik bawah tanah guna memperbaiki penyediaan listrik dan lingkungan tempat tinggal. Bantuan senilai USD 83.260 melalui Pemerintah Jepang melalui GGP (*Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects*).¹⁰⁹

Proyek pembangunan selanjutnya adalah pengadaan air bersih. Sumber daya air Palestina sepenuhnya dikendalikan oleh Israel. Secara umum, kualitas air di Jalur Gaza jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Tepi Barat. UNICEF, didanai Uni Eropa, membangun pabrik desalinasi air laut terbesar di Gaza, pabrik ini mampu meningkatkan akses air minum bagi sekitar 250.000 orang. Namun, dengan hanya 4-5 jam listrik tersedia setiap hari di Gaza, tidak bisa berjalan secara maksimal.¹¹⁰

Meskipun banyak bantuan internasional di bidang infrastruktur yang digunakan untuk membangun Palestina, mengutip pernyataan Dr. Sirajudeen, akan tetapi semua bantuan internasional yang masuk ke wilayah Palestina berusaha untuk dibongkar atau dihancurkan oleh Israel. Mereka telah menyerang proyek infrastruktur bantuan luar negeri, seperti proyek-proyek yang didanai Uni Eropa, dan fasilitas PBB.¹¹¹

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam bidang Pendidikan dan kesehatan, UNDP, UNICEF, UNFPA, WHO dan UNRWA semuanya telah memainkan peran penting. Sejak 1986 sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dari UNDP, dengan fokus pada pembangunan sekolah negeri dan swasta di kota-kota dan dalam membantu beberapa sekolah swasta di berbagai tingkatan. Pada tahun 1992, kebijakan program bergeser ke fokus pada ruang kelas untuk anak perempuan di pedesaan. Kegiatan pendidikan saat ini difokuskan terutama pada penyediaan atau rehabilitasi infrastruktur, seperti pembangunan ruang kelas tambahan di desa, rehabilitasi dua gedung sekolah pertanian di Tepi Barat dan Jalur Gaza, rehabilitasi kompleks sekolah di Jericho dan lain-lain.¹¹²

¹⁰⁸ With Funds from the Government of Japan - UNDP Inaugurates Renewable Energy for All project in Gaza. <https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/articles/2019/renewable-energy-for-all-project-in-gaza.html>

¹⁰⁹ West Bank village celebrates completion of Japanese-funded electricity project. <https://english.wafa.ps/Pages/Details/90701>

¹¹⁰ WASH: water, sanitation and hygiene. <https://www.unicef.org/sop/what-we-do/wash-water-sanitation-and-hygiene>

¹¹¹ Disampaikan oleh Dr. Muhammad Sirajudeen, Pusat Kajian Politik Jawaharlal Nehru University dalam Webinar "Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan oleh CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.

¹¹² Assistance to the Palestinian people. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-189022/>

UNDP juga telah secara aktif terlibat dalam sektor kesehatan lingkungan, menangani masalah-masalah seperti rehabilitasi konstruksi, peningkatan dan pemeliharaan skema pasokan air di daerah pedesaan dan perkotaan, sistem pengumpulan limbah, pelatihan staf kota, pengelolaan sumber daya air dan publik kampanye kesadaran.

Program bantuan UNICEF untuk wanita dan anak-anak Palestina dimulai di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1980, dengan fokus pada bidang kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 1991, kehadiran dan kontribusi UNICEF yang lebih besar menghasilkan kerja sama yang lebih luas di bidang kegiatan pemuda, pendidikan luar sekolah dan berbasis masyarakat, pendidikan dasar dan pengembangan anak usia dini. Sejak Agustus 1994, kantor UNICEF Yerusalem telah ditingkatkan fungsinya untuk menjalankan program yang diperluas di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Otoritas Palestina dan organisasi non-pemerintah, program pendidikan UNICEF terdiri dari pendidikan dasar, rehabilitasi psiko-sosial anak dan remaja, pengembangan anak usia dini dan pendidikan non-formal.

Sejak 1950, UNRWA telah menjadi penyedia pendidikan tunggal terbesar di Jalur Gaza, memastikan pendidikan dasar dan persiapan gratis untuk 109.833 anak pengungsi di 159 sekolah, 108 sekolah di antaranya beroperasi dengan sistem shift ganda, dengan menggunakan anggaran USD 35,4 juta pada tahun 1993 dan mempekerjakan 3.170 guru. Di Tepi Barat, UNRWA bertanggung jawab atas pengawasan teknis dan administratif pendidikan dasar dan persiapan, yang terdiri dari 100 sekolah. Badan ini harus membangun dan / atau menyewa lebih banyak sekolah dan ruang kelas serta mempekerjakan lebih banyak guru untuk mengakomodasi peningkatan alami dalam populasi sekolah. UNRWA juga menyediakan kursus pelatihan kejuruan bagi para pengungsi Palestina dengan keterampilan di bidang industri, perdagangan, kerajinan atau pekerjaan (merancang, memproduksi, merakit, memperbaiki atau memperbaiki produk manufaktur). Pusat pelatihan UNRWA memainkan peran penting dalam mempersiapkan anak-anak muda pengungsi Palestina untuk mendapatkan kesempatan kerja.

UNRWA juga telah lama terlibat dalam sektor kesehatan di Jalur Gaza, di mana mereka menyediakan 75% layanan perawatan kesehatan primer. 65 dokter, 149 perawat dan 35 paramedis, dioperasikan UNRWA di Jalur Gaza. Mereka beroperasi di sembilan pusat kesehatan layanan umum, enam di antaranya berada pada shift ganda. Ada tambahan tujuh klinik kesehatan ibu dan anak, serta klinik gigi dan spesialis. UNRWA memberikan subsidi 50 dari 85 tempat tidur di Rumah Sakit Ahli Arab di Kota Gaza. Pada

tahun 1993, UNRWA memulai pembangunan Rumah Sakit Gaza, fasilitas dengan 230 tempat tidur di dekat Khan Younis. Rumah Sakit ini hampir selesai dan akan melayani Jalur Gaza bagian selatan. Akuisisi dan perluasan oleh UNRWA dari sekolah perawat utama di Jalur Gaza akan memberikan kontribusi kepada staf rumah sakit yang sekarang sedang dibangun.

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, wilayah Palestina sangat membutuhkan pasokan medis lebih dan bantuan perawatan kesehatan. Badan bantuan yang dikelola pemerintah Turki bulan April 2020 mengirim bantuan medis, yaitu berupa pengujian COVID-19, masker, pakaian khusus dan peralatan dasar lainnya kepada kementerian kesehatan Palestina.¹¹³ Sedangkan AS memberikan bantuan sebesar USD 5 juta untuk disalurkan ke rumah sakit dan warga Palestina.¹¹⁴ Uni Emirat Arab mengirim 14 ton pasokan medis darurat ke Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Bantuan tersebut meliputi alat pelindung diri, APD, dan alat kesehatan. Terutama, ini termasuk 10 ventilator yang sangat dibutuhkan.¹¹⁵ Akan tetapi Palestina menolak bantuan tersebut karena pemerintah UEA tidak berkoordinasi dengan Palestina melainkan Israel.¹¹⁶

Pemberdayaan Ekonomi

Setelah kesepakatan Oslo tahun 1993 ditandatangani, Komisi Eropa dan gabungan negara-negara anggota Uni Eropa sejauh ini menjadi penyumbang bantuan terbesar bagi Palestina. Pada tahun 2020, Uni Eropa menyediakan € 23,1 juta dalam pendanaan kemanusiaan untuk warga Palestina yang membutuhkan, termasuk dana untuk memenuhi kebutuhan yang muncul akibat wabah virus corona. Sebesar € 5,5 juta telah dialokasikan untuk tanggap darurat dan perlindungan bagi keluarga yang terkena dampak pembongkaran dan penggusuran di Tepi Barat, khususnya di Area C, Yerusalem Timur, dan Hebron. Mitra memberi mereka bantuan darurat, bantuan hukum, dan akses ke layanan penting.

Sebagai bagian dari pendanaan tahun 2020, lebih dari € 15 juta telah dialokasikan untuk program kemanusiaan di Gaza. Dengan dana ini, UE memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang rentan, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan menyediakan, melalui mitra, pendidikan yang aman untuk anak-anak, perawatan trauma bagi yang

¹¹³ Palestine receives Turkish aid to stem coronavirus pandemic.

<https://www.dailysabah.com/politics/palestine-receives-turkish-aid-to-stem-coronavirus-pandemic/news>

¹¹⁴ U.S. gives \$5 million to Palestinians amid pandemic, after years of aid cuts.

<https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-palestinians-idUSKBN21Y38E>

¹¹⁵ UAE delivers 14 tonnes of medical supplies to Palestinians to fight pandemic.

<https://thearabweekly.com/uae-delivers-14-tonnes-medical-supplies-palestinians-fight-pandemic>

¹¹⁶ Palestinians again refuse parcel of virus aid from UAE.

<https://www.timesofisrael.com/palestinians-again-refuse-parcel-of-virus-aid-from-uae/#gs.glvcd8>

terluka, bantuan darurat air dan sanitasi di fasilitas kesehatan utama, serta bencana. Secara total, € 1,4 juta didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan darurat, untuk memberi anak-anak yang paling membutuhkan akses ke sekolah berkualitas yang aman, di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Menyusul pandemi virus corona, mitra kemanusiaan UE di lapangan dengan cepat menyesuaikan intervensi mereka dengan menerapkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan orang-orang yang membutuhkan. Pendanaan Uni Eropa telah memungkinkan mereka untuk meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi.

Sejak tahun 2000, Uni Eropa telah memberikan lebih dari € 793 juta dalam bantuan kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penduduk Palestina.¹¹⁷ Selain itu, negara-negara Liga Arab juga telah menjadi donor yang substansial, terutama melalui dukungan anggaran dari Otoritas Palestina. Setelah pemilu Palestina 2006, negara-negara Arab mencoba untuk berkontribusi dalam pembayaran gaji pegawai negeri Palestina, melewati Otoritas Palestina.¹¹⁸

Pada tahun 2015, Liga Arab memberikan bantuan kepada Otoritas Palestina untuk pembayaran gaji PNS setelah Israel membekukan lebih dari USD 100 juta pajak penghasilan Palestina. Padahal sekitar 70% dari pendapatan pemerintah Palestina berasal dari pajak tersebut.¹¹⁹ Tahun 2018, Pemerintah Qatar berhasil mengirim uang USD 15 juta untuk membayar gaji PNS di Jalur Gaza, setelah Otoritas Palestina memutuskan memangkas gaji para PNS di Gaza.¹²⁰ Dan pada tahun 2020, Uni Eropa menyalurkan bantuan sebesar € 23 juta untuk membantu membayar gaji 43.000 PNS Palestina di tengah krisis ekonomi akibat virus corona.¹²¹

Pengamat politik Jawaharlal Nehru University Dr. Muhammad Sirajuddeen menyatakan bahwa pada fase pertama tahun 1993 hingga 2011, bantuan internasional ini tidak membuat perubahan apa pun di lapangan. Bantuan dari luar negeri juga tidak bisa menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan atau praktik ekonomi yang berkelanjutan.

¹¹⁷ EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS IN PALESTINE.

https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/palestine_en

¹¹⁸ Two Years after London: Restarting Palestinian Economic Recovery.

<https://web.archive.org/web/20160303195418/http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMainReportfinalSept18%26cover.pdf>

¹¹⁹ Dapat Bantuan, Palestina Akhirnya Bisa Bayar Gaji PNS.

<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/nih7pp/dapat-bantuan-palestina-akhirnya-bisa-bayar-gaji-pns>

¹²⁰ Bantuan Qatar Masuk Palestina, PNS Gaza Akhirnya Gajian.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2018112122459-120-345838/bantuan-qatar-masuk-palestina-pns-gaza-akhirnya-gajian>

¹²¹ Bayar Gaji ASN Palestina, Uni Eropa Salurkan Donasi Sebesar 23 Juta Euro.

<https://www.npc.or.id/bayar-gaji-asn-palestina-uni-eropa-salurkan-donasi-sebesar-23-juta-euro/>

Menurutnya, bantuan internasional ini hanyalah tentang negara-negara kuat/kaya yang menopang negara-negara lemah/miskin dalam bentuk bantuan kemanusiaan, sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi perekonomian yang mandiri. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Takahashi yang mengatakan bahwa Palestina dikemas hanya sebagai masalah kemanusiaan saja, bukan masalah politik maupun pelanggaran HAM.

Peran Indonesia dalam Bantuan Internasional terhadap Palestina

Lebih dari setengah abad, Indonesia telah berkomitmen membangun dan mendukung berbagai upaya mencapai kemerdekaan bangsa Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebutkan bahwa komitmen Indonesia terhadap Palestina tertuang dalam beberapa strategi. Pertama, dukungan terbentuknya negara Palestina sebagai negara merdeka. Kedua, dukungan dalam bentuk pengembangan kapasitas agar Pemerintah Palestina dapat menjalankan fungsinya sebagai pemerintah negara merdeka. Ketiga, dukungan agar status Palestina sebagai neagra mendapatkan pengakuan penuh oleh dunia dan masyarakat internasional. Dan keempat, menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel guna mengakhiri kolonisasi terhadap Palestina, antara lain dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel.¹²²

Bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui berbagai skema kerja sama. Dukungan tersebut tidak hanya dilakukan Indonesia dalam bidang politik dan ekonomi melainkan juga berbagai aktivitas seperti program peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan Palestina di bidang pertanian, kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan dan komunikasi dan teknologi informasi. Ragam bantuan Indonesia tersebut diinisiasi oleh berbagai pihak di Indonesia baik pemerintah Indonesia, dan lembaga non-pemerintah serta perorangan (filantropi) dengan berbagai latar belakang.

Ragam Skema Bantuan Indonesia

Bantuan Indonesia terhadap Palestina dilakukan dengan beragam kerangka kerja sama. Dalam hal ini, peneliti membaginya dalam tiga (3) plus 1 skema kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan bagi Palestina, yaitu (1) melalui organisasi

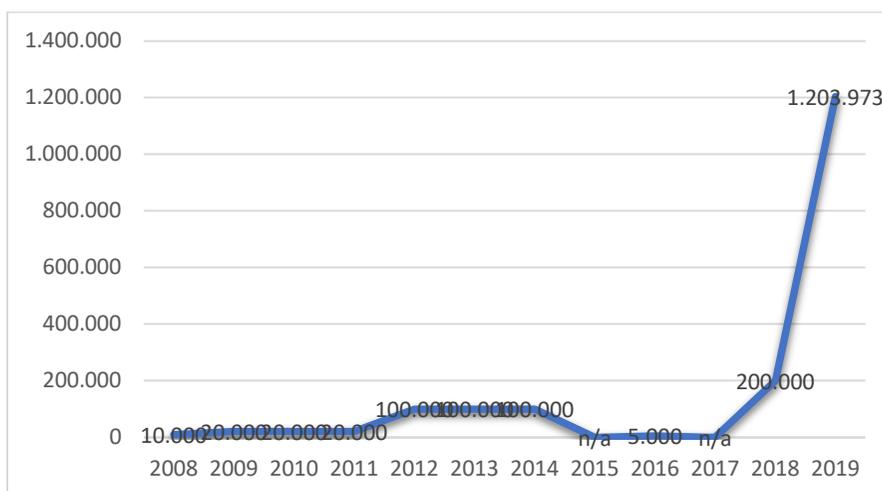
¹²² Poin penyampaian Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Sunarko dalam Seminar Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina pada 29 November 2018 di Universitas Indonesia. Detil penyampaian dapat diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=slsTukvhRRY>

Urgensi Bantuan Internasional Bagi Palestina

internasional, (2) melalui kerja sama triangular, dan (3) melalui kerja sama bilateral dengan Palestina, serta usaha Indonesia menggalang solidaritas negara-negara Selatan-Selatan. Ketiga skema kerja sama tersebut akan dijelaskan dalam kertas kebijakan ini.

Pertama, Indonesia berkontribusi dalam pemberian bantuan internasional bagi Palestina melalui organisasi internasional. Pemberian bantuan tersebut umumnya dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional di bawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*)).

Melalui UNRWA, dalam tabel 6, Indonesia secara aktif telah menjadi donor di UNRWA sejak tahun 2008. Sejak 2008-2014, Indonesia konsisten memberikan bantuan kepada Palestina dengan adanya peningkatan jumlah bantuan dari USD 10.000 (2008), USD 20.000 (2009-2011), dan USD 100.000 (2012-2014). Namun, di tahun 2015 dan 2017 berdasarkan laporan UNRWA, Indonesia tidak masuk dalam daftar pemberi bantuan bagi Palestina. Pada tahun 2016, Indonesia memberikan bantuan yang relatif 'kecil' dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar USD 5.000. Meskipun demikian, peningkatan signifikan dilakukan Indonesia di tahun 2018 sebesar USD 200.000 dan di tahun 2019 dengan bantuan sebesar USD 1.203.973.



Kontribusi Indonesia ke UNRWA (dalam USD) dari 2008-2019

Sumber: Laporan tahunan UNRWA (data diolah peneliti)

Komitmen Indonesia melalui forum multilateral PBB UNRWA tersebut yang ditingkatkan di tahun 2020 yang disampaikan Menlu Retno Marsudi

dalam *Extraordinary Ministerial Pledging Conference for UNRWA* bahwa komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan Rp 36,5 Milyar.¹²³ Adapun rincian dari bantuan tersebut adalah masing-masing sebesar USD 1 juta (Rp 14,6 Milyar) kepada UNRWA dan Pemerintah Palestina, serta USD 500.000 (Rp 7,3 Milyar) kepada Palang Merah Internasional.¹²⁴

Kedua, bantuan Indonesia yang dilakukan secara triangular¹²⁵ dengan menyertakan lembaga donor dan negara-negara pendonor tradisional seperti melalui CEAPAD dan *Japan International Coordination Agency (JICA)*. Indonesia mendorong inisiatif kerja sama negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur dalam penyelenggaraan "*Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD)*". Dalam kerangka ini, komitmen Indonesia juga terus terlihat dalam gelaran *Ministerial Meeting CEAPAD III* di Bangkok, Thailand tahun 2018 dengan komitmen bantuan pengembangan kapasitas untuk Palestina senilai USD 2 juta selama tahun 2019-2021.¹²⁶ Kerjasama melalui CEAPAD ini yang berlanjut dengan diadakannya CEAPAD SOM III pada tahun 2019 di Ramallah, Palestina.¹²⁷

Selain kerja sama melalui CEAPAD, adapun implementasi kerja sama triangular melalui bantuan donor JICA.¹²⁸ Salah satu kegiatan yang berjalan bersama JICA adalah pelatihan "*Training Program on Frozen Semen Production and Breeding of Small Ruminant for Palestine*" pada tahun 2015.¹²⁹ Kerjasama terus berlanjut dengan diadakannya pelatihan "*Sustainable Fish Farming through The Adoption of Artificial Insemination Technology*" di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari. Kegiatan ini merupakan

¹²³ UNRWA merupakan badan PBB yang menanganin sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina yang berada di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon dan Suriah. Data diakses dari <https://republika.co.id/berita/qcev25459/indonesia-komitmen-tingkatkan-bantuan-untuk-palestina>

¹²⁴ Ibid.

¹²⁵ Kerja sama triangular merupakan kerja sama yang dilakukan atas dasar inisiatif negara-negara Selatan-Selatan bersama dengan negara-negara donor tradisional dan organisasi multilateral dalam pemberian dukungan pendanaan (funding), pelatihan (training), manajemen dan sistem teknologi. Data dapat diakses dari <https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/>

¹²⁶ Data diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/menlu-indonesia-tegaskan-komitmen-bantu-palestina/4616847.html>

¹²⁷ Data diakses dari <https://kemlu.go.id/amman/id/news/1271/indonesia-hadiri-pertemuan-ceapad-pertama-di-tanah-palestina>

¹²⁸ Lembaga JICA dan Indonesia telah menjalin kerja sama melalui mekanisme triangular sejak diluncurkannya program kemitraan tahun 2003 yang kemudian dilengkapi dengan Record of Discussion pada 2013. Data lebih lanjut dapat diakses dari Shunichiro Honda. *Japan's Triangular Cooperation Mechanism: With a Focus on JICA's Activities*. (Tokyo: JICA Research Institute, 2014): 20. https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/booksandreports/jrft3q00000029sb-att/Triangular_Cooperation_Mechanisms_2_for_web.pdf dan Kajian Akademik: Pembentukan *Single-Agency* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia, Tim Koordinasi Nasional KSST, (Jakarta: 2017): 32, https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi_01_12072018.pdf.

¹²⁹ Asra Virgianita et al., *Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia yang Lebih Baik*. (Jakarta: PT Pentas Grafika, 2019): 60.

prakarsa Kementerian Pertanian RI dan JICA bagi 10 peserta dari Palestina pada tahun 2019.¹³⁰

Ketiga, komitmen yang dibangun Indonesia secara bilateral terhadap Palestina. Aktivitas yang diberikan Indonesia sangatlah beragam.¹³¹ Secara umum, Indonesia telah inisiasi 178 program/modul terhadap Palestina sejak tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2020. Program/modul tersebut meliputi program di bidang (UKM), pendidikan dan kebudayaan, sekolah diplomatik, pemberdayaan perempuan, kesehatan, infrastruktur, penanganan bencana, energi, pertanian, industri, tata kelola pemerintahan dan administrasi publik, pertahanan, pengurangan kemiskinan, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pariwisata dan manufaktur ringan. Besaran bantuan yang telah diberikan adalah sebesar USD 8,9 juta dan menyertakan setidaknya 1989 warga Palestina.¹³²

Selain 3 skema tadi, ditambah dengan 1 skema pemberian bantuan lain yang diberikan Indonesia terhadap Palestina melalui solidaritas negara-negara Selatan-Selatan melalui kerangka *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP).¹³³ Implementasi dari kerangka ini terlihat dengan adanya *NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine* pada tahun 2008. Selain itu, kegiatan lainnya adalah pelatihan di bidang *microfinance* bagi bangsa Palestina pada 25-28 Maret 2018 dan pelatihan bidang usaha kecil dan menengah (UKM) pada 17-21 November 2018 yang diadakan di Amman, Yordania.¹³⁴

Sokongan Pemerintah, Parlemen dan Kelompok Sosial-Masyarakat

Bantuan Indonesia terhadap Palestina tidak hanya berasal dari pemerintah melainkan juga disokong oleh masyarakat sipil yang memberikan peranan yang signifikan dalam aspek kontinuitas pemberian bantuan bagi Palestina. Indonesia memiliki ragam lembaga non-pemerintah dan perorangan (filantropi) yang secara aktif memberikan bantuan bagi Palestina.

Kesertaan lembaga non-pemerintah dalam memberikan bantuan bagi Palestina merupakan wujud dukungan bagi pencapaian kepentingan nasional

¹³⁰ Data diakses dari <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/peternak-ikan-palestina-belajar-teknologi-inseminasi-buatan-di-indonesia> dan <https://www.jica.go.jp/english/office/topics/190208.html>

¹³¹ Data diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/227580-indonesia-palestina-dan-politik-luar-negeri>

¹³² Disampaikan oleh Mantan Pelaksana Tugas Palestina KBRI Amman Yordania merangkap Negara Palestina Niko Adam dalam Webinar "Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan pada 26 September 2020 oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bersama CDC el-Sharq

¹³³ NAASP merupakan bentuk kemitraan negara-negara Asia Afrika melalui tiga pilar utama: (1) Solidaritas Politik, (2) Kerja Sama Ekonomi dan Hubungan Sosial Budaya, dan (3) Kerja sama antar-organisasi regional/subregional serta antar-masyarakat.

¹³⁴ Data diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/view/6641/indonesia-berikan-pelatihan-project-cycle-untuk-palestina>

Indonesia di forum internasional. Selain itu, hal ini juga dimuat dalam Pasal 1 UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa “Hubungan luar negeri selain dilakukan oleh Pemerintah juga dilakukan oleh aktor non-negara yaitu badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.

Berdasarkan data KBRI Amman, dalam rentang 2016-Februari 2020 tercatat Indonesia sudah menyalurkan bantuan sebesar USD 6,06 juta. Adapun sumber dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina mencakup 44,7% (USD 2,69 juta) berasal dari Pemerintah Indonesia dan 55,53% (USD 3,36 juta) berasal dari masyarakat Indonesia.¹³⁵ Jumlah tersebut yang disalurkan melalui UNRWA (39,90% atau USD 2,4 juta) dan JHCO¹³⁶ (60,10% atau USD 3,64 juta).¹³⁷

Dalam level pemberian bantuan yang diinisiasi pemerintah dapat terlihat dari ragam kerja sama yang dilakukan secara beragam juga diikuti oleh beragam institusi/kementerian/lembaga yang didominasi dalam bentuk kegiatan pembangunan kapasitas. Selain beberapa kerjasama yang disebutkan sebelumnya, adapun inisiatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penyelenggaraan Pelatihan Tindak Pidana Siber yang khusus ditujukan bagi Kepolisian Palestina pada tahun 2016.¹³⁸ Selain itu, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Luar Negeri RI menginisiasi dilakukannya *Training on Project Cycle (Planning, Appraisal, and Management of Infrastructure Projects) for the Official of Palestine* pada tahun 2011.¹³⁹

Solidaritas untuk Palestina yang diberikan oleh lembaga non-pemerintah dan filantropi di Indonesia dapat dikatakan sangat masif. Namun, masifnya bantuan yang diberikan tidak diimbangi dengan data yang pasti terkait dengan jumlah bantuan yang sudah diberikan dan lembaga non-

¹³⁵ Disampaikan oleh Mantan Pelaksana Tugas Palestina KBRI Amman Yordania merangkap Negara Palestina Niko Adam dalam Webinar “Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan pada 26 September 2020 oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bersama CDC el-Sharq.

¹³⁶ Jordan Hashemite Charity Organization for Relief and Development (JHCO) merupakan lembaga non-pemerintah bentukan Kerajaan Yordania yang bertugas memberikan dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan resmi kepada berbagai negara di dunia termasuk Palestina. Lembaga ini didirikan pada tahun 1990 atas inisiatif Pangeran Hassan bin Talal, Paman dari pemimpinan Kerajaan Yordanian Raja Abdullah. Data diakses dari <https://en.jhco.org.jo/SubDefault.aspx?PageId=186&MenuId=110>

¹³⁷ Jumlah bantuan internasional Indonesia bagi Palestina ini diyakini jauh lebih besar dari data yang dimiliki KBRI Amman karena bantuan kemanusiaan dari lembaga non-pemerintah Indonesia banyak diberikan langsung kepada masyarakat Palestina atau kerja sama dengan mitra lokal di Palestina atau mitra internasional yang umumnya berasal dari Turki. Hal ini disampaikan oleh Mantan Pelaksana Tugas Palestina KBRI Amman Yordania merangkap Negara Palestina Niko Adam dalam Webinar “Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan pada 26 September 2020 oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bersama CDC el-Sharq.

¹³⁸ Data diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Beri-Pelatihan-tentang-Cyber-Crime-dan-Digital-Forensic-bagi-Polisi-Palestina.aspx>

¹³⁹ Data diakses dari <https://www.pu.go.id/berita/view/6641/indonesia-berikan-pelatihan-project-cycle-untuk-palestina>

pemerintah (LSM, universitas, seniman, pemuka agama dan sebagainya) dan perorangan (filantropi).

Dari sebaran di berbagai platform media online, sejumlah lembaga non-pemerintah secara aktif memberikan perhatiannya bagi Palestina baik berupa donasi, kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan rumah sakit Indonesia, program pemberdayaan rakyat Palestina baik berbentuk kegiatan pengembangan kapasitas di Indonesia, Palestina, di wilayah pengungsian Palestina ataupun program stimulus pemberdayaan ekonomi, bantuan alat-alat kesehatan, pendidikan dan ragam kegiatan dan/atau bantuan lainnya.

Lembaga-lembaga non-pemerintah tersebut diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompot Dhuafa, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Daarut Tauhid (DT), Nusantara Palestina Center (NPC), Mer-C, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) dan sebagainya. Keberadaan organisasi-organisasi non pemerintah ini memberikan warna tersendiri dalam bantuan Indonesia terhadap Palestina. Selain itu, kemampuan dalam menghimpun dana publik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga dan bentuk solidaritas kuat yang ditunjukkan publik Indonesia dalam isu Palestina.

Solidaritas Palestina adalah bagian dari jati diri bangsa Palestina. Hal ini yang diwujudkan selama ini dalam pemberian bantuan Indonesia ke Palestina yang terus mengalir dengan beragam bentuknya. Hal ini memberikan dampak terhadap kebutuhan adanya kebijakan yang terarah terkait dengan kebutuhan Palestina di lapangan.¹⁴⁰

Selama ini, permasalahan klasik terkait dengan koordinasi antar-institusi menjadi tantangan dalam pengelolaan bantuan khususnya terhadap Palestina. Sinergi merupakan awal dari terbentuknya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Indonesia (LDKPI)¹⁴¹ atau *Indonesian Aid for International Development* (Indonesian AID) diharapkan menjadi jawaban atas masalah transformasi pengelolaan bantuan internasional.¹⁴²

Sinergi tanpa mengendurkan potensi juga penting dilakukan antar-berbagai institusi baik dalam level pemerintah (kementerian/lembaga) maupun terhadap lembaga non-pemerintah hingga level individu. Peran negara juga tidak kalah penting untuk mengakomodasi bagi pemberian

¹⁴⁰ Hal ini disampaikan oleh Prof Saul Takahashi (Osaka Jogakuin University) dalam Webinar “Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan pada 26 September 2020 oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bersama CDC el-Sharq.

¹⁴¹ LDKPI merupakan suatu Badan Layanan Usaha (BLU) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2019 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing / Lembaga Asing.

¹⁴² LDKPI merupakan peleburan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian PPN/BAPPENAS.

bantuan mutlak ditawarkan dan difasilitasi dalam ketersediaan peta kebutuhan pembangunan Palestina. Hal ini mengingatkan perhatian dan kuatnya solidaritas berbagai elemen dalam bangsa Indonesia dalam isu Palestina. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahwa Palestina ada di jantung diplomasi Indonesia.

Rekomendasi

1. Peta Kebutuhan dibutuhkan dalam memetakan kebutuhan bantuan bagi pembangunan Palestina. Hal ini diperlukan untuk terpenuhinya kebutuhan Palestina secara efektif dan efisien.
2. Ragamnya aktor yang berperan dalam pemberian bantuan bagi Palestina harus dibarengi dengan spirit sinergisitas dalam bantuan yang diberikan kepada Palestina.
3. Ragamnya aktor dalam memberikan bantuan kepada Palestina dan didorong dengan keberadaan Indonesian-AID seharusnya mendorong adanya peningkatan dalam besaran jumlah donasi dan kegiatan dalam mendukung Palestina.
4. Ragamnya aktor dalam memberikan bantuan kepada Palestina merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi terbentuknya kekokohan hubungan Palestina-Indonesia dari level pemerintah hingga level *people-to-people connection*.
5. Perlunya Pemerintah Indonesia menginisiasi bentuk kerjasama model CEAPAD di kawasan lainnya dalam upaya mendorong perhatian komunitas internasional dalam solidaritas Palestina.
6. Prinsip dasar dalam pemberian bantuan internasional diantaranya adalah solidaritas dan *non-conditionality*. Kedua prinsip ini yang seharusnya tetap dipegang teguh dalam pemberian bantuan terhadap Palestina. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengkampanyekan prinsip tersebut di komunitas internasional.

BAB III

Krisis Pangan, Listrik dan Air Palestina

Pendahuluan

Okupasi Israel telah memberikan dampak sistemik bagi keberlangsungan hidup warga Palestina. Pengangguran, kemiskinan, hingga ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada bantuan internasional menjadi penanda masalah kemanusiaan serius di wilayah itu. Dalam satu dekade terakhir saja kondisi infrastruktur di Jalur Gaza kian memprihatinkan. Kondisi ini membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2012 memprediksi Jalur Gaza tidak akan layak dihuni lagi oleh kurang lebih 2 juta penduduknya di tahun 2020.¹⁴³ Mengingat luasnya dampak multi-sektor dari okupasi tersebut, kajian ini bermaksud menganalisis sebagian dampak mendasar yang dialami warga Palestina selama puluhan tahun menjadi pesakitan Israel, yaitu: merosotnya ketersediaan pangan, pasokan listrik dan air yang berkualitas di Palestina.

Pilihan ini dilandasi alasan bahwa kehidupan sehari-hari warga Palestina sangat bergantung pada stabilnya sektor pangan, listrik dan air. Selain itu, keberlangsungan ketiga sektor ini sangat bergantung pada kondisi sosial politik negara lain, termasuk Israel. Dengan demikian, tanpa mengurangi urgensi sektor lain yang juga krusial, kajian ini hanya dibatasi pada pembahasan situasi sektor pangan, listrik dan air di Palestina.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi, peningkatan standar hidup dan pertumbuhan industri yang cepat telah menyebabkan permintaan energi yang luar biasa di wilayah Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Walau begitu, situasi energi di Palestina berbeda dengan situasi seperti di Mediterania Selatan dan Timur karena keterbatasan ketersediaan sumber energi primer, kendala finansial, dan situasi politik akibat okupasi di daerah tersebut. Selain itu, isolasi Gaza menghadirkan masalah teknis tantangan dalam mengangkut, menyimpan, mengimpor dan mengeksport energi, termasuk air dan pangan.

Krisis Listrik

Sebagai bagian dari wilayah pendudukan tanah Palestina, selama bertahun-tahun Israel telah memblokir dan mengontrol Jalur Gaza dengan ketat dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat diterima oleh akal,

¹⁴³ Wawancara dengan Dr. Basem Naim. Head of Council on International Relation-Palestine. 24 Oktober 2020.

kemanusiaan dan logika.¹⁴⁴ Israel juga telah membatasi bahkan menghentikan pasokan listrik untuk Gaza dan wilayah Tepi Barat menjadi hanya beberapa jam saja dalam sehari.¹⁴⁵ Untuk mengembalikan aliran listrik tersebut, otoritas Israel meminta bayaran perusahaan listrik sekitar 700 juta syekel (sekitar USD 200 juta) untuk menghentikan terputusnya aliran listrik di wilayah-wilayah yang ada. Israel juga menolak memberikan jaringan baru untuk perusahaan listrik walaupun pertumbuhan permintaan akan sektor ini sekitar 4% dalam setahun.¹⁴⁶ Situasi ini menambah keterpurukan Palestina karena terbatasnya listrik juga akan membatasi denyut kehidupan masyarakat secara umum.

Krisis listrik di Palestina setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:¹⁴⁷

1. Kegagalan dalam Memperluas Sumber Energi.

Sejak 1948 pembangunan infrastruktur di Gaza tidak maksimal. Baik Mesir, yang mengelola Jalur Gaza antara 1948 dan 1967, maupun Israel yang menempatnya pada tahun 1967, keduanya tidak menginvestasikan sejumlah besar dana untuk listrik di wilayah Gaza. Jika ada, investasi Israel di sektor infrastruktur Jalur Gaza negatif jumlahnya mengingat pemboman pembangkit listrik Gaza pada tahun 2006 dan 2014 dan penghancuran bandara Gaza pada tahun 2002. Hingga kini, warga Palestina mengandalkan Israel untuk hampir semua pasokan listrik mereka.¹⁴⁸

Antara tahun 2006 dan 2018 pasokan listrik tetap stagnan, sementara populasi meningkat 40% dan permintaan naik menjadi 450-500 MW.¹⁴⁹ Ini menandai dimulainya krisis listrik dengan meningkatnya permintaan yang ditekan, yang diperkirakan mencapai 250 MW. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan ini mengakibatkan penjatahan pasokan listrik menjadi 4-5 jam per hari dengan cara menggilir pasokan ke berbagai lingkungan. Ini berdampak negatif pada semua sektor ekonomi: sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat bekerja tak bisa beroperasi. Selain itu, kegiatan sehari-hari warga yang membutuhkan pasokan listrik seperti

¹⁴⁴ Paparan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun pada webinar “Krisis Pangan, Listrik dan Air Palestina” yang diselenggarakan Nusantara Palestina Center (NPC) dan Center for Dialogue and Civilizations (CDC) El Sharq pada 28 Oktober 2020.

¹⁴⁵ Data diakses dari <https://www.jpnn.com/news/dizalimi-israel-warga-gaza-hanya-bisa-nikmati-listrik-4-jam-setiap-hari> pada 30 Oktober 2020.

¹⁴⁶ Materi yang disampaikan Zuhair Al Shun (Duta Besar Palestina untuk Indonesia) pada webinar “Krisis Pangan, Listrik dan Air Palestina”..Bandingkan dengan <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40327125>.

¹⁴⁷ Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). *Gaza Electricity Reform & Restoration: Fast Track Approach to Economic Revival*. Abu Tor Economic Research Collaborative Konrad-Adenauer-Stiftung Palestinian Territories. Hal. 15-20.

¹⁴⁸ Data diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/09/23/py9syu366-israel-padamkan-listrik-di-sejumlah-wilayah-tepi-barat> pada 30 Oktober 2020.

¹⁴⁹ Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). *Gaza Electricity, ...* Hal. 15-20.

memompa air, mencuci pakaian, mandi, memasak, dan mencuci piring, sulit dilakukan.¹⁵⁰

2. Kegagalan untuk Memelihara dan Meningkatkan Kapasitas Jaringan Listrik Jalur Gaza.

Pada tahun 1995-1997, pemerintahan Otoritas Palestina (*Palestinian Authority / PA*) di Jalur Gaza melakukan program rehabilitasi untuk jaringan transmisi yang dipelopori otoritas energi guna meningkatkan distribusi listrik melalui jalur tegangan rendah dan menengah serta meningkatkan efisiensi distribusi.¹⁵¹ Bahkan sebelum pembatasan impor Israel terjadi, selama satu dekade pemerintahan di Gaza tidak menghasilkan pemeliharaan atau peningkatan yang memadai di jalur transmisi, gardu induk dan *feeder* untuk mendukung *Gaza Power Plant* (GPP) dalam mencapai kapasitas penuh keluaran.

3. Institusi Pemerintahan yang Rentan.

Sejak 2007, Hamas sebagai pemenang pemilu berkuasa menunjuk sebagian besar perwakilan kota Gaza.¹⁵² Sayangnya, Hamas hanya berfokus pada keseimbangan pemerintahan dibanding menutupi biaya dan memaksimalkan keuntungan di sektor listrik ini.¹⁵³ Di sisi lain, minimnya keuntungan yang diperoleh juga disebabkan pengepungan Israel dan penurunan tajam pendapatan rumah tangga. Selain itu, saat ketersediaan listrik menurun hingga 4 jam per hari,¹⁵⁴ pelanggan menjadi enggan membayar tagihannya. Pengalihan pendapatan ke pemerintah kota dan pihak lain dan ketidakmampuan untuk memprioritaskan pembelian bahan bakar untuk GPP telah mengakibatkan penurunan status keuangan GEDCO (*the Gaza Electricity Distribution Company*) –yang banyak didominasi representasi Hamas- dalam mengelola sektor listrik di Palestina.¹⁵⁵

Pada sektor listrik, Jalur Gaza tidak bisa memenuhi kebutuhan listrik sebesar 50% dan diperkirakan pada tahun 2030 kekurangan energi diperkirakan mencapai 63%. Kondisi kekurangan dan krisis listrik ini akan menyebabkan krisis multi-sektor yang mengancam kehidupan di Gaza baik masalah kesehatan dan pendidikan, bahkan berdampak pada berbagai sektor ekonomi dan sosial.¹⁵⁶

¹⁵⁰ Data diakses dari

<https://internasional.kompas.com/read/2017/04/20/10291891/kehabisan.bbm.pembangkit.listrik.di.gaza.berhenti.beroperasi?page=all> pada 30 Oktober 2020.

¹⁵¹ Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). *Gaza Electricity*, ... Hal. 15-20.

¹⁵² Data diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41679267> pada 30 Oktober 2020.

¹⁵³ Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). *Gaza Electricity*, ... Hal. 15-20.

¹⁵⁴ Data diakses dari <https://www.npc.or.id/kemenkes-palestina-umumkan-kondisi-darurat-akibat-krisis-listrik/> pada 30 Oktober 2020.

¹⁵⁵ Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). *Gaza Electricity*, ... Hal. 15-20.

¹⁵⁶ MAS, *Ma'had Abhats al-Siyasiyah al-Iqtishadiyah al-Filastiny, 2017, Tadaiyat al-Ijtimaiah wa al-Iqthishadiyah li al-Azma al-Kahruba' fi Gaza* hal. 5. Data diakses dari <https://www.mas.ps/files/server/20170810094345-2.pdf>

Akses terhadap Air yang Layak

Kurangnya akses terhadap air yang memadai, aman, dan bersih telah menjadi masalah berkepanjangan Penduduk di wilayah pendudukan palestina (*occupied Palestinian territory / oPt*). Meskipun beberapa tahun terakhir kian memburuk akibat kelangkaan air dan kekeringan, ketidaktersediaan air secara prinsipil lebih disebabkan kebijakan dan praktik air diskriminatif Israel atas masyarakat oPt. Ketimpangan akses air antara Israel dan Palestina juga sangat mencolok. Orang Palestina hanya mengonsumsi sekitar 70 liter sehari per orang - jauh di bawah 100 liter harian per kapita yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).¹⁵⁷

Hal tersebut kontras di sisi Israel. Konsumsi harian Israel berada pada 300 liter, sekitar empat kali lipat. Di beberapa pedesaan, masyarakat Palestina bertahan hidup dengan kurang dari rata-rata 70 liter, dan dalam beberapa kasus hampir 20 liter per hari, jumlah minimum yang direkomendasikan oleh WHO untuk sebuah situasi darurat.¹⁵⁸

Akses sumber daya air di oPt juga dikendalikan Israel dengan jumlah air yang dibatasi. Israel menggunakan lebih dari 80% air dari akuifer gunung, satu-satunya sumber air bawah tanah di wilayah oPt, serta semua air permukaan yang tersedia dari Sungai Yordan.¹⁵⁹ Kini, lebih dari 40 tahun setelah Israel menduduki Tepi Barat, sekitar 180.000 - 200.000 warga Palestina tinggal di komunitas pedesaan tanpa akses air. Bahkan di kota dan desa yang terhubung dengan jaringan air, keran sering mengering.¹⁶⁰ Secara khusus di Gaza, 70% penduduknya mengalami tingkat tinggi kekurangan air dan 95% penduduk Gaza juga terancam mengalami penyakit akibat kurangnya kualitas air.¹⁶¹

Akibatnya, banyak orang Palestina tidak punya pilihan selain membeli pasokan tambahan dari kapal tanker air bergerak yang mengirimkan air dengan harga yang jauh lebih tinggi dan kualitas yang sering kali meragukan.¹⁶² Di Jalur Gaza, satu-satunya sumber air, ujung selatan akuifer pesisir tidak cukup untuk kebutuhan penduduk tetapi Israel tidak mengizinkan transfer air dari Tepi Barat ke Jalur Gaza. Akuifer telah terkuras dan terkontaminasi oleh ekstraksi berlebihan oleh limbah dan infiltrasi air laut

¹⁵⁷ Amnesty International Publications (2009). *Troubled Waters – Palestinians Denied Fair Access To Water Israel-Occupied Palestinian Territories*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal. 3-10.

¹⁵⁸ *Ibid.* Hal. 3-10.

¹⁵⁹ EPRS paper on Water in the Israeli-Palestinian conflict. Data diakses dari [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573916/EPRS_BRI\(2016\)573916_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573916/EPRS_BRI(2016)573916_EN.pdf)

¹⁶⁰ Amnesty International Publications (2009). *Troubled Waters*,.. Hal. 3-10.

¹⁶¹ *Ajindah al-Siyasat al-Wathaniyah 2017-2022*, hal. 12. Data diakses dari <http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20Arabic.pdf>

¹⁶² Amnesty International Publications (2009). *Troubled Waters*,.. Hal. 3-10.

sehingga hanya 4% dari 180 m³ air yang telah diabstraksi memenuhi standar kualitas konsumsi air.¹⁶³

Ketersediaan Pangan

Kerawanan pangan di Palestina memengaruhi 22,5% populasi atau sekitar 1,3 juta orang. Kondisi ini didorong oleh akses ekonomi yang terbatas ke sektor pangan yang timbul dari pembatasan mobilitas, perdagangan dan investasi, serta tingkat pengangguran yang tinggi.¹⁶⁴ Data keamanan pangan yang dirilis September 2018 menunjukkan bahwa kerawanan pangan meningkat semakin parah dan memburuk di Jalur Gaza dari 59% pada 2014 menjadi 68,5% pada 2018.¹⁶⁵ Di Tepi Barat, pertumbuhan ekonomi yang lambat, pembatasan mobilitas, perdagangan, investasi, dan akses ke tanah dan sumber daya air, bersama dengan harga pangan yang lebih tinggi, terus mengikis mata pencaharian yang rapuh dari orang-orang Palestina yang miskin. Kemiskinan (13,9%) dan kerawanan pangan (12,7%), meski kurang meluas dibandingkan di Gaza, masih mengakar dan lebih terlokalisasi, terutama di wilayah Selatan. Bahkan Lebih dari 60% masyarakat Badui dan penggembala di area C Tepi Barat mengalami kekurangan pangan.¹⁶⁶

Sebelum pandemi COVID-19, hampir sepertiga populasi (32,7% atau 1,6 juta orang) rakyat Palestina tidak mampu membeli makanan bergizi.¹⁶⁷ Pola makan yang kurang terdiversifikasi juga menyebabkan masalah gizi yang tumpang tindih. Menurut survei nasional, hampir 50% dari mereka dinilai memiliki tingkat mineral dan vitamin esensial yang sangat rendah.

Kondisi kemanusiaan di Gaza –di mana kemiskinan dan kerawanan pangan masing-masing mempengaruhi 53% dan 68,5% dari populasi—mengkawatirkan. Kondisi tersebut diikuti dengan runtuhnya semua sektor produktif, layanan sosial dasar, dan infrastruktur. Pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 juga meningkatkan kerentanan rakyat Palestina. Bahkan, statistik resmi Otoritas Palestina menyebutkan sebanyak 47% keluarga Palestina yang tinggal di Jalur Gaza masih menghadapi kerawanan pangan.¹⁶⁸

Pada akhir 2017, diperkirakan 1,6 juta orang Palestina di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, atau 31,5% rumah tangga memiliki

¹⁶³ World Bank Group. (2018). *Securing Water for Development in West Bank and Gaza*. Water Global Practice Sector Note. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Hal. 2-4.

¹⁶⁴ Data diakses dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-country-brief-august-2018> pada 30 Oktober 2020

¹⁶⁵ Global Report on Food Crises (GRFC 2020). Global Networks Against Food Crisis. Hal. 153. Data diakses dari <http://www.fao.org/3/ca8786en/CA8786EN.pdf>.

¹⁶⁶ Data diakses dari <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-country-brief-august-2018> pada 30 Oktober 2020.

¹⁶⁷ Data diakses dari <https://www.wfp.org/countries/palestine> pada 30 Oktober 2020

¹⁶⁸ *Ajindah al-Siyasat al-Wathaniyah 2017-2022*, hal. 12. Data diakses dari <http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20Arabic.pdf>

kerentanan sektor pangan.¹⁶⁹ Hal ini diakibatkan oleh pengangguran yang tinggi, pendapatan rumah tangga yang rendah dan biaya hidup yang tinggi. Dua yang pertama adalah hasil dari konflik yang berlarut-larut, guncangan yang berulang-ulang dan pembatasan kebebasan bergerak yang terus berlanjut, kapasitas produksi yang terbatas dan kurangnya peluang ekonomi. Meskipun makanan tersedia, harganya tidak terjangkau bagi banyak orang. Banyak rumah tangga yang rawan pangan meski sudah mendapat makanan dan bantuan lainnya. Ketiga sektor ini, selain sektor-sektor lain yang tak kalah krusial, sangat memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat Palestina.

Dampak Okupasi Israel terhadap Krisis Air Palestina

Air adalah salah satu sektor terpenting yang sangat terdampak oleh tindakan dan penjajahan Israel. Kondisi ini diperparah dengan kondisi air yang ada sudah tercemar dan tidak layak minum.¹⁷⁰ Hal ini memaksa warga Palestina membeli 83 juta m³ atau sekitar 22% air dari perusahaan nasional air Israel (*Company-Mekorot*)¹⁷¹ dengan harga yang mahal.¹⁷² Krisis air yang melanda Palestina adalah bagian tak terpisahkan dari penjajahan, dominasi dan kebijakan politik Israel, hal ini dapat dilihat dari tiga aspek:

1. Israel menguasai sumber air

Sumber air Palestina mayoritas dikuasai Israel sebesar 85%.¹⁷³ Dominasi ini dimulai sejak Israel menjajah tanah Palestina tahun 1967 hingga saat ini. Beragam cara dilakukan Israel untuk menguasai sumber air Palestina termasuk dengan aturan yang dikeluarkan Israel yaitu aturan No. 291 tahun 1967. Aturan tersebut menjadikan Israel sebagai pemilik penuh semua sumber air Palestina bahwa “semua sumber air di Tanah Palestina telah menjadi milik negara (Israel)”.¹⁷⁴ Aturan lainnya yang termuat dalam aturan No. 58 tanggal 7 Juni 1967 bahwa Israel melarang warga Palestina membangun sumber air dan harus mendapatkan izin dari Israel yang pada banyak kasus lebih banyak menolak pengajuan pengadaan sumber air tanpa menyebutkan sebab. Aturan lainnya, Nomor 948 yang mengharuskan

¹⁶⁹ Data diakses dari

<https://www.ochaopt.org/theme/foodsecurity#:~:text=An%20estimated%201.6%20million%20Palestinians,a%20high%20cost%20of%20living.&text=Although%20food%20is%20available%2C%20it,out%20of%20reach%20for%20many> pada 30 Oktober 2020.

¹⁷⁰ *al-Miyah al-Filistiniyah .. Ma'satun yudiruha al-Ihtilal*, aljazeera.net, terakhir diakses 18/10/2020, <https://bit.ly/3kdb4YG>

¹⁷¹ PCBS, *Muashirat Ihshaiyah Bimunasabah Yaum al-Miyah al-Alamiy* 22 Maret 2019, <https://bit.ly/3842Xu7>

¹⁷² Palestinian Water Authority, *Taqrir Sulthah al-Miyah 2015-2017, Injazat Ragmah al-Tahtid*, <http://www.pwa.ps/userfiles/server/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2.pdf>

¹⁷³ Zuhair al-Shun, op.cit.

¹⁷⁴ Wafa.ps, *Atsar al-istithan al-Israiliy ala al-Miyah fi Falastin*, terakhir diakses 16 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4077

warga Gaza untuk mendapatkan izin dari pengadilan militer jika ingin melaksanakan proyek terkait sumber daya air.¹⁷⁵ Walaupun diizinkan maka penggaliannya tidak melebihi 140 meter.¹⁷⁶

2. Pembatasan pemakaian air bagi warga Palestina
Selain mengatur sumber air dan perizinan pengadaan sumber air baru, Israel juga membatasi pemakaian air bagi warga Palestina. Sebelum tahun 1948, persentase jatah air setiap orang Palestina untuk tujuan kebutuhan rumah dan pertanian sama dengan jatah orang Yahudi, namun situasi mulai berubah setelah aturan *Armistice line* tahun 1949, di mana Israel mulai menerapkan larangan pengembangan sumur dan sumber air Palestina, Israel juga memanfaatkan sumber air Palestina untuk kepentingan Israel, maka pemakaian air orang Israel pun jauh lebih besar daripada orang Palestina.¹⁷⁷ Statistik penggunaan air Palestina menyebutkan dalam sehari setiap warga Palestina hanya menghabiskan 72 liter.¹⁷⁸
3. Pencemaran air
Selain defisit air, wilayah Palestina juga sangat rentan terhadap pencemaran, terutama di Jalur Gaza yang memiliki tingkat pencemaran air sangat tinggi. Persentase klorida antara 250 mm hingga 2000 mm/liter di lebih 90% air Jalur Gaza sedangkan persentase yang dibolehkan secara internasional adalah 250 mm per liter.¹⁷⁹ Meskipun 91% penduduk Gaza tersambung dengan jalur air umum melalui pipa¹⁸⁰ namun 90-95% air yang ada di Gaza tidak layak minum karena sudah tercemar dengan air pembuangan dan air laut atau disebabkan oleh pencemaran lainnya.¹⁸¹ Menurut laporan UN-OCHA, persentase air mengalir yang layak diminum di Gaza hanya 3%.¹⁸² Sementara laporan UN-ESCWA, menyebut air layak minum yang dipompa dari sumur bawah tanah persentasenya tidak lebih dari 10%.¹⁸³

¹⁷⁵ Wafa.ps *ibid*

¹⁷⁶ Palestinian News and Info Agency, Wafa, *al-Akhtar al-Lati Tuwajihu Qitha al-Miyah*, terakhir diakses 2 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2231

¹⁷⁷ *Markaz al-Zaitunyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, al-Tsarwah al-Maiyah fi Dhiffa al-Garbiyah wa Qitha Gazza, Baina al-Hajah al-Filasthinyah wa al-Intihakat al-Israiliyah*, Beirut 2008, Hal. 24

¹⁷⁸ Palestinian News and Info Agency, Wafa, *Waqi Qitha al-Miyah fi Falasthin*, terakhir diakses 2 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9252

¹⁷⁹ *Atsar al-Musta'marat al-Israiliyah ala al-Biah al-Filistiniyah*, Markaz al-Ma'lumat al-Wathani al-Filastiny – Wafa. Data diakses dari https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4073 pada 18 Oktober 2020

¹⁸⁰ *Al-Lajnah al-Iqtishadiyah wa al-Ijtima'iyah li Garbie Asia (ESCWA) United Nations, Taqir al-Miyah wa al-Tanmiyah al-Tsamin, Ahdaf al-Tanmiyah al-Mustadamah al-Mutaaliqah bi al-Miyah fi al-Manthiqah al-Arabiyyah*, 2020, hal. 34.

¹⁸¹ *Munazzamah al-Shihah al-Alamiyah (WHO), Taqir an Taqyim Maidani li al-Ahwal al-Shihiyah fi al-Ardh al-Filistiniyah al-Muhtallah*, 2016, hal. 9.

¹⁸² UN-OCHA, *al-Ardh al-Filasthinyah al-Muhtallah Arqam wa Haqaiq Insaniyah*, hal. 5.

¹⁸³ UN-ESCWA 2019, *Taqyim Ta'tsir al-Taqyiraat fi al-Miyah al-Mutahah ala Intajiyah al-Mahashil al-Ziraiyyah fi al-Mantiqah al-Arabiyyah, Taqir Dirasah al-Halah fi Falasthin*. Data

Pencemaran ini menurut Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun dilakukan oleh otoritas penjajah Israel yang mengirim limbahnya ke wilayah dan ladang-ladang Palestina. Menurutnya, tingkat pencemaran ini bahkan sampai pada tingkat dapat mematikan orang yang mengonsumsi air tercemar tersebut.¹⁸⁴

Data Al Zaitouna Center menyebut pencemaran ini disebabkan oleh pabrik-pabrik penghasil kimia Israel, seperti pabrik aluminium, kulit, baterai, plastik dan semen yang dibangun di dekat wilayah yang dihuni warga Palestina, air yang tercemar ini kemudian mengalir ke tanah-tanah pertanian atau perkampungan Palestina sekitar pabrik.¹⁸⁵

Dampak Okupasi Israel terhadap Krisis Pangan Palestina

Tantangan pangan Palestina berkelindan dengan perkembangan sektor pertanian. Tantangan yang dihadapi Palestina dapat dikatakan sifatnya multi-dimensi mulai dari pembatasan akses ke tanah, air dan pasar, hilangnya tanah ladang warga Palestina untuk kepentingan pemukiman Israel, adanya tembok pembatas, serta penghancuran instalasi dan infrastruktur dan pencabutan pohon-pohon. Kondisi ini diperparah dengan adanya pembatasan yang diberlakukan pada impor barang-barang penting dan kebutuhan pertanian, kurangnya pinjaman yang dialokasikan untuk produksi pertanian, dan pasar-pasar Palestina yang dibanjiri dengan produk-produk impor dari Israel. Selain itu, sektor ini juga menghadapi masalah dengan adanya pembangunan pemukiman Israel dan kerusakan lingkungan.¹⁸⁶

Pertanian merupakan sektor terpenting yang membangun sektor pangan Palestina. Pada tahun 1950-an, luas ladang pertanian Palestina sekitar 2 juta 435 ribu dunum¹⁸⁷ atau sekitar 40% dari luas Tepi Barat sedangkan pada tahun 1960 luas ladang pertanian di Jalur Gaza mencapai 170 ribu dunum. Pada tahun 1997-1998, luas ladang pertanian di Tepi Barat dan Jalur Gaza tersisa 1 Juta 861 ribu dunum.¹⁸⁸ Total luas tanah yang

diakses dari <https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/national-assessment-report-palestine-arabic.pdf>

¹⁸⁴ Zuhair al-Shun, op.cit.

¹⁸⁵ Al-Zaytouna Center, *Mu'anat al-Biah wa al-Fallah al-Filasthiny tahta al-Ihtilal al-Israilli*, 2013, hal. 80-90, http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/AmlNotaHuman-12-Pal_Environment_Farmer.pdf

¹⁸⁶ UNCTAD, *Qitha al-Ziraah al-Filastiniyah al-Muhashir*, 2015, hal. 13-27, https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2015d1_ar.pdf

¹⁸⁷ Dunum adalah unit pengukuran tanah era Ottoman, satu dunum setara dengan 1.000 meter persegi.

¹⁸⁸ *Muanaat al-Biah wa al-Fallah al-Filasthiny Tahta al-Ihtilal al-Israilli*, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyrat, 2013, hal. 49.

dikuasai pemukim Israel di wilayah yang terletak antara lembah Yordan yang ditutup untuk orang Palestina mencapai 170.000 dunum.¹⁸⁹

Badan Pusat Statistik Palestina menyebutkan bahwa Israel telah merampas sekitar 40% tanah warga Palestina di Tepi Barat, termasuk di dalamnya adalah Jerusalem Timur dengan beragam cara.¹⁹⁰ Di sisi lain sejak tahun 1968 aktivitas dan ladang pertanian Israel semakin meningkat dan bertambah luas khususnya di wilayah pendudukan Tepi Barat di dua lokasi yaitu perbukitan Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Otoritas Palestina terkait masalah lahan juga masih terikat dengan Perjanjian Oslo tentang pembagian wilayah Palestina. Israel mengontrol penuh area C Tepi Barat yang memiliki luas 62% Tepi Barat.¹⁹¹ Area C adalah wilayah yang paling cocok dan paling subur untuk pertanian, dan pada wilayah ini Israel mengalokasikan 39% untuk pemukiman, 20% untuk zona militer yang tertutup, dan 13% untuk cagar alam. Berdasarkan hal ini, maka Israel melarang semua bentuk pembangunan bagi warga Palestina di 70% area C dan hanya menyisakan wilayah yang sempit untuk aktivitas perkotaan Palestina yaitu 1%.¹⁹² Sementara pada kasus pertanian Gaza, walaupun Israel telah meninggalkan Jalur Gaza sejak 2005, namun hingga saat ini, Israel masih melarang warga Palestina di Jalur Gaza untuk sampai ke ladang pertanian mereka. Wilayah ini dikenal dengan wilayah zona penyangga (*buffer zone*) yang membentang dari Timur Jalur Gaza hingga Israel, wilayah pertanian yang tidak bisa digarap oleh warga Gaza ini luasnya mencapai 40% lahan pertanian di Jalur Gaza.¹⁹³

Sejumlah dalih digunakan Israel untuk melegalkan tindakan menyita tanah Palestina. Mulai dari dalih tanah milik negara (*state lands*), dalih untuk tujuan militer, dalih ketiadaan pemilik lahan (*absentee land*), dalih kepentingan umum (*confiscation for public needs*), hingga dalih pendaftaran (*initial registration*)¹⁹⁴. Tidak kurang dari 1.871 km² tanah Palestina telah disita Israel sejak 1967 hingga saat ini¹⁹⁵.

Dampak Okupasi Israel terhadap listrik Palestina

¹⁸⁹ Ibid.

¹⁹⁰ PCBS, *Press release On the Eve of the 41st Anniversary of Land Day March 30th, 2017*, 29 March 2017, http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2017-LD-en.pdf

¹⁹¹ FAO, *al-Istratijiah al-Wathaniyah Lisalamah al-Aqziyah 2017-2022*, Hal. 11. <http://www.fao.org/3/i8861ar/l8861AR.pdf>

¹⁹² UNCTAD, 2015, *op.cit*

¹⁹³ ESCWA 2019, *op.cit*

¹⁹⁴ Peacenow.org, *Methods of Confiscation – How does Israel justify and legalize confiscation of lands?*, 1 Januari 2009, <https://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands>

¹⁹⁵ UN-ESCWA, *al-Lajnah al-Iqthishadiya al-Ijtima'iyah Ligarbi Asia, Da'm al-Sya'b al-Filasthiny: Tadaiyat al-Ihtilal al-Israiliy wa Mumarasatihi*, 2018, hal. 5-7, https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lshb_lflstyny_tdy_t_lhtll_Isryly_wmmrsth.pdf

Sektor listrik Palestina juga terdampak akibat penjajahan Israel sebagaimana sektor-sektor ekonomi lainnya. Masalah ini tercermin pada kontrol penuh Israel pada sektor energi dan ditambah masalah lainnya seperti adanya kategorisasi wilayah Palestina menjadi beberapa kategori yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya untuk menghasilkan energi bahkan hingga sekedar untuk membangun listrik pembantu, wilayah ini disebut dengan area C.

Israel juga melarang untuk meletakkan panel surya sebagai energi alternatif di wilayah ini.¹⁹⁶ Manajer Regulasi Palestine Energy Authority Karmel Manaa bahwa tembok pemisah yang dibangun Israel yang memisahkan satu wilayah Palestina dengan wilayah lainnya juga menjadi salah satu rintangan sektor listrik Palestina dimana Israel juga melarang adanya jaringan listrik yang menghubungkan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurutnya, Palestina telah memiliki rencana strategis untuk membangun ketahanan energi mereka. Namun, rencana ini terhambat karena perbatasan darat yang dikuasai Israel. Pihak Israel juga mencegah rencana ini bisa dilaksanakan. Masalah lainnya terkait teknis, misalnya perizinan Israel yang enggan memberikan izin kepada Palestina untuk membangun pusat pembangkit listrik. Manaa menambahkan bahwa waktu untuk mendapatkan izin Israel yang berlapis-lapis ini bisa berlangsung antara 5 hingga 7 tahun untuk setiap proyek pembangunan pembangkit listrik.¹⁹⁷ Faktor lainnya dari krisis listrik Gaza adalah keterbatasan sumber daya pendanaan dan tidak mampu mengembangkan sektor listrik sebagai akibat blokade Israel terhadap Gaza.¹⁹⁸

Listrik sebagai sektor strategis dan menjadi urat nadi kehidupan warga Gaza yang terisolasi kerap menjadi sasaran dan alat tekan Israel kepada faksi-faksi bersenjata di Gaza, lebih-lebih ketika terjadi tensi ketegangan. Bulan Agustus 2020, pembangkit listrik Gaza berhenti beroperasi akibat kehabisan bahan bakar setelah Israel memutuskan menghentikan masuknya bahan bakar ke Gaza melalui pintu perbatasan Karam Abu-Salem.¹⁹⁹ Sebelumnya pada perang tahun 2014, Israel menyerang dan menghancurkan gudang penyimpanan bahan bakar, dan tidak dapat diperbaiki karena sulitnya memasukkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan, jalur energi juga kerap menghadapi penghancuran beberapa kali.²⁰⁰

¹⁹⁶ *Ma'had Abhats al-Siyasat al-Iqtishadiyah al-Filastiny (MAS), Ab'ad Muadhalah Qitha al-Kahruba fi Falasthin Baina al-Qitha al-Aam wa al-Qitha al-Khash: Halah Syirkah Kahruba al-Quds*, 2019, hal. 1.

¹⁹⁷ Karmel Manaa, op.cit

¹⁹⁸ MAS, *Ma'had Abhats al-Siyasiah al-Iqtishadiyah al-Filastiny, 2017, Tadaiyat al-Ijtimaiah wa al-Iqthishadiyah li al-Azma al-Kahruba' fi Gaza* hal. 5.
<https://www.mas.ps/files/server/20170810094345-2.pdf>

¹⁹⁹ Anadolu Agency, *Mahathah Taulid al-Kahruba' fi Gazza Tatawaqqafu an al-Amal*, 18 Agustus 2020, <https://bit.ly/2HKrFVc>

²⁰⁰ MAS, op.cit. hal. 6.

Krisis listrik mulai terjadi di Gaza pasca serangan yang dilakukan Israel ke pembangkit Listrik satu-satunya di Gaza pada tahun 2006.²⁰¹ Serangan Israel ini mengakibatkan 6 pengantar listrik Gaza hancur total dan butuh 5 bulan perbaikan agar bisa kembali beroperasi sebagian.²⁰² Terputusnya listrik dalam waktu lama sangat berdampak bagi warga Gaza juga berdampak di berbagai sektor, seperti kesehatan lebih khusus rumah sakit, sekolah-sekolah, universitas dan sektor-sektor penting lainnya.

Bantuan Internasional dalam Krisis Pangan Palestina

Organisasi Pangan dan Pertanian dunia (FAO) pada tahun 2020 membutuhkan USD 13,6 juta guna membantu 47.900 orang di Tepi Barat dan Jalur Gaza. FAO bekerja sama dengan mitra di sektor ketahanan pangan untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga yang paling rentan, membantu mengurangi erosi mata pencaharian, dan mempromosikan pertanian inovatif dan penggunaan lahan dan sumber daya air yang berkelanjutan.²⁰³

Tidak hanya FAO, Program Pangan Dunia (WFP), yang telah ada di Palestina sejak 1991, memberikan bantuan makanan kepada populasi non-pengungsi yang paling rentan. WFP memfokuskan aktivitasnya di wilayah dengan prevalensi tinggi rawan pangan, termasuk Jalur Gaza dan wilayah selatan Tepi Barat.²⁰⁴ WFP memberikan bantuan pangan tanpa syarat kepada populasi non-pengungsi yang paling miskin dan paling rawan pangan di Jalur Gaza dan Tepi Barat -terutama dalam bentuk voucher elektronik yang dapat digunakan untuk membeli makanan.²⁰⁵ Menurut dr. Basem Naim, Kepala Dewan Hubungan Internasional, WFP mendata warga miskin dengan berbagai kriteria, seperti tingkat kemiskinan dan jumlah anggota keluarga.²⁰⁶

²⁰¹ UN-OCHA, *Ta'tsir Azmah al-Kahruba' wa al-Waqud fi Gaza ala al-Audha' al-Insaniyah*, 2015, hal. 1

²⁰² MAS, *Ma'had Abhats al-Siyasiyah al-Iqtishadiyah al-Filastiny, 2017, Tadaiyat al-Ijtimaiah wa al-Iqtishadiyah li al-Azma al-Kahruba' fi Gaza* hal. 5.

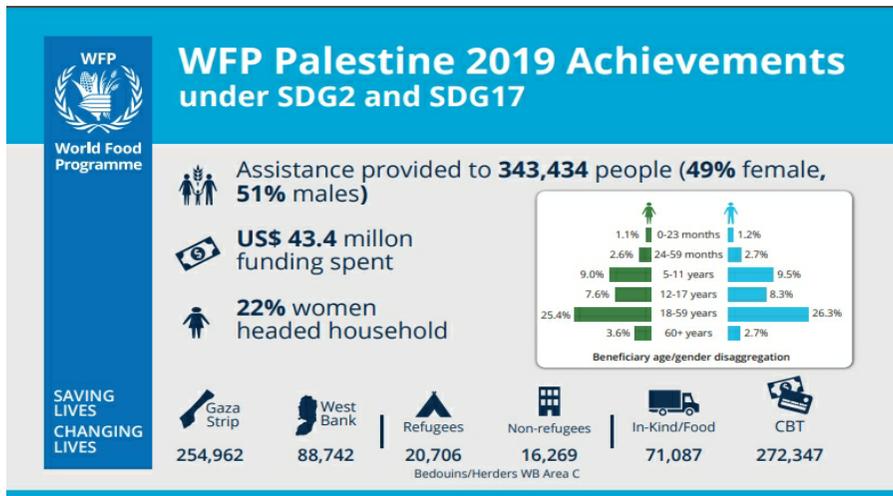
<https://www.mas.ps/files/server/20170810094345-2.pdf>

²⁰³ Palestine Humanitarian Response Plan 2019. <https://www.un.org/unispal/document/fao-palestine-humanitarian-response-plan/>

²⁰⁴ World Food Programme is doing in Palestine. <https://www.wfp.org/countries/palestine>

²⁰⁵ Voucher assistance in Palestine: More Than Just Food for food insecure Palestinians. https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/voucher-assistance-palestine-more-just-food-food-insecure-palestinians_en

²⁰⁶ Basem Naim, op.cit.



Capaian Program WFP tahun 2019

Sumber: <https://www.wfp.org/publications/wfp-palestine-2019-achievements>

Selain itu, UNRWA juga berperan besar dalam bantuan pangan ke Palestina. Negara-negara donor menyumbang melalui UNRWA, sebagai partner resmi. UNRWA menyediakan layanan bantuan bagi sekitar 5,6 juta pengungsi Palestina yang terdaftar di lima wilayah operasinya, termasuk Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Layanan mereka meliputi pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, infrastruktur dan peningkatan kamp, perlindungan dan keuangan mikro.

Bantuan Internasional dalam Krisis Air Palestina

Ada sekitar 15 lembaga donor bilateral dan multilateral yang memberikan bantuan pengadaan air bersih untuk Palestina, di antaranya negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Swedia.²⁰⁷ Bank Investasi Eropa (EIB) menyediakan dana pinjaman untuk perbaikan waduk air dan mendanai pembangunan pabrik pengolahan air limbah di Gaza. EIB membiayai lebih dari 137 juta Euro di Tepi Barat dan Gaza antara tahun 1995 dan 2010. Sebesar 10% dari dana tersebut dialokasikan untuk sektor air bersih dan lingkungan.²⁰⁸ Selain itu, Amerika Serikat melalui USAID menyediakan lebih dari 60 km pipa air untuk memasok sepuluh desa tambahan di wilayah selatan Nablus dengan air minum. Pada tahun 2009, USAID telah meningkatkan pasokan air untuk lebih dari 19.500 rumah tangga sementara sekitar 30.000 rumah tangga memperoleh sanitasi yang lebih baik dan sambungan ke jaringan pembuangan limbah.²⁰⁹

²⁰⁷ FEMIP Financing operations in Gaza / West Bank.

<https://www.eib.org/en/publications/financing-provided-by-the-eib-in-gaza-and-west-bank>

²⁰⁸ ibid

²⁰⁹ Infrastructure Needs Program (INP).

<https://www.usaid.gov/wbg/misc/WRI/INP%20fact%20sheet.pdf>

Pada tahun 2005 hingga 2010, Bank Dunia menyediakan anggaran USD 20 juta. Salah satu tujuan proyek ini adalah untuk mengembangkan struktur kelembagaan yang berkelanjutan di sektor air dan sanitasi. Tujuan dari proyek ini adalah peningkatan layanan air dan sanitasi melalui rehabilitasi, peningkatan dan perluasan fasilitas yang ada.²¹⁰

Dampak pembatasan Israel dan penundaan atau bahkan penolakan dalam mendapatkan izin, telah didokumentasikan secara luas oleh LSM lokal dan internasional dan badan-badan PBB. Pendonor internasional sebagian besar telah menanggung biaya proyek air darurat di wilayah Palestina yang diduduki (oPt), memperbaiki infrastruktur air yang rusak atau hancur dalam serangan militer Israel atau memberikan layanan air dan sanitasi darurat kepada warga Palestina yang rumah dan propertinya hancur atau yang tidak memiliki akses ke pasokan air yang memadai. Namun, para donor internasional umumnya enggan mempublikasikan masalah yang mereka hadapi dalam melaksanakan proyek-proyek khusus yang berhubungan dengan air dan lainnya karena khawatir hal ini akan membuat pemerintah Israel memberlakukan lebih banyak hambatan.²¹¹

Bantuan Internasional dalam Krisis Listrik Palestina

Pada Oktober 2018 pemerintah Qatar menyediakan dana sebesar USD 60 juta untuk mengatasi krisis listrik di Gaza. Bantuan ini mampu memasok listrik selama 14-16 jam setiap harinya. Mei 2019, Pemerintah Qatar memberikan dana tambahan sebanyak USD 180 juta untuk bantuan kemanusiaan program-program PBB di Palestina dan layanan listrik.²¹²



Ketersediaan listrik per bulan (rata-rata jam per hari) 2018-2019

Sumber: https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019.pdf

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumbangan bahan bakar dan guna membangun ketahanan sektor kesehatan, Organisasi

²¹⁰ West Bank and Gaza Water and Sanitation – World Bank project.

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-202913/>

²¹¹ Troubled Waters – Palestinians Denied Fair Access To Water. Israel-Occupied Palestinian Territories.

<https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150272009en.pdf>

²¹² HH the Amir Directs Allocation of 480 Million USD in Support of Palestinian People.

<https://www.mofa.gov.qa/en/statements/hh-the-amir-directs-allocation-of-480-million-usd-in-support-of-palestinian-people>

Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan mitra Klaster Kesehatan lainnya telah bekerja untuk menyediakan sumber energi alternatif.

Pada 17 Juni 2019, pemerintah Jepang melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra pelaksana mendanai pembangkit listrik tenaga surya baru di rumah sakit Nasser. Pembangkit listrik tenaga surya 250 KWp menyediakan 420 MWh energi setiap tahun dan dapat menghemat sekitar 166.000 liter bahan bakar.²¹³

Sedangkan di tahun 2020, Bank Dunia telah menyetujui hibah sebesar USD 14 juta sebagai bagian dari program multifase untuk mengembangkan sektor energi di Palestina. Dan dana sebesar USD 49 juta lebih lanjut akan disumbangkan oleh negara-negara donor.²¹⁴

Situasi politik yang tidak stabil turut menjadi faktor krisis listrik di Gaza. Pada April 2017, situasi memburuk karena perselisihan antara otoritas de facto di Gaza dan Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Tepi Barat. Ditambah dengan terhentinya pasokan listrik dari Mesir karena gangguan fungsi dan ketidakmampuan untuk memperbaiki jalur feeder, hal ini memicu pemadaman listrik selama 20-22 jam sehari. Selama periode ini, PBB melakukan pengiriman bahan bakar darurat yang didanai oleh donor.

Peran Indonesia dalam Krisis Air, Listrik dan Pangan Palestina

Krisis air, listrik dan pangan yang terjadi di Palestina menjadi masalah krusial dalam menjamin kehidupan bagi jutaan warga Palestina baik yang tinggal di wilayah Tepi Barat maupun Jalur Gaza. Sangat jelas bahwa krisis yang terjadi ini membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah Palestina dengan dukungan yang hadir dari komunitas internasional tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, dalam bagian ini membahas mengenai peran Indonesia dalam menangani krisis air, listrik dan pangan yang terjadi di Palestina.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan berbagai lembaga kemanusiaan serta individu dan kelompok sosial kemasyarakatan lainnya telah secara aktif memberikan perhatian terhadap upaya penanganan krisis air, listrik dan pangan di Palestina. Perhatian tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas mulai dari advokasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap kondisi Palestina, penggalangan dana, hingga ragam bantuan nyata yang dilakukan untuk meringankan beban rakyat Palestina dalam menghadapi berbagai krisis tersebut.

Dalam konteks politik maupun non-politik, posisi pemerintah Indonesia dalam isu Palestina sudah jelas. Komitmen ini yang harus ditopang

²¹³ Report to the Ad Hoc Liaison Committee Brussels, 30 April 2019.

https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019.pdf

²¹⁴ World Bank to fund development of Palestine energy sector.

<https://www.middleeastmonitor.com/20200428-world-bank-to-fund-development-of-palestine-energy-sector/>

oleh berbagai kebijakan-kebijakan menuju hilir kemerdekaan dan kemandirian Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Kemerdekaan dan kemandirian tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap Palestina.

Secara umum, bantuan kemanusiaan Indonesia terhadap Palestina dilakukan melalui 3 + 1 skema kerja sama yaitu (1) melalui kerja sama dengan organisasi internasional, (2) kerja sama triangular dan (3) kerja sama bilateral dengan Palestina.²¹⁵ Namun, dari berbagai skema tersebut belum ditemukan laporan yang secara detail mem-*breakdown* besar bantuan dalam penanganan krisis air, listrik dan pangan Palestina.

Dari skema kerja sama yang dilakukan Indonesia terhadap Palestina selain bantuan diberikan dalam bentuk uang, bantuan juga diberikan dalam bentuk penyelenggaraan program peningkatan kapasitas (*capacity building*). Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Indonesia yang merupakan prakarsa Kementerian Pertanian RI dengan JICA (Japan International Coordination Agency) bertajuk "*Sustainable Fish Farming through the Adoption of Artificial Insemination Technology*" di tahun 2019 menjadi salah satu kegiatan dalam merespon krisis pangan yang terjadi di Palestina.²¹⁶

Inisiasi pemerintah Indonesia dalam merespons ancaman krisis air, pangan dan listrik Palestina juga menjadi bagian dari 178 program/modul pelatihan bagi Palestina sejak 2008 hingga pertengahan 2020. Hal ini terlihat bahwa diantara 178 program/modul pelatihan tersebut juga mencakup program di bidang energi, pertanian, industri, pendidikan, dan usaha kecil menengah.²¹⁷

Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2016 mengadakan pelatihan dan belajar teknik hidroponik yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Jawa Barat. Model kerja sama BBPP Lembang dengan pihak Palestina ini telah diinisiasi sebelumnya di tahun 2013.²¹⁸

Komitmen Indonesia dalam menangani krisis air di Palestina juga tercermin dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi di tahun 2018 bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama desalinasi air laut.²¹⁹ Realisasi dari komitmen tersebut yang terlihat dari

²¹⁵ Data lebih lanjut dapat dilihat dalam Seri Kertas Kebijakan Sosial Ekonomi Palestina edisi September 2020 yang diterbitkan CDC El Sharq dengan Nusantara Palestina Center.

²¹⁶ Asra Virgianita et al., *Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia yang Lebih Baik*. (Jakarta: PT Pentas Grafika, 2019): 60.

²¹⁷ Paparan Mantan Pelaksana Tugas Palestina KBRI Amman Yordania merangkap Negara Palestina Niko Adam dalam Webinar "Bantuan Internasional untuk Palestina" yang diselenggarakan oleh Nusantara Palestina Center (NPC) bersama CDC el-Sharq pada 26 September 2020.

²¹⁸ Data diakses dari

https://jabarprov.go.id/index.php/news/16269/Palestina_Belajar_Pertanian_di_Bandung pada 1 November 2020

²¹⁹ Data diakses dari <https://www.suara.com/news/2018/01/09/152059/indonesia-bantu-palestina-ubah-air-laut-jadi-layak-minum> pada 1 November 2020

pernyataan Menlu Retno dalam webinar internasional yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2020:

“Dalam beberapa tahun mendatang dukungan terhadap Palestina telah diwujudkan antara lain melalui pembangunan perluasan fasilitas Rumah Sakit Indonesia oleh MER-C, penyediaan beasiswa, penyediaan obat-obatan dan fasilitas air bersih oleh komite nasional untuk rakyat Palestina, serta bantuan bagi pengungsi oleh para filantropis Indonesia, dan pembangunan instalasi desalinasi air oleh masyarakat Indonesia.”²²⁰

Dari pernyataan Menlu Retno menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia tidak berdiri sendiri. Pemerintah Indonesia tetap dan terus membutuhkan kerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam isu Palestina. Di sinilah menunjukkan peranan aktor lain dalam penanganan krisis air, listrik dan pangan Palestina yaitu lembaga kemanusiaan asal Indonesia.

Berbagai lembaga kemanusiaan telah secara aktif menjadi jembatan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Palestina. Dalam kertas kebijakan ini, beberapa LSM Indonesia yang secara aktif telah memberikan kontribusi bagi Palestina dalam menghadapi krisis air, listrik dan pangan di antaranya adalah Nusantara Palestina Center (NPC), dan Aksi Cepat Tanggap (ACT).²²¹ Secara umum, aktivitas pemberian bantuan yang telah dilakukan yaitu:

1. Nusantara Palestina Center (NPC)

Pada 2020, Wilayah Al Mughraqa, Kota Gaza, Deir Al Balah, dan Khan Yunis menjadi beberapa wilayah distribusi 500.000 liter air purifikasi oleh NPC.²²² Dalam meringankan beban rakyat Palestina dalam krisis air, NPC juga bekerja sama dengan Wakil Ketua DMI Komjen Pol (Pur) H Syafruddin yang memberikan bantuan sebesar 1 juta liter air bersih untuk warga Gaza di masa pandemi ini.²²³

Dalam membantu rakyat Palestina menghadapi krisis pangan, NPC turut berkontribusi dengan pengadaan dapur umum “Amanah Indonesia”. Program ini fokus kepada pemberian makanan gratis kepada ratusan pasien di RS As Syifa, Jalur Gaza sejak akhir Januari 2019. Program ini juga mampu menyediakan 3.300 porsi makanan.

²²⁰ Data diakses dari <https://m.tribunnews.com/internasional/2020/07/16/tidak-hanya-dukungan-politik-ini-yang-sudah-dilakukan-indonesia-untuk-bela-palestina?page=all> pada 1 November 2020

²²¹ Tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah lembaga kemanusiaan Indonesia yang memberikan bantuan kepada Palestina dalam menangani krisis air, listrik dan pangan Palestina jumlahnya lebih besar dari kedua lembaga kemanusiaan ini. Pilihan ini berdasarkan intensitas pemberitaan yang tersaji secara terbuka melalui mesin pencarian Google.

²²² Data diakses dari <https://www.npc.or.id/krisis-air-makin-mengancam-npc-distribusikan-500-000-liter-air-di-gaza/> pada 30 Oktober 2020

²²³ Data diakses dari <https://bekasi.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-12748370/palestina-alami-krisis-air-bersih-indonesia-salurkan-1-juta-liter-air-bersih-ke-gaza> pada 30 Oktober 2020

Selain itu, program “Pasar Sembako Indonesia Gratis di Palestina” digagas lembaga ini. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Yayasan Cinta Dakwah Foundation berupa penyediaan bahan kebutuhan makan sehari-hari berupa beras, minyak goreng, gula, garam, kurma, makaroni dengan total 16 komoditas. Kegiatan ini juga dibantu NGO lokal di Jalur Gaza. Setidaknya program ini membantu 315 kepala keluarga (KK) untuk sepekan di berbagai wilayah seperti Beit Lahiya Gaza Utara, Jabalia City, Kamp Jabalia, Kota Gaza dan wilayah Tufah.²²⁴

Kemudian, program Sedekah Gandum, Nasi Jumat Berkah, Wakaf Kurma, Traktir Makan Yatim Palestina dan sebagainya juga menjadi program NPC dalam membantu rakyat Palestina hadapi krisis pangan.



Program Sedekah Gandum untuk Rakyat Palestina

Sumber: <https://www.npc.or.id/donasi/sedekah-gandum-untuk-palestina/>

2. Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Kontribusi ACT dalam menangani krisis air Palestina dimulai pada tahun 2015 dengan pasokan bantuan air bersih melalui program *Mobile Water Tank*. Dari program tersebut, berdasarkan data *Global Humanity Response* (GHR)-ACT tahun 2018 menunjukkan bahwa 1.008.800 rakyat Palestina telah merasakan manfaat program tersebut dengan adanya pasokan air bersih ke pemukiman, fasilitas publik seperti rumah sakit dan sekolah.²²⁵ Dua unit *Mobile Water Tank* ini masih terus beroperasi dengan kemampuan distribusi sebesar 1.600.000 liter air bersih ke seluruh wilayah Jalur Gaza.²²⁶

Dalam krisis pangan Palestina, ACT memiliki program *Humanity Food Truck* (HFT) Palestina yang menyajikan makanan siap santap bagi rakyat

²²⁴ Bantuan serupa juga dilakukan oleh NGO Indonesia Medical Emergency Committee (Mer-C) yang juga tengah membangun Rumah Sakit Indonesia tahap II. Data lebih lanjut dapat diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1031066/sembako-dari-indonesia-untuk-palestina-cerita-dari-gaza#mobile-src> pada 30 Oktober 2020

²²⁵ Data diakses dari <https://www.globalwakaf.com/id/berita/read/2645/palestina-masih-dirundung-krisis-air-bersih> pada 30 Oktober 2020

²²⁶ Data diakses dari <https://www.rmoljabar.id/palestina-krisis-air-act-sediakan-armada-pengangkut-air-ke-gaza> pada 30 Oktober 2020

Palestina. ACT sendiri telah memiliki beberapa HFT yang beroperasi di wilayah Gaza. Satu truk dapat melayani hingga 1.000 penerima manfaat per hari.²²⁷

Adapun program Sumur Wakaf Palestina yang dikembangkan ACT yang dikembangkan sejak Desember 2019.²²⁸ Program ini juga dilengkapi dengan pendirian fasilitas penunjang seperti MCK dan tempat wudu. Sebagai contoh, sumur wakaf di wilayah Al Magharaqah, Jalur Gaza bermanfaat bagi 1.742 jiwa dengan kemampuan mendistribusikan air bersih sekitar 50.000 liter per jam ke rumah-rumah warga.²²⁹ Total hingga awal tahun 2020 tercatat sudah dibangun 4 sumur wakaf yang dibangun ACT.²³⁰

Dalam menangani krisis listrik Palestina, pada tahun 2018-2019 ACT turut berkontribusi dalam memberikan bantuan ratusan ribu bahan bakar untuk Palestina khususnya yang ditujukan kepada RS Al Syifa, RS Al Rantisi, RS Al Naseer, RS Syuhada Al Aqsa, dan RS European serta RS Beit Hanoun demi membangkitkan generator pembangkit selama beberapa hari.²³¹ Dalam ragam program yang diberikan, selain adanya dukungan dari masyarakat umum juga hadir sokongan yang berasal dari perusahaan, tokoh dan sebagainya.²³²

Tuntaskah Tugas Indonesia dalam Respon Krisis Air, Pangan dan Listrik Palestina?

Krisis air, pangan dan listrik yang dihadapi Palestina adalah krisis hak dasar rakyat Palestina yang sifatnya non-politik. Ketiadaan dan kekurangan dari ketiga elemen ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari dan keberlangsungan rakyat Palestina. Oleh karena itu, apa yang sudah diberikan oleh bangsa Indonesia baik di tingkat pemerintah maupun lembaga kemanusiaan hingga individual.

Di level pemerintah, krisis air, pangan dan listrik tidak akan selesai dari stimulus bantuan yang terus diberikan melainkan sokongan politik sebagai sebuah keniscayaan. Ketiadaan diplomasi internasional terhadap Israel maka berimbas kepada tidak pernah selesainya ragam krisis yang dihadapi oleh Palestina.

Selain itu, penting bagi Indonesia untuk secara intensif membangun kerja sama bilateral yang baik dengan Mesir dan Yordania. Tak ayal, posisi

²²⁷ Data diakses dari <https://news.act.id/berita/bersiap-humanity-food-truck-segera-hadir-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

²²⁸ Data diakses dari <https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-hadir-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

²²⁹ Data diakses dari <https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-salah-satu-maslahat-wakaf-dermawan-indonesia-untuk-palestina> pada 30 Oktober 2020

²³⁰ Data diakses dari <https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-bertambah-di-gaza-perluas-ketersediaan-air-bersih> pada 30 Oktober 2020

²³¹ Data diakses dari <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/02/07/118219/act-kirim-bantuan-bahan-bakar-untuk-delapan-rumah-sakit-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

²³² Data diakses dari <https://ayobandung.com/read/2020/07/22/109375/rabbani-dan-act-bantu-palestina-hadapi-krisis-kemanusiaan-terberat> pada 30 Oktober 2020

kedua negara tetangga Palestina tersebut valid dalam menjadi akses bagi bantuan bagi rakyat Palestina. Posisi negara lain yang juga penting adalah negara-negara di kawasan Timur Tengah yang juga menjadi “rumah kedua” bagi pengungsi Palestina.

Di samping itu, kerja sama teknis atau program peningkatan kapasitas masih terus diperlukan bagi pengembangan SDM Palestina. Program ini juga dapat meningkatkan intensitas interaksi antara masyarakat Indonesia dengan Palestina. Namun, poin pentingnya adalah dibutuhkannya peta kebutuhan Palestina dalam usaha mempersiapkan potensi SDM yang dimiliki.

Di level lembaga kemanusiaan Indonesia, bantuan terhadap rakyat Palestina terus diperlukan. Kontribusi tiada henti menjadi poin penting kehadiran lembaga kemanusiaan. Namun, keberadaan berbagai lembaga kemanusiaan dapat menjadi permasalahan tersendiri saat bantuan yang diberikan tidak memiliki bobot keberlanjutan. Selain itu, ragamnya lembaga dan bantuan yang diberikan maka ke depan diperlukan suatu konsorsium dalam membangun kolaborasi program antar-NGO bagi bantuan yang diberikan bagi Palestina.

Rekomendasi

1. Diplomasi Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral diperlukan untuk akhiri blokade Gaza dan pendudukan Tepi Barat sebagai sumber dari krisis pangan, air dan listrik Palestina.
2. Kerja sama teknis atau program peningkatan kapasitas masih terus diperlukan bagi pengembangan SDM Palestina. Program ini juga dapat meningkatkan intensitas interaksi antara masyarakat Indonesia dengan Palestina
3. Beragamnya lembaga dan bantuan kemanusiaan yang diberikan maka ke depan diperlukan suatu konsorsium dalam membangun kolaborasi program antar-LSM bagi bantuan yang diberikan bagi Palestina.
4. Perlu dibuatnya suatu peta kebutuhan Palestina.
5. Mendorong pemerintah Indonesia kepada pengusaha Indonesia untuk berinvestasi (*outbond investment*) di sektor pangan, listrik dan air di Palestina.
6. Peningkatan pelatihan peningkatan kapasitas dan beasiswa di bidang energi terbarukan khusus dalam mengatasi krisis pangan, listrik, dan air.
7. Indonesia perlu mendorong kesadaran masyarakat internasional untuk pemenuhan hak dasar rakyat Palestina.

BAB IV

PALESTINA DAN PERSOALAN PENGUNGI

Pendahuluan

Masalah pengungsi Palestina adalah salah satu isu krusial dalam negosiasi status akhir Palestina-Israel sebagai akibat dari Okupasi Israel. Hal ini terutama disebabkan oleh dua perang antara negara-negara Arab dan Israel pada tahun 1948 dan 1967. Kegagalan negara-negara Arab dalam dua perang tersebut menyebabkan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel dan pelarian banyak orang Palestina dari rumah dan kampung halaman mereka.²³³

Pengungsi Palestina umumnya terbagi dalam tiga kelompok utama: Mereka yang mengungsi pada tahun 1948, pengungsi Palestina yang tinggal di dalam wilayah yang kini menjadi negara Israel, dan pengungsi Palestina yang mengungsi pada tahun 1967 dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selama 66 tahun terakhir, Israel terus menolak hak pengungsi Palestina untuk kembali ke kota, desa, dan kampung halaman mereka.²³⁴ Kini dengan okupasi yang terus berlanjut, jumlah pengungsi Palestina terus beranak pinak dari tahun ke tahun. Menurut UNRWA,²³⁵ ketiga kategori ini juga menjadi acuan dalam memperkirakan jumlah para pengungsi dari setiap kategori dan mempengaruhi setiap bantuan yang disalurkan untuk mereka.

Walaupun demikian, harus diakui tidak terdapat data pasti berapa jumlah pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara. Jumlahnya pun bervariasi tergantung dari mana sumber kita mengambilnya.²³⁶ Misalnya, Jumlah pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA sekarang ada lebih dari 4,3 juta orang.²³⁷ Di sisi lain, the Palestinian Right to Return Coalition (Al-

²³³ Tianshe Chen (2009) Palestinian Refugees in Arab Countries and Their Impacts, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 3:3, 42-56, DOI: 10.1080/19370679.2009.12023136

²³⁴ <https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations>. Diakses pada 4 Desember 2020.

²³⁵ The Danish Immigration Service. (2020). *Palestinian Refugees Access to registration and UNRWA services, documents, and entry to Jordan*. Country Report June 2020 Country Of Origin Information (COI). Hal.10

²³⁶ Tianshe Chen (2009) Palestinian Refugees,...

²³⁷ The United Nations and The Palestinian Refugees.

<https://www.unrwa.org/userfiles/2010011791015.pdf>. Diakses pada 4 Desember 2020.

Awda) menyebut total keseluruhan jumlah pengungsi Palestina di seluruh dunia mencapai 7,2 juta orang.²³⁸ Selain kedua versi ini, terdapat data lain di tahun 2018 yang menyebut total 8.705.289 pengungsi yang terbagi dalam lima kategori: (1) pengungsi tahun 1948 yang terdaftar di UNRWA sebesar 5.545.540 pengungsi atau 63.7%, (2) pengungsi 1948 yang tidak terdaftar di UNRWA sebanyak 1.161.812 pengungsi atau 13.3%, (3) pengungsi tahun 1967 sebanyak 1.237.462 pengungsi atau 14.2%, (4) pengungsi di dalam pendudukan tahun 1948 sebanyak 415.876 pengungsi atau 4.8% dan (5) pengungsi di dalam pendudukan tahun 1967 sebanyak 344.599 pengungsi atau 4%.²³⁹

Perbedaan dalam jumlah dan mekanisme statistik ini menjadi salah satu tantangan dalam penyelesaian masalah pengungsi Palestina. Dalam tulisannya yang berjudul *Statistical data on Palestinian refugees: What we know and what we don't*, Hasan Abu Libdeh mengakui bahwa terdapat sejumlah masalah dalam pencatatan jumlah pengungsi Palestina oleh berbagai lembaga dunia. Libdeh menambahkan, data yang dikeluarkan dari masing-masing sumber ini mengalami berbagai kekurangan seperti cakupan, ketepatan waktu, representasi sampel, hingga masalah reliabilitas. Data dari UNRWA, bagi Libdeh, kurang mencakup jumlah pengungsi yang tidak terdaftar; kegagalan untuk menangkap data tentang pengungsi yang tinggal di luar kamp; dan kurangnya metode sistematis, kuat, dan mutakhir untuk menangkap perubahan sosio-demografis para pengungsi.²⁴⁰

Berangkat dari tulisan Libdeh itulah paper ini melihat statistik pengungsi Palestina. Selain itu, paper ini akan secara khusus menyoroti sejumlah situasi terkini berkaitan dengan isu pengungsi Palestina. Untuk mempertajam kajian, tidak semua hal terkait pengungsi akan dibahas. Karenanya beberapa isu akan diulas berdasarkan pilihan-pilihan strategis yang paling dekat keterkaitannya dengan upaya advokasi Indonesia, juga organisasi masyarakat sipil yang berkecimpung di isu ini. Kajian juga akan

²³⁸<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations>. Diakses pada 4 Desember 2020.

²³⁹ Al-Taqrir al-Istratiji al-Filastiny 2018-2019, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisarat, Beirut Libanon, Cet. Pertama 2020, hal.85-89, http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&nv=ExtraWatchWordPressEnv&file=arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2018-19/PSR-18-19_FullBook_HD.pdf

²⁴⁰ Rex Brynen and Roula El-Rifai (Ed). (2007). *Palestinian Refugees Challenges of Repatriation and Development*. New York: I.B.Tauris & Co Ltd and the International Development Research Centre. Hal. 14-22.

mengulas seputar kondisi terkini dan sebaran pengungsi Palestina di berbagai negara, tantangan dan kebutuhan para pengungsi, menimbang kemungkinan-kemungkinan mendapatkan hak untuk kembali, serta sejauh mana peran Indonesia dapat berkontribusi mewarnai upaya dunia internasional memberikan berbagai bantuan kepada para pengungsi Palestina.

Kondisi Pengungsi Palestina di Berbagai Negara

Mayoritas pengungsi Palestina tinggal tidak jauh dari rumah asalnya baik di tanah air sendiri maupun di negara tetangga. Lebih dari setengah populasi pengungsi tinggal di Yordania. Sekitar 37,7% tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza, terdiri dari sekitar 50 persen populasi di daerah tersebut. Sekitar 15% jumlah yang hampir sama ada di Suriah dan Lebanon.²⁴¹ Sekitar 355.000 pengungsi internal Palestina tinggal di Israel saat ini. Populasi pengungsi yang tersisa tinggal di seluruh dunia, termasuk bagian dunia Arab lainnya.²⁴² Dari 4,3 juta pengungsi yang terdaftar di UNRWA, 33% tinggal di 59 kamp pengungsi UNRWA di seluruh Tepi Barat dan Jalur Gaza, Yordania, Suriah dan Lebanon.²⁴³

Yordania

Ada kurang lebih 2 juta pengungsi Palestina di Yordania. Tidak seperti negara tuan rumah lainnya, Yordania memberikan hak kewarganegaraan penuh kepada pengungsi Palestina, kecuali 120.000 orang yang berasal dari Jalur Gaza. Ada 10 kamp pengungsi resmi dan tiga kamp pengungsi tidak resmi di negara ini.²⁴⁴ Walaupun sebagian besar pengungsi Palestina di Yordania memiliki kewarganegaraan Yordania, sejumlah kecil pengungsi (kebanyakan 'mantan warga Gaza' yang mengungsi dari Gaza untuk pertama atau kedua kalinya sebagai akibat dari perang 1967 dan permusuhan berikutnya) menghadapi tantangan yang lebih besar. Para pengungsi non-warga negara Palestina ini tidak hanya jauh lebih mungkin menjadi miskin tetapi juga tiga kali lebih mungkin

²⁴¹<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinianrefugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations.>, diakses pada 4 Desember 2020.

²⁴² Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). The International Day of Refugees 2019.

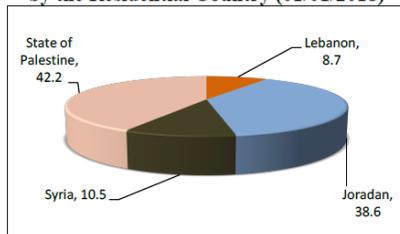
²⁴³ <https://www.thenewhumanitarian.org/report/89571/middle-east-palestinian-refugee-numberswhereabouts>, diakses pada 4 Desember 2020.

²⁴⁴ Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang. (2013). *Progress, challenges, diversity Insights into the socio-economic conditions of Palestinian refugees in Jordan*. Norway: Allkopi AS. Hal. 8.

menjadi di antara yang paling miskin dan paling melarat,²⁴⁵ sebab mereka hidup dengan kurang dari 1,25 USD sehari.²⁴⁶

Pemerintah Yordania telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beberapa konsekuensi kemiskinan yang memperburuk status mereka, mendukung proyek pembuangan limbah di kamp Jerash, yang merupakan rumah bagi para mantan warga Gaza, dan menyediakan anak-anak eks-Gaza di bawah usia enam tahun. dengan asuransi kesehatan pemerintah gratis dan mantan warga Gaza lainnya dengan perawatan kesehatan bersubsidi.²⁴⁷ Namun perang yang berkecamuk akibat dari rentetan Arab Spring sedikit banyak memperparah kondisi keberadaan para pengungsi Palestina di Yordania. Akibat dari perang di Irak dan Suriah, pengungsi yang datang dari Irak dan Suriah telah memberikan tekanan yang cukup besar pada ekonomi dan infrastruktur negara. Akibatnya, pengangguran menjadi tantangan utama, dengan masyarakat tanpa pekerjaan meningkat dari 18,3 persen pada akhir 2017 menjadi 18,6 persen pada akhir 2018. Keadaan ini telah memperburuk situasi perekonomian Jordan, dan secara khusus menyasar anak-anak muda.²⁴⁸

Percentage Distribution of Palestinian Refugees by the Residential Country (01/01/2018)



Source: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

Libanon

Situasi terkini pengungsi Palestina di Libanon sebenarnya hampir sama keadaannya dengan di Yordan, apalagi Libanon juga terkena dampak dari Arab

Spring.²⁴⁹ Menurut UNRWA, saat ini terdapat lebih dari 504.000 Pengungsi Palestina yang terdaftar oleh UNRWA di Libanon.²⁵⁰ Pengungsi Palestina di Libanon dilaporkan terus menghadapi deprivasi sosial ekonomi yang akut dan

²⁴⁵ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/israels-refusal-to-grant-palestinian-refugees-right-to-return-has-fuelled-seven-decades-of-suffering/#:~:text=There%20are%20currently%20more%20than,in%20Israel%20or%20the%20OPT.> diakses pada 5 Desember 2020.

²⁴⁶ *Ibid.* Hal. 9.

²⁴⁷ *Ibid.* Hal. 9.

²⁴⁸ Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2019). General Assembly Official Records Seventy-fourth Session Supplement No. 13. 1 January–31 December 2018. Hal. 12.

²⁴⁹ *Ibid.* Hal. 12-13.

²⁵⁰ The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon February 2016.

[https://www.refworld.org/pdfid/56cc95484.pdf.](https://www.refworld.org/pdfid/56cc95484.pdf)

hambatan hukum untuk menikmati sepenuhnya berbagai hak asasi manusia. Pengungsi Palestina di Lebanon, sebagaimana akan dijelaskan lebih jauh, dilaporkan secara historis telah terpinggirkan dan dikeluarkan dari aspek-aspek utama kehidupan sosial, politik dan ekonomi tanpa hak untuk memiliki harta benda tak bergerak; akses yang sangat dibatasi ke layanan publik (selain yang disediakan oleh UNRWA), seperti kesehatan dan pendidikan; dan pembatasan terkait profesi tertentu dan kesempatan kerja yang terbatas.

Pengungsi di negara Timur Tengah dan Wilayah lainnya

Selain jumlah terbesar di Yordania dan Libanon, pengungsi Palestina juga tersebar ke banyak negara-negara Timur Tengah lain, hingga ke Eropa, Amerika dan wilayah lain di dunia. Walaupun jumlahnya tidak signifikan dibanding kedua negara di atas, namun sejumlah negara ini turut memperlakukan pengungsi Palestina dengan baik (walaupun dalam situasi tertentu masih kurang) dan berperan dalam menyediakan bantuan-bantuan internasional untuk para pengungsi. Beberapa negara Timur Tengah yang patut disebut antara lain; Suriah dengan kurang lebih 560.000 pengungsi yang terdaftar di UNRWA dan mendiami sembilan kamp resmi dan tiga kamp tidak resmi.²⁵¹ Di Suriah, pengungsi Palestina menikmati hak yang sama dengan penduduk Suriah, kecuali hak kewarganegaraan. Perang Suriah yang berkepanjangan juga membuat banyak para pengungsi Palestina terlunta-lunta di negara tersebut. Bahkan pada 2019, perang sipil Suriah menyebabkan sekitar 120.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke negara-negara lain seperti Yordania, Libanon, hingga Eropa dan Amerika.²⁵²

Di Mesir dan Irak, Diperkirakan ada berturut-turut 50.000²⁵³ dan sekitar 10.000²⁵⁴ pengungsi Palestina, yang terus berkurang sebab UNRWA tidak beroperasi di Mesir, juga Irak yang tidak stabil sejak kejatuhan Saddam Husein.

²⁵¹ <https://www.middleeasteye.net/opinion/forgotten-and-without-future-syrias-palestinian-refugees>. diakses pada 5 Desember 2020.

²⁵² <https://www.un.org/unispal/document/palestine-refugees-in-syria-a-tale-of-devastation-and-courage-unrwa-commissioner-general-op-ed/>, diakses pada 5 Desember 2020.

²⁵³ Oroub El Abed. *The forgotten Palestinians: how Palestinian refugees survive in Egypt*.

Diakses dari <https://www.fmreview.org/sustainable-livelihoods/elabeled#:~:text=Some%2050%2C000%20Palestinian%20refugees%20live,many%20restrictive%20laws%20and%20regulations.&text=Palestinians%20were%20regarded%20as%20equal,and%20to%20work%20without%20restrictions> pada 5 Desember 2020.

²⁵⁴ Campbell, Elizabeth. *"Iraq's Displaced: A Stable Region Requires Stable Assistance"*, Refugees International, 16 February 2011. Diakses pada 5 Desember 2020.

Lainnya, seperti Arab Saudi, jumlah pengungsi Palestina mencapai 460 ribu pengungsi data tahun 2014, ketiga terbesar setelah Yordania dan Suriah.

Di wilayah lain seperti Eropa, Amerika dan lainnya, jumlah pengungsi Palestina bervariasi. Eksodus pengungsi yang memasuki wilayah di luar Timur Tengah salah satunya dipengaruhi Arab Spring yang melanda beberapa negara Timur Tengah dan hingga kini belum juga sepenuhnya mereda. Diketahui, The European Asylum Support Office (EASO) mengatakan bahwa setidaknya 19.000 pengungsi Palestina telah mengajukan suaka ke Uni Eropa pada tahun 2015, dibandingkan dengan 15.680 pada tahun 2014 dan 9.590 pada tahun 2013. Mereka tersebar ke Perancis, Jerman, Yunani, Inggris, dan negara lainnya.²⁵⁵ Menariknya, kepergian pengungsi Palestina seiring dengan membludaknya pengungsi Suriah dikarenakan perang sipil Arab Spring.

Di Amerika, sensus pada 2015 menghitung ada sekitar 118.000 orang Palestina; kemungkinan perkiraan ini sangat konservatif, terutama karena AS baru mulai menghitung pengungsi Palestina sebagai kebangsaan baru-baru ini.²⁵⁶ Jumlah ini belum ditambah para pengungsi yang mendiami Kanada, Chili, Honduras, Brazil dan negara Amerika latin lainnya yang diperkirakan mencapai sekitar 1 juta pengungsi.²⁵⁷

Banyaknya para pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara menunjukkan persoalan pengungsi masih sangat jauh dari kata selesai. Ini juga dikarenakan konflik antara Palestina-Israel masih belum menemukan kata sepakat. Selama kedua wilayah ini masih menjadi sengketa, persoalan pengungsi masih akan menjadi tantangan dalam tahun-tahun mendatang.

Sejumlah Tantangan Pengungsi Palestina

Besarnya jumlah pengungsi Palestina mewakili 43% dari total pengungsi di dunia yang berjumlah sekitar 17 juta pengungsi.²⁵⁸ Walaupun telah terkatung-katung selama 72 tahun, belum juga ditemukan tanda-tanda positif penyelesaian masalah. Di sisi lain, mayoritas permasalahan pengungsi di negara-negara lain dapat diselesaikan dan sebagian besar dari para

²⁵⁵ IMEMC Agencies, *EU Observer: Palestinians Joining Exodus to EU, according to Erekat*, IMEMC news,

March 2016, Diakses 5 Desember pada <http://imemc.org/article/75205/>.

²⁵⁶ biannual magazine of BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights *al majdal* Magazine. (March, 2017). Issue No. 59.

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ *Al-Lajun al-Falastiniyun*, tanpa penulis dan penerbit, hal 1.

pengungsi tersebut telah kembali ke negara mereka seperti Bosnia, Afganistan dan lainnya.

Puluhan tahun tanpa kejelasan, tentu melahirkan banyak permasalahan di berbagai negara. Para pengungsi Palestina mengalami tantangan yang tidak sedikit dan memengaruhi kehidupan mereka. Muncul berbagai masalah baru yang semakin menambah penderitaan seperti pengangguran, tempat tinggal yang terbatas, rendahnya layanan kesehatan, tersebarnya kemiskinan, dan kondisi kamp-kamp pengungsian yang jauh dari standar kemanusiaan.²⁵⁹ Jika melihat perlakuan negara-negara terhadap pengungsi Palestina, dapat kita bagi menjadi dua kategori; pertama negara yang memperlakukan pengungsi Palestina dengan memberikan hak-haknya dan bebas bekerja dan hidup terhormat, seperti Yordania dan Arab Saudi. Pada kategori ini, pengungsi Palestina dimanfaatkan untuk kemajuan dan pembangunan negara tersebut.²⁶⁰ Kategori kedua adalah negara-negara di mana pengungsi Palestina banyak menghadapi masalah baik ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Yang termasuk kategori ini adalah pengungsi di Libanon, Irak, dan Suriah. Di Libanon pengungsi Palestina sama sekali tidak mendapatkan hak-hak sipilnya, bahkan keberadaan pengungsi Palestina kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan keamanannya seperti dan dijadikan korban friksi internal dan lokal, hal ini juga terjadi di Suriah, Irak dan Libya. Sekitar 3.000 warga Palestina di Lebanon tidak terdaftar di UNRWA dan tidak memiliki dokumen identitas lain. Mereka dilarang untuk mendapatkan hampir semua bentuk bantuan, dan bertahan berkat LSM.²⁶¹

Tantangan Politik

Secara garis besar permasalahan pengungsi Palestina sangat terkait dengan faktor politik akibat tindakan dan kebijakan penjajahan Israel. Selain itu, tidak maksimalnya peran masyarakat Internasional dalam menangani dan menyelesaikan sejumlah masalah pengungsi Palestina, baik oleh Lembaga khusus PBB seperti Komisi Rekonsiliasi PBB untuk Palestina (UNCCP) maupun UNRWA, begitu pun dengan peran negara-negara Arab yang tidak berkomitmen pada keputusan protocol Casablanca 1975 yang mengatur permasalahan pengungsi Palestina di negara-negara Arab. Di internal

²⁵⁹ Prof. Shubhi Yusuf, *Musykilah al-Lajjin al-Filistiniin, Dirasah fi al-Jugrafiyah al-Siyasih*, Universitas al-Azhar Gaza, 2009, hal. 2.

²⁶⁰ Dr. Mohsen Muhammad Shalih, *Waraqah Amal, Audhau al-Lajjiin al-Falastiniyiin wa Qadhayahum fi al-Alam al-Arabi*, 2015, hal. 15-40.

²⁶¹ <https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinianrefugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations,> diakses pada 4 Desember 2020.

Palestina, Otoritas Palestina (PA) juga tidak bisa memainkan perannya, tidak bisa mendorong pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengemban tanggung jawabnya, juga karena kurangnya perlindungan internasional yang diperlukan.²⁶²

Dari aspek politik, sejumlah tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Pengungsi Palestina tidak memiliki keterlibatan dan representasi politik yang dapat memperjuangkan hak dan permasalahan mereka, sebab proses politik hanya terbatas pada orang-orang Palestina yang tinggal di dalam Palestina.²⁶³ Hal ini tentu sangat berdampak pada aspirasi kepentingan dan penderitaan yang dialami diaspora pengungsi kurang terakomodasi oleh kebijakan yang diambil oleh otoritas Palestina untuk memperjuangkan hak-hak mereka di Pengungsian.
2. Definisi yang salah tentang pengungsi Palestina.²⁶⁴ Hingga saat ini PBB belum memiliki standar resmi terkait definisi yang tepat dan komprehensif tentang pengungsi Palestina, ini menjadi celah bagi Israel untuk menghilangkan dan menghapus penyebutan pengungsi bagi jutaan pengungsi Palestina²⁶⁵. Definisi ini juga menjadi celah hilangnya jutaan hak pengungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan negara penerima pengungsi. Di Irak misalnya yang mendefinisikan pengungsi Palestina sebagai mereka yang datang ke Irak mulai dari tahun 1948 hingga 1950 dan di era Saddam Husain diubah menjadi tahun 1958. Mereka yang mengungsi selain tahun ini tidak terdaftar sebagai pengungsi Palestina. Tak hanya itu, walaupun disebut Irak memperlakukan pengungsi Palestina sebagaimana orang Irak, namun Pemerintah Irak mengeluarkan sejumlah kebijakan dan pengecualian-pengecualian yang membuat pengungsi Palestina di Irak juga tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak bisa tinggal tetap; seperti aturan tidak boleh membeli mobil pribadi, atau telepon rumah, dan pembatasan libur pekerja profesional Palestina.²⁶⁶

²⁶² *al-Lajiun al-Filistiniyun fi Syitat, op.cit*, hal. 2-5.

²⁶³ Maryam I'tany, *Muanat al-Laji al-Filastiny, Markaz al-Zaituniyah wa al-Istisyarat*, Beirut, 2010, hal. 68.

²⁶⁴ UNRWA mendefinisikan membatasi pengungsi Palestina khusus pada orang-orang Palestina yang tinggal di Palestina dari tahun 1946 hingga 1948 yang kehilangan rumah dan penghasilan akibat perang tahun 1948, dan yang dianggap pengungsi bagi UNRWA adalah mereka yang tercatat sebagai pengungsi di UNRWA yang tersebar di 58 camp pengungsian di lima lokasi yaitu Gaza, Tepi Barat, Suriah, Yordania, dan Libanon, yang jumlahnya hanya mencapai 1,4 juta pengungsi dan di luar dari negara dan wilayah kerja UNRWA ini tidak dianggap sebagai pengungsi.

²⁶⁵ Dr. Issam M.A Adwan, Mantan Urusan Pengungsi Palestina Gaza, Palestina dalam kajian pengungsi Palestina bersama CDC El-Sharq, 27 November 2020.

²⁶⁶ Markaz Al-Zaituniyah, *Al-Lajiun al-Filistiniyun fi al-Iraq*, Beirut, 2009, hal. 7-9.

3. Termasuk hak politik pengungsi adalah hak mendapatkan perlindungan, dalam konteks pengungsi Palestina, hak-hak ini di negara-negara Arab dipengaruhi oleh tensi dan perkembangan politik di negara-negara Arab, hubungan politik dengan PLO, dan agresi militer seperti di Libya dan Irak.²⁶⁷ Dampak perang Teluk 1991 misalnya menyebabkan sekitar empat ratus ribu orang Palestina terpaksa meninggalkan Kuwait, begitu pun dengan agresi militer AS ke Irak, kamp-kamp dan komunitas Palestina menjadi sasaran serangan, penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh militer Amerika karena dianggap sebagai sekutu rezim Saddam Husain²⁶⁸, hal ini memaksa ribuan pengungsi Palestina di Irak mengungsi keluar Irak ke negara-negara tetangga seperti Suriah, Yordania, Sudan bahkan ke Brazil dan Chili.²⁶⁹ Pasca serangan AS, kondisi pengungsi Palestina semakin memburuk, menjadi sasaran serangan dari kelompok Syiah, rumah-rumah mereka diserang, puluhan meninggal, penangkapan, penculikan dan penyiksaan serta ancaman yang didapatkan pengungsi Palestina agar meninggalkan Irak²⁷⁰. Pada konflik Suriah, dari total 562,316 pengungsi Palestina yang terdaftar di UNRWA, sepertiganya mengungsi keluar dari Suriah, dan 40% lainnya mengungsi di dalam Suriah, dan lebih dari 180,000 pengungsi Palestina rumahnya hancur dan rusak yang sering menjadi sasaran serangan, misalnya serangan roket yang menasar camp pengungsi al-Nirb di Halab menyebabkan 11 orang pengungsi Palestina meninggal dan lima orang di antaranya adalah anak-anak siswa di sekolah UNRWA.²⁷¹
4. Israel dan komunitas internasional tidak komitmen melaksanakan keputusan-keputusan internasional yang terkait dengan permasalahan pengungsi Palestina; di antara keputusan penting tersebut adalah: keputusan 194 (1948), 242 (1967)2535 ◦ (1969)3236 ◦ (1974)31/20 ◦ (1976)237 ◦ (1967)2252 ◦ (1967)2792 ◦ (1971).²⁷²

²⁶⁷ Nidhal al-Izzah, *Al-Nidzam al-Duwali al-Khas bi Himayah al-Lajiin al-Filistiniyin*, Majalah *Haq al-Audah Markaz al-Filastiny li Mashadir Huquq al-Muwathanah wa al-Lajiin*, Februari 2012 Hal. 5, Februari 2012 Hal. 5

²⁶⁸ *Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, Al-Lajiun al-Filastiniyun fi al-Iraq*, Beirut, 2009, hal. 20-45.

²⁶⁹ Abdul Rahman Abo al-Nasr, Universitas Al-Azhar Gaza, 2008, *Al-Lajiun Al-Falastiniyun Baina Waqi al-Luju' wa Haq al-Audah wafqan liahkam al-Qanun al-Duwali al-Am*, hal. 184.

²⁷⁰ Human Right Wathc, *La Mafar, al-Wadh' al-Khathir li al-Filastiniyin fi al-Iraq*, hal. 1.

²⁷¹ UNRWA, *Taqrir al-Amal al-Sanawi* 2019, hal. 8 – 11, https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ar_un_report_2020_modification-min.pdf

²⁷² Dr. Issam M.A Adwan, materi yang diperoleh CDC el-Sharq dalam webinar series tanggal 21 November 2020.

Buruknya Harapan di Sektor Pendidikan

Data tahun 2008 menunjukkan tingkat buta aksara di kalangan pengungsi di Palestina 5.4% lebih sedikit dibanding dengan warga Palestina non-pengungsi yang berada pada angka 6.4%.²⁷³ Terlepas dari harapan dan semangat Pendidikan yang tinggi di kalangan pengungsi Palestina, terdapat sejumlah tantangan dan permasalahan yang dihadapi sektor ini, terlebih bahwa Pendidikan adalah sektor strategis yang menurut sejumlah pengamat, karena menjadi sasaran pendudukan dan penjajahan Israel yang berusaha menciptakan generasi Palestina yang lupa dengan sejarah dan negaranya. Oleh karena itu, tidak jarang sekolah menjadi sasaran serangan Israel, anak-anak sekolah yang ditangkapi, terlebih Israel juga membangun tembok-tembok pemisah yang menghalangi guru dan siswa sampai ke sekolah mereka dengan selamat.²⁷⁴

Beberapa di antara buruknya harapan pendidikan bagi para pengungsi antara lain:

1. Kurikulum Pendidikan yang bertentangan dengan wawasan nasionalisme Palestina. Kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah pengungsi sama sekali tidak membahas masalah sejarah dan geografi Palestina.²⁷⁵ Hal ini menurut mantan ketua urusan Pengungsi Palestina, Dr. Issam M.A. Adwan berpengaruh pada wawasan nasionalisme mereka karena mendapatkan Pendidikan yang tidak sesuai dengan nasionalisme Palestina. Bahkan kurikulum UNRWA memasukkan pelajaran-pelajaran yang menyiapkan generasi Palestina untuk hidup berdampingan dengan Israel.²⁷⁶
2. Jumlah sekolah dan guru yang terbatas dengan siswa yang padat. Pengungsi Palestina mayoritas mendapatkan Pendidikan dari sekolah-sekolah yang dibangun UNRWA di lima wilayah kerjanya, sekitar 486,026 pengungsi Palestina mendapatkan pendidikannya di 647 sekolah SD dan

²⁷³ Maryam Itany, *Muanat al-Laji al-Falastiny*, Markaz al-Zaitunyah, Beirut, 2010, hal. 86-89.

²⁷⁴ Prof. Bahaudin Salem, *al-Tahaddiyat al-Muasharah allati Tuwajihu al-Lajie al-Filastiny fi Dzilli al-Azamat al-Rahinah wa Subul al-Tagallub Alaiha*, Universitas Al-Quds al-Maftuhah, hal. 162.

²⁷⁵ Maryam Itany, *Ibid*.

²⁷⁶ Dr. Issam M.A Adwan, Mantan Urusan Pengungsi Palestina Gaza, Palestina dalam kajian pengungsi Palestina bersama CDC El-Sharq, 27 November 2020.

SMP UNRWA²⁷⁷. Sumber lain menyebutkan dari sekitar 4 juta umur sekolah anak pengungsi Palestina, UNRWA hanya memberikan Pendidikan kepada sekitar enam ratus ribu pengungsi Palestina²⁷⁸. Selain itu kondisi sekolah yang ada pun penuh sesak dengan siswa, dalam satu ruangan kelas terisi 55 siswa, sementara guru yang sedikit memaksa guru-guru yang ada memiliki jadwal mengajar pagi dan sore dengan gaji yang rendah hal ini juga berdampak pada kinerja guru mengajar dan kedudukan mereka di masyarakat.²⁷⁹

3. Kekurangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Sekolah-sekolah pengungsi juga tidak memiliki fasilitas Pendidikan dasar seperti laboratorium dan sebagainya, juga tidak didukung oleh teknologi modern seperti komputer, pencahayaan, perpustakaan dan lainnya.²⁸⁰
4. Kendala pembelajaran jarak jauh. Pandemi Covid-19 mengubah sistem Pendidikan menjadi sistem pembelajaran jarak jauh atau elektronik. Secara institusional, otoritas Palestina dan UNRWA juga tidak memiliki kesiapan menghadapi kondisi emergency ini dengan pembelajaran jarak jauh yang memerlukan dukungan teknologi dan infrastruktur listrik dan telekomunikasi dan dua hal ini menjadi krisis utama yang dihadapi Palestina dan kamp-kamp pengungsi, selain itu, siswa yang memiliki perangkat smart phone dan laptop sangat sedikit, hal ini sesuai statistik kementerian Pendidikan Palestina, di mana hanya 24.6% siswa di sekolah-sekolah Palestina yang memiliki perangkat ini, sementara di sekolah-sekolah UNRWA, hanya 37.3 persen siswa dan lebih rendah lagi di sekolah swasta yang hanya mencapai 17.6 persen siswa. Di samping kurangnya kesadaran keluarga Palestina akan Pendidikan jarak jauh begitu juga dengan kader-kader pendidik yang tidak memiliki kecakapan dengan sistem pembelajaran ini.²⁸¹

²⁷⁷ Namr Ahmad Mahmoud Aboliyah, *al-Auda' al-Ijtima'iyah wa al-Iqtishadiyah li al-Lajji al-Filastiniyiin fi Mukhayyat Syimal al-Diffah al-Garbiyah wa Afaaq al-Tanmiyah*, Tesis Master, Universitas Al-Quds, 2007, hal. 22

²⁷⁸ Dr. Issam M.A. Adwan, Mentan Kepala Urusan Pengungsi Palestina, dalam materi yang disampaikan dalam webinar CDC El-Sharq, November 2020.

²⁷⁹ Prof. Bahauddin Salem, *al-Tahaddiyat al-Muasharah allati Tuwajihu al-Lajje al-Filastiny fi Dzilli al-Azamat al-Rahinah wa Subul al-Tagallub Alaiha*, Universitas Al-Quds al-Maftuhah, hal. 162.

²⁸⁰ Prof. Bahauddin Salem, *ibid.* hal. 163.

²⁸¹ *Al-Markaz al-Filastiny li al-Abhats al-Siyasiah wa al-Dirasat al-Istratijiyyah - Masarat, Waraqah Haqaiq: Kuruna wa Tahaddiyat al-Ta'lim al-iliktruny fi al-Madaris al-Filistiniyah*, terakhir diakses, 4 Desember 2020, <https://bit.ly/33CyRL1>

Kompleksnya Kondisi Sosial Ekonomi

Pengungsi kehilangan unit keluarga besar mereka, satu keluarga terpencar-pencar di berbagai negara Arab dan non-Arab, adat para pengungsi bercampur dengan budaya tempat mereka berada.²⁸² Selain berintegrasi dengan budaya setempat, pengungsi menjadi terasing sehingga tidak percaya diri, lemah, dan putus asa. Sifat terasing kini kemudian memunculkan buruknya perilaku sosial mereka, seperti fakta yang terjadi di Gaza, pengungsi tidak membayar bayaran tagihan listrik.²⁸³

Selain itu, Pengungsi Palestina menghadapi perlakuan diskriminasi di negara-negara Arab. Walaupun Liga Arab telah mengeluarkan keputusan yang tercantum dalam Protokol Kasablanca -Darul Baidha 1965 yang mengatur standar perlakuan dan hak-hak pengungsi Palestina, namun negara-negara anggota merampas hak-hak asasi mereka dengan berbagai dalih seperti menjaga nasionalisme pengungsi Palestina agar tidak kehilangan nasionalisme, pengungsi tidak mau lagi kembali ke Palestina jika mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Perlakuan diskriminasi terjadi di negara-negara penerima pengungsi seperti Libanon, Suriah, Irak, Libya, dan Mesir. Diskriminasi ini tidaknya dengan warga negara penerima pengungsi tapi juga warga negara Arab lain. Bentuk diskriminasi tersebut misalnya hak bekerja di Libanon yang tidak membolehkan pengungsi Palestina bekerja di 69 sektor, jauh sebelum itu, pemerintah Libanon juga telah membatasi pekerjaan pengungsi Palestina, seperti aturan tahun 1951, dan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan tahun 1963, selain itu pengungsi Palestina juga tidak memiliki hak kepemilikan dengan aturan yang dikeluarkan Parlemen Libanon 21 Maret 2001.²⁸⁴

Persoalan ini ditambah fakta bahwa pengungsi Palestina juga menghadapi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Di Gaza, tingkat pengangguran ini mencapai 45,1 % (data UNRWA 2019) sementara sumber lain menyebutkan tingkat pengangguran ini mencapai 65%.²⁸⁵ Di Tepi Barat sendiri tingkat pengangguran di kalangan pengungsi tahun 2019 mencapai 13%. Sementara di Libanon, pengungsi yang dilarang bekerja di puluhan sektor semakin menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran

²⁸² Dr. Issam M.A. Adwan, materi yang disampaikan dalam rangka webinar CDC el-Sharq dan NPC, tanggal 21 November 2020.

²⁸³ *Markaz al-Jazirah li al-Dirasat, al-Lajun al-Filistiniyun fi al-Wathan al-Arabi, al-Waqi wa al-Afaq*, Doha, 2013, hal. 112.

²⁸⁴ Abdul Fattah al-Qilqilih, *Al-Huquq al-Insaniyah li al-Lajin al-Filistiniyin fi al-Duwal al-Mudhifa*, Badil Center, 2012, hal. 6-8.

²⁸⁵ Dr. Issam M.A. Adwan, Narasumber CDC El-Sharq – NPC, November 2020.

pengungsi. Sementara di Suriah, ratusan ribu rumah pengungsi Palestina hancur dan menyebabkan puluhan ribu mengungsi keluar Suriah, dan mereka yang bertahan menghadapi krisis pengangguran dan kemiskinan, kehilangan pekerjaan dan krisis bahan bakar dan listrik.²⁸⁶

Pengungsi dan Hak untuk Kembali

Hak untuk kembali merupakan hak universal yang mengikat menurut hukum internasional, yang dinikmati oleh setiap orang dari mana pun asalnya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang diproklamasikan oleh PBB pada tahun 1948 "sebagai standar pencapaian bersama bagi semua orang dan semua negara". Salah satu hak inti yang diatur dalam UDHR adalah hak untuk kembali. Pasal 13 (b) UDHR menyatakan: "Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan untuk kembali ke negaranya." Pengungsi Palestina berhak atas hak universal yang mengikat ini, dengan cara yang sama seperti semua pengungsi lainnya, apakah mereka berasal dari Bosnia, Rwanda, Afrika Selatan, atau di mana pun.²⁸⁷

Tetapi hak untuk kembali bukan hanya sebuah hukum. Ini adalah prinsip politik, penting bagi para pembela tanah di seluruh dunia dan di banyak tempat di mana orang-orang melawan pengungsian dan memperjuangkan hak mereka untuk tetap tinggal atau kembali ke tanah mereka. Mendukung hak kembali Palestina adalah kewajiban bagi negara, dan tanggung jawab untuk gerakan solidaritas. Mendukung hak untuk kembali berarti mendukung akuntabilitas dan keadilan.²⁸⁸

Great Return March (Pawai Kepulangan Akbar)

Banyak cara yang dilakukan oleh para pengungsi Palestina yang tersebar di seluruh dunia untuk dapat kembali ke tanah air mereka. Beberapa aksi yang pernah dilakukan adalah *Return March* pada tahun 2011²⁸⁹, kemudian dilanjutkan *Global March to Jerusalem* pada tahun 2012, aksi

²⁸⁶ UNRWA, *Taqrir al-amal al-Sanawi* 2019, Hal. 11-15

²⁸⁷ Why Palestinians have a right to return home.

<https://www.aljazeera.com/opinions/2011/9/23/why-palestinians-have-a-right-to-return-home/>

²⁸⁸ The Palestinian Right of Return. <https://waronwant.org/palestinian-right-return>

²⁸⁹ 2011 Israeli border demonstrations.

<https://www.theatlantic.com/photo/2011/05/palestinian-protests-on-israels-borders/100067/>

mingguan dan aksi tahunan yang digelar rakyat Palestina lainnya yang menuntut hak untuk kembali.²⁹⁰

Pada 30 Maret 2018, bersamaan dengan memperingati Hari Bumi Palestina, warga Palestina di Jalur Gaza melakukan protes di sepanjang pagar yang memisahkan Gaza dengan wilayah penjajah Israel. Mereka menuntut hak untuk kembali ke rumah leluhur mereka, di mana mereka diusir pada tahun 1948 ketika milisi Zionis secara paksa mengusir 750.000 warga Palestina dari desa mereka untuk membuka jalan bagi penciptaan negara bernama Israel. Selain menuntut Hak untuk Kembali, para pengunjung rasa juga menuntut diakhirinya blokade Israel selama 13 tahun, yang menurut PBB merupakan hukuman kolektif.²⁹¹

Aksi tersebut dinamakan *Great Return March* atau Pawai Kepulangan Akbar, sebuah protes berkelanjutan yang diorganisir oleh berbagai kalangan masyarakat sipil Palestina, aktivis akar rumput, dan faksi politik di Gaza untuk menyoroti dampak pengepungan dan pendudukan dan untuk memusatkan kembali masalah hak-hak pengungsi. Tujuan utama dari Pawai ini adalah untuk memberikan perhatian pada Hak untuk Kembali Rakyat Palestina²⁹² sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB (242 – 338 – 194) yang menuntut kembalinya para pengungsi Palestina dan pemberian kompensasi untuk mereka, dan kemudian pada perlunya penarikan penjajah Israel dari tanah yang diduduki pada tahun 1967.²⁹³

Aksi pawai kepulangan akbar ini pertama kali muncul dalam bahasa Arab di halaman *Facebook Great Return March* dan beberapa media lokal. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan oleh “Panitia Koordinasi *Great Return March*” yang terdiri dari masyarakat sipil, pengungsi atau mereka yang terusir dalam tragedi Nakba 1948, aktivis HAM dan hukum, organisasi akar rumput,

²⁹⁰ Declaration of Support for the Global March to Jerusalem. <https://palsolidarity.org/2012/03/declaration-of-support-for-the-global-march-to-jerusalem/>

²⁹¹ Gaza’s Great March of Return protests explained. <https://www.aljazeera.com/news/2019/3/30/gazas-great-march-of-return-protests-explained>

²⁹² Great March of Return. <https://www.msf.org/great-march-return>

²⁹³ UN Resolutions 242 and 338. <http://www.reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=541>

aktivis pemuda, seniman, jurnalis, aktivis BDS, perwakilan fraksi politik, dan intelektual.²⁹⁴

Yang perlu dicatat di sini adalah, meskipun panitia koordinasi melibatkan faksi politik, akan tetapi ini adalah pawai nasional di mana warga Palestina dari segala usia dan berbagai kelompok politik dan sosial serta pendukung mereka berkumpul dari berbagai belahan dunia yang memperjuangkan hak tentang kembalinya pengungsi dan kompensasi mereka sebagai konsensus nasional. Semua bersatu demi satu tujuan yaitu pulang ke tanah air mereka.²⁹⁵

Ini adalah perjuangan yang berkelanjutan dan kumulatif, bukan acara musiman atau satu hari. Aksi ini hanya akan berakhir dengan kembalinya para pengungsi Palestina ke tempat mereka yang seharusnya dan aksi ini sudah berlangsung setidaknya dua tahun. Akan tetapi menurut Jurnalis Gaza, Wafa Al-Udaini, dalam webinar series menjelaskan bahwa aksi pawai terhenti akibat pandemi Covid-19. Dan akan dilanjutkan setelah pandemi berakhir, hingga Palestina mendapatkan hak mereka untuk kembali.²⁹⁶

Meskipun aksi damai ini dibalas oleh tentara Israel dengan kekerasan, yang menyebabkan kematian, kecacatan dan trauma. Namun rakyat Palestina menolak untuk menyerah. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyebutkan bahwa ribuan demonstran Palestina yang mengikuti aksi Great Return March melakukannya secara damai, meskipun beberapa ada yang mendekati pagar pembatas dan membakar ban, merusak kawat berduri dan melempar bom molotov ke arah pasukan Israel. Pasukan Israel menanggapi dengan menembakkan tabung gas air mata, beberapa di antaranya dijatuhkan dari drone, peluru karet, dan peluru tajam, sebagian besar oleh penembak jitu. Akibatnya, 214 warga Palestina, termasuk 46 anak, tewas, dan lebih dari 36.100, termasuk hampir 8.800 anak terluka terkena peluru tajam.²⁹⁷

²⁹⁴ GREAT MARCH OF RETURN. Shattered limbs, shattered lives.

<https://www.msf.org/great-march-return-depth>

²⁹⁵ What is "The Great Return March?". <https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/what-is-great-return-march>

²⁹⁶ Webinar Series :Dinamika dan tantangan pengungsi Palestina di berbagai negara

²⁹⁷ Two Years On: People Injured and Traumatized During the "Great March of Return" are Still Struggling. <https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling>

Peran Indonesia dalam Masalah Pengungsi Palestina

Isu Palestina telah tumbuh menjadi isu yang tidak terpisahkan bagi bangsa Indonesia. Artinya, isu ini tidak hanya menjadi domain bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetapi juga telah memberikan simpati yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk perhatian yang diberikan baik di level pemerintah hingga masyarakat sipil.

Komitmen Indonesia secara jelas terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan 60 tahun KAA pada 24 April 2015, yaitu

“Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Palestina. Dunia tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina yang hidup dalam ketakutan dan ketidakadilan akibat penjajahan yang berlangsung begitu lama. ... Kita tidak boleh berpaling dari penderitaan rakyat Palestina, kita harus terus berjuang bersama mereka. Kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka.”
(tribunnews.com, 2015)

Dari sekian permasalahan serius dari isu Palestina, isu pengungsi Palestina perlu menjadi salah satu prioritas. Hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah pengungsi sangat terkait erat dengan hak-hak dasar bangsa Palestina.

Upaya Pemerintah

Pemerintah Indonesia turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan pengungsi Palestina. Kehadiran negara merupakan elemen penting dalam mencari solusi ragam permasalahan rakyat Palestina. Urgensi peran pemerintah Indonesia terlihat dalam sejumlah kebijakan atau kegiatan yang dilakukan.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Amman dan Palestina memberikan bantuan kendaraan media ke kamp pengungsi Palestina di wilayah Talbiyah, Yordania. Kamp tersebut menampung setidaknya 25.000 pengungsi Palestina. Bantuan ini merupakan dukungan yang lahir dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerja sama dengan Jordan

Hashemite Charity Organization (JHCO) dan Medical Aids for Palestine (MAP).²⁹⁸

Model bantuan lain yang dilakukan pemerintah Indonesia terlihat dengan bantuan peningkatan kapasitas. Tidak bisa dipungkiri telah banyak ragam kegiatan/program yang diselenggarakan dalam bentuk bantuan teknis bagi rakyat Palestina oleh Pemerintah Indonesia. Secara khusus, salah satu model bantuan teknis yang diberikan kepada pengungsi Palestina adalah diadakannya program peningkatan kapasitas dengan tema “International Training of Trainers on Business Planning for Women in Refugee Camps: Women Empowerment to Achieve Sustainable Development Goals.”²⁹⁹

Komitmen Indonesia selain dalam bentuk bantuan kemanusiaan, hadir juga dalam bentuk komitmen bantuan terhadap organisasi internasional. Bentuk komitmen tersebut yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan UNRWA.

Melalui UNRWA, dalam grafik di bawah ini, Indonesia telah menjadi donor UNRWA sejak tahun 2008. Besaran bantuan yang diberikan Indonesia sifatnya fluktuatif seperti yang terlihat dalam grafik. Komitmen Indonesia melalui forum multilateral PBB UNRWA tersebut yang ditingkatkan di tahun 2020 yang disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam *Extraordinary Ministerial Pledging Conference for UNRWA* bahwa komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan Rp 36,5 Milyar.³⁰⁰ Adapun rincian dari bantuan tersebut adalah masing-masing sebesar USD 1 juta (Rp 14,6 Milyar) kepada UNRWA dan Pemerintah Palestina, serta USD 500.000 (Rp 7,3 Milyar) kepada Palang Merah Internasional.³⁰¹

²⁹⁸ Data diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/i/read/797/berita/kendaraan-medis-bagi-kamp-pengungsi-palestina-kontribusi-kemanusiaan-indonesia> pada 26 November 2020 pukul 10.00 WIB.

²⁹⁹ Data diakses dari <https://www.ayojakarta.com/read/2019/03/06/75/indonesia-sediakan-program-pelatihan-bisnis-untuk-pengungsi-palestina> pada 26 November 2020 pukul 10.15 WIB

³⁰⁰ UNRWA merupakan badan PBB yang menanganin sekitar 5,5 juta pengungsi Palestina yang berada di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon dan Suriah. Data diakses dari <https://republika.co.id/berita/qcev25459/indonesia-komitmen-tingkatkan-bantuan-untuk-palestina>

³⁰¹ Ibid.



Sumber: Laporan Tahunan UNRWA (data olahan peneliti)

Di samping komitmen dalam aspek kemanusiaan, aspek politik terus menjadi perhatian bagi Indonesia. Indonesia terlihat berupaya memanfaatkan posisi sebagai anggota Dewan Keamanan PBB meskipun disadari bahwa banyak sekali tantangan dalam memaksimalkan posisi tersebut. Salah satu momentum yang berusaha dimaksimalkan adalah posisi Indonesia sebagai Presiden DK PBB pada Mei 2019 selama 1 bulan dengan melakukan Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian”. Setidaknya ada 3 poin penting. Pertama, bahwa pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudahkan harapan solusi 2 negara. Kedua, pembangunan pemukiman illegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina. Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.³⁰²

Penekanan dalam aspek politik tidak bisa tidak merupakan garda terdepan dalam penyelesaian masalah Palestina. Usaha Pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya pengembalian para pengungsi Palestina ke wilayahnya terus dilakukan. Salah satunya adalah usaha yang dilakukan melalui KTT Luar Biasa OKI pada Maret 2016. Saat itu, Direktur Jenderal

³⁰² Data diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/251/berita/indonesia-serukan-penghentian-pembangunan-pemukiman-illegal-israel-di-palestina> pada 3 Desember 2020

Kerja Sama Kemlu RI Hasan Kelib menegaskan bahwa pemukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur akan berpengaruh terhadap komposisi demografis.³⁰³

Peran Kelompok Sosial Masyarakat dan Filantropis Individual

Simpaty terhadap isu Palestina bagi bangsa Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi. Peranan kelompok sosial masyarakat dan filantropis individual secara mudah dapat terlihat jelas. Di era sosial media dewasa ini, sangat mudah untuk melihat proses penggalangan donasi bagi Palestina dan tidak terkecuali kepada para pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara. Hal ini tanpa menafikan beragam isu dunia Islam lainnya yang turut menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia dewasa ini.

Dalam tulisan ini hanya mengambil beberapa gambaran kontribusi yang diberikan oleh ragam kelompok sosial masyarakat dan filantropis individual Indonesia terhadap pengungsi Palestina. Gambaran ini untuk menunjukkan bentuk simpaty masyarakat terhadap pengungsi Palestina.

Nusantara Palestina Center (NPC) secara konsisten memberikan perhatian terhadap isu Palestina. Secara khusus dalam isu pengungsi Palestina, berbagai program bantuan terus diberikan lembaga ini. Bantuan yang diberikan pun merupakan hasil donasi dari masyarakat Indonesia yang diserahkan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak.

Salah satu kontribusi yang dilakukan adalah pemberian bantuan sarana prasarana kesehatan dan obat-obatan kepada MAP Yordania diserahkan NPC berkolaborasi bersama KBRI Amman untuk Yordania dan Palestina dan JHCO di kamp Hettin (Zarqa) yang berlokasi di Timur laut Kota Amman, Yordania. NPC sendiri telah memberikan bantuan di 13 kamp pengungsian Palestina di Yordania yang difasilitasi oleh JHCO yang tidak terbatas hanya di sektor kesehatan melainkan juga dalam sektor pendidikan (paket bantuan perlengkapan sekolah), sektor pangan (bantuan sembako).³⁰⁴

³⁰³ Data diakses dari <http://www.teropongsenayan.com/31281-indonesia-akan-dorong-pengembalian-pengungsi-palestina-ke-wilayah-asal> pada 26 November 2020

³⁰⁴ Data diakses dari <https://www.npc.or.id/dihadiri-dubes-ri-npc-salurkan-bantuan-alat-kesehatan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania/>, <https://www.npc.or.id/nusantara-palestina-center-distribusikan-777-paket-bantuan-perengkapan-sekolah-untuk-anak-anak-pengungsi-palestina-di-yordania/>, <https://www.npc.or.id/gandeng-jhco-npc-salurkan-paket-sembako-kepada-pengungsi-palestina-di-yordania/>, dan <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01385165/meski-covid-19-indonesia-terus-beri-dukungan-raturan-pengungsi-palestina-di-yordania-dapat-bantuan?page=2> pada 3 Desember 2020.



Sumber: <https://www.npc.or.id/dihadiri-dubes-ri-npc-salurkan-bantuan-alat-kesehatan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania/>



Sumber: <https://www.npc.or.id/gandeng-jhco-npc-salurkan-paket-semako-kepada-pengungsi-palestina-di-yordania/>

Selain itu, Lembaga kemanusiaan lain seperti Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) mengungkapkan komitmen batuan dalam penanganan pengungsi Palestina di Libanon dengan bekerja sama bersama Human Charity for Relief and Development (HCRD) dalam bantuan berupa mobil ambulans, pemeliharaan pengelolaan air minum dan sembako. Data di 2015 menunjukkan bahwa lembaga ini konsisten memberikan bantuan bagi pengungsi Palestina di Libanon, Suriah, dan Turki selain bantuan langsung kepada masyarakat Palestina di Gaza dan wilayah Yerusalem (Al Aqsa).³⁰⁵

Filantropis individual juga tidak bisa diindahkan dalam kontribusi terhadap pengungsi Palestina. Hal ini ditunjukkan oleh Dato Sri Tahir yang

³⁰⁵ Data diakses dari <http://www.dakta.com/news/887/indonesia-bantu-pengungsi-palestina-rp-918-juta> pada 26 November 2020

memberikan bantuan terhadap UNRWA sebesar Rp 20 Miliar. Dirinya mengatakan bahwa “Saya tidak bisa membayangkan orang tinggal di tenda-tenda 10-15 tahun. Ini adalah bencana kemanusiaan. Setiap orang sebagai anggota dunia ini, kita punya tanggung jawab.” (Dato Sri Tahir)³⁰⁶

Tantangan ke Depan

Dari berbagai kontribusi yang diberikan Indonesia baik di level pemerintah, kelompok sosial masyarakat maupun individual menunjukkan simpati terhadap isu pengungsi Palestina. Perhatian tersebut tidak hanya terlihat dari ragam aktor melainkan dari sebaran sektor kontribusi yang diberikan mulai dari sektor politik dan diplomasi baik bilateral maupun multilateral (Pemerintah Indonesia), hingga sektor sosial-kemanusiaan (Pemerintah Indonesia, kelompok sosial-kemasyarakatan dan filantropis individual). Tidak bisa dipungkiri bahwa simpati bangsa Indonesia membutuhkan daya tahan dan konsistensi. Hal ini adalah bentuk solidaritas bangsa Indonesia dengan berbagai latar belakang baik yuridis, historis, ideologis, kemanusiaan, dan sebagainya. Usaha mempertahankan perhatian terhadap Palestina sebagai sebuah prioritas menjadi hal yang penting tanpa mengindahkan komitmen kita secara domestik.

Tentunya, ke depan, berbagai tantangan dihadapi dalam penanganan isu Palestina khususnya pengungsi. Pemerintah Indonesia yang telah melakukan berbagai jalan dalam advokasi isu Palestina sejauh ini perlu untuk masuk lebih dalam isu pengungsi Palestina khususnya faktor Israel. Tekanan diplomatik secara multilateral terus perlu didorong disebabkan masalah pengungsi Palestina sangat berkaitan erat dengan sikap dan kebijakan asertif yang ditunjukkan Tel Aviv. Kemudian, kemerosotan jumlah bantuan internasional melalui UNRWA juga menjadi poin kritis dalam penanganan pengungsi Palestina. Hal ini yang perlu menjadi bahan advokasi Indonesia secara global melihat peran penting UNRWA dalam penanganan masalah kemanusiaan pengungsi Palestina di sejumlah negara. Selain pemerintah, peran kelompok sosial kemasyarakatan dan filantropis individual Indonesia sangat penting untuk memberikan bantuan secara legal formal.

³⁰⁶ Data diakses dari <https://investor.id/international/dato-sri-tahir-sumbang-rp-20-miliar-untuk-pengungsi-palestina> pada 26 November 2020

Rekomendasi

1. Indonesia perlu mempertimbangkan kemungkinan memaksimalkan penyaluran bantuan ekonomi dan keuangan ke pengungsi Palestina melalui lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri yang telah diakui reputasinya. Penyaluran ini berguna selain untuk memanfaatkan jejaring lembaga kemanusiaan dalam negeri dalam persoalan Palestina, juga untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja lembaga-lembaga kemanusiaan tersebut dalam membantu persoalan Palestina. Selain itu, pemanfaatan lembaga-lembaga kemanusiaan dalam negeri akan berguna bagi pemerintah untuk mendapatkan data riil lembaga-lembaga kemanusiaan Palestina di Indonesia untuk menghindari penyalahgunaan sumbangan yang berkaitan dengan aspek finansial khususnya yang berkaitan dengan pengungsi.
2. Pemerintah perlu meningkatkan kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* termasuk lembaga terpercaya di level lokal dan memastikan bantuan yang diberikan sifatnya tepat guna. Bantuan yang sifatnya *demand driven* dan tidak terikat juga penting serta sifatnya yang berkesinambungan menjadi catatan penting.
3. Lembaga-lembaga kemanusiaan di Indonesia perlu tanpa lelah mendorong lembaga-lembaga internasional untuk tetap merawat usaha-usaha mencari solusi atas persoalan pengungsi Palestina di berbagai negara
4. Negara-negara muslim yang terlibat dalam berbagai lembaga internasional berbasis dunia Islam sudah sepatutnya mempertimbangkan penguatan kapasitas para pengungsi Palestina di berbagai negara mereka sebagai bekal persiapan Palestina merdeka.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK DASAR KELOMPOK RENTAN DI PALESTINA

Selayang Pandang Kelompok Rentan Palestina

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih dari dunia internasional atas dampak pendudukan Israel terhadap Palestina adalah kondisi kelompok-kelompok rentan. Kelompok rentan sendiri merupakan individu atau kelompok tertentu yang paling terdampak oleh perubahan buruk dari situasi dan kondisi kesehatan, mental, budaya hingga sosial politik. Karenanya, Human Rights Center (HRC) memasukkan 13 kategori mereka yang dianggap rentan, yaitu: (1) wanita dan anak perempuan; (2) anak-anak; (3) pengungsi; (4) pengungsi internal; (5) orang tanpa kewarganegaraan; (6) minoritas nasional; (7) masyarakat adat; (8) pekerja migran; (9) orang cacat; (10) orang tua; (11) orang HIV positif dan korban AIDS; (12) bangsa Romawi / Gipsi / Sinti; dan (13) kaum lesbian, gay, dan transgender.³⁰⁷

Dampak perang telah mengakibatkan banyak di antara rakyat Palestina menjadi rentan, baik secara mental, hingga sosial politik. Kajian ini akan menganalisis lebih dalam bagaimana situasi kelompok-kelompok rentan di Palestina, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi mereka. Kajian juga akan dilengkapi dengan sikap Indonesia dalam melihat isu kelompok rentan sebagai sebuah fenomena tersendiri dari konflik Palestina-Israel. Namun untuk kepentingan universalitas isu, kelompok rentan yang dimaksud dalam kajian ini terbatas hanya pada beberapa kategori yang termasuk dalam 13 kategori oleh HRC di atas. Beberapa kategori tersebut antara lain; anak-anak, perempuan, dan orang-orang lanjut usia. Walaupun Palestina juga

³⁰⁷ Chapman, Audrey & Carbonetti, Benjamin. (2011). Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *Human Rights Quarterly*. 33. 682-732. 10.1353/hrq.2011.0033.

merupakan wilayah dengan pengungsi terbanyak di dunia, pengungsi tidak dimasukkan dalam kajian kelompok rentan ini.³⁰⁸

Kondisi Anak-Anak di Palestina

Anak-anak membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus karena keadaan mereka yang rentan dan rapuh.³⁰⁹ Selain karena rentan terhadap pelecehan dan pengabaian, anak-anak juga sering kali tidak memiliki sarana untuk membela diri mereka dari ancaman-ancaman yang menyertai mereka. Kerentanan ini nyatanya juga ditambah oleh fakta bahwa tidak semua negara memiliki perangkat yang baik dalam mengenali kerentanan anak-anak, apalagi sehubungan dengan hak asasi dan pelanggaran yang menimpa mereka.³¹⁰

Dalam konteks Palestina, keadaan anak-anak sebagai dampak dari pendudukan Israel sangat memprihatinkan. Sebuah survei tahun 2007 menunjukkan bahwa 17% penduduk Palestina terdiri dari anak-anak di bawah usia lima tahun, dan 46% di bawah usia 15 tahun. Pada tahun 2012, diperkirakan Jalur Gaza memiliki populasi 1,7 juta di mana lebih dari 800.000 di antaranya adalah anak-anak.³¹¹ Menurut laporan UNICEF pada 2018, jumlah anak-anak Palestina meningkat pesat menjadi sekitar 2,3 juta orang dari total 4,8 juta penduduk Palestina dengan rincian 1,3 juta anak di Tepi Barat dan 1 juta anak di Jalur Gaza.³¹²

Dari total tersebut, kematian bayi di Palestina termasuk yang terendah di kawasan dengan 17 kematian per 1.000 kelahiran, tetapi masih banyak

³⁰⁸ Perihal pengungsi, sila merujuk hasil kajian CDC al-Sharq dengan judul "Palestina dan Persoalan Pengungsi"

³⁰⁹ Pius Suratman Kartasasmita. *Studi Literatur Tentang Kerentanan Sosial (Social Vulnerability)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Katolik Parahyangan. 2018. Hal. 12.

³¹⁰ http://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/11973_Chapter_5.pdf, diakses pada 24 Desember 2020.

³¹¹ <https://www.ibtimes.com/israels-blockade-gaza-puts-palestinian-childrens-health-risk-report-702821>, diakses pada 24 Desember 2020.

³¹²

<https://www.unicef.org/sop/media/341/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>. Diakses pada 24 Desember 2020.

yang harus dilakukan untuk mengurangi kematian neonatal yang merupakan dua pertiga dari kematian bayi dan setengah dari angka kematian balita.³¹³ Keadaan ini diperburuk oleh fakta Hanya 40% bayi yang mendapat ASI eksklusif dalam enam bulan pertama kehidupan mereka. Di lingkungan sekolah dasar, cukup sedikit anak yang dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Namun, pada usia 15 tahun, hampir 25% anak laki-laki dan 7% anak perempuan putus sekolah. Selain itu, hampir 5% dari anak usia 10-15 tahun dan satu dari tiga penyandang distabilitas berusia 6-9 tahun tidak bersekolah. Anak-anak dari rumah tangga yang rentan, anak-anak penyandang distabilitas, dan anak laki-laki berusia 14-15 tahun semuanya dipengaruhi oleh tantangan yang mencakup seluruh sistem pendidikan terkait dengan inklusivitas, kualitas dan kesetaraan layanan pendidikan di Palestina.³¹⁴

Banyak anak Palestina menghadapi kendala sehari-hari dalam mengakses pendidikan. Menurut perkiraan Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi Palestina, saat ini ada lebih dari 8.000 anak dan 400 guru yang membutuhkan pengamanan untuk mengakses sekolah dengan aman di Tepi Barat. Di Hebron, anak-anak Palestina yang tinggal dan / atau belajar di sekolah di Kota Tua harus berjalan melewati empat pos pemeriksaan militer Israel hanya untuk mencapai sekolah.³¹⁵

Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada total 94% anak-anak Palestina yang dapat mengakses sekolah tingkat dasar tetapi hanya sekitar 61% di antara mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ini juga dipengaruhi oleh bangunan sekolah yang hancur, jumlah siswa difabel yang cukup banyak, serta kapasitas tenaga pengajar yang belum maksimal.

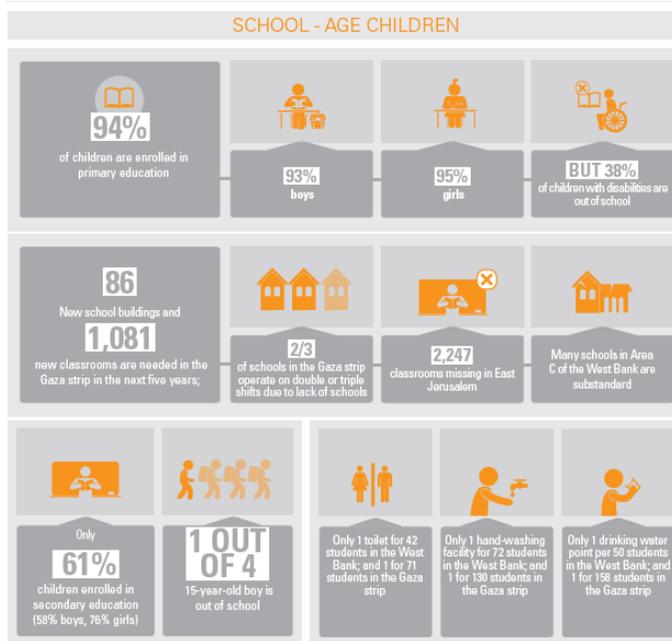
Di jenjang kepemudaan, tingkat pengangguran kaum muda usia 15-29 tahun bahkan mencapai 39%. Situasi yang memprihatinkan ini dibarengi dengan paparan remaja terhadap risiko perilaku negatif, putus sekolah,

³¹³ Paola Perezniето, dkk. *Tackling childhood poverty and vulnerability: making the Palestinian National Cash Transfer Programme more effective for children*. Overseas Development Institute and United Nations Children's Fund 2014. Hal.1-12.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Ibid.*

tingkat kekerasan yang tinggi, partisipasi sipil dan politik yang lemah, serta berbagai bentuk ketidakadilan dan pengucilan, terutama yang berdampak pada remaja dari kelompok rentan dan terpinggirkan.³¹⁶



Fakta Anak Usia Sekolah di Palestina

(Sumber: UNFPA)

Perempuan sebagai bagian Kelompok Rentan di Palestina

Sebagaimana anak-anak, Konflik Israel-Palestina telah berdampak serius pada wanita Palestina. Ratusan ribu wanita terbuang dan terusir dari tanah air mereka setelah Perang Arab-Israel 1948, dan lebih banyak lagi selama Perang 1967. Mayoritas mereka dan keturunannya masih hidup sebagai pengungsi. Banyak tindakan yang diambil oleh Militer Israel (*Israel Defence Forces / IDF*) telah mempengaruhi fisik, psikologis, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ekonomi perempuan Palestina.³¹⁷ Siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Berita Ma'an pada tahun 2007 melaporkan

³¹⁶ Waseem Burghal. *Analytical Study: Status of Vulnerable and Marginalized Youth Groups in Palestine*. United Nations Population Fund, UNFPA. Hal. 6.

³¹⁷ http://www.mediterraneas.org/article3_id_article_47.html, diakses pada 25 Desember 2020.

bahwa banyak wanita mengalami kekerasan psikologis dan seksual di pos pemeriksaan Israel di Beit Safafa. Kasus-kasus ini melaporkan penggeledahan telanjang paksa dengan dalih tindakan pengamanan.³¹⁸

Masalah perempuan di Palestina cukup problematik. Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi perubahan gradual kebijakan terhadap perempuan, khususnya mengenai hak yang setara akan pendidikan dan hak sipil politik di Palestina.³¹⁹ Namun, sebagian besar perempuan di Palestina masih mengalami diskriminasi berlipat, misalnya perempuan dengan distabilitas lebih rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dibanding laki-laki.³²⁰

Kelompok perempuan tidak hanya mengalami perlakuan buruk dari Israel semata, tetapi juga perlakuan yang diperoleh dari dalam rumah tangga mereka sendiri di Palestina. Data yang dihimpun beberapa waktu lalu menunjukkan 63% wanita muda yang sudah menikah mengalami kekerasan oleh suaminya, dan 95% wanita tidak merekomendasikan pernikahan dini untuk putri mereka.³²¹ Riset lain menunjukkan pernikahan anak diperkirakan berkontribusi pada tingginya angka perceraian di wilayah Palestina di mana 67% perempuan yang bercerai pada 2018 berusia antara 18 hingga 29 tahun.³²²

Perlakuan diskriminatif atas perempuan juga berlanjut di masa-masa dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Selama 2020, wanita mewakili hampir 60% pekerja di sektor kesehatan di Palestina dengan kurang lebih

³¹⁸ Khoulood Daibes: Israeli soldiers forcing women to submit to strip searches at checkpoints". Ma'an News Agency. June 30, 2007. Diakses pada 25 Desember 2020.

³¹⁹ Perempuan di Palestina mengisi sekitar 60% dari populasi siswa di lembaga pendidikan, dan 23% di civitas akademik universitas. El-Far, Mira. Anton. Vershina, Natalia. *Stuck in the middle of what?": the pursuit of academic careers by mothers and non-mothers in higher education institutions in occupied Palestine*. (2020). DO - 10.1007/s10734-020-00568-5.

³²⁰ Waseem Burghal. *Women And Girls With Disabilities: Needs of Survivors of Gender-Based Violence And Services Offered To Them*. Ministry of Foreign Affairs of Denmark and UNFPA. Hal. 5. Diakses pada 25 Desember 2020 di https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities_0.PDF.

³²¹ <https://www.jpost.com/Middle-East/PA-Outlaws-Child-Marriage-606874>. Diakses pada 25 Desember 2020.

³²² *Ibid.* Untuk situasi-situasi terkini mengenai perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, sila akses di <https://www.aljazeera.com/features/2014/3/25/upsurge-in-palestinian-honour-killings>.

70% pekerja kesehatan di garis depan (12.558 perawat dan petugas medis di Tepi Barat dan Jalur Gaza).³²³

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan tentang paparan dan mitigasi yang diperlukan untuk semua pekerja di bidang ini. Saat wabah berkembang, secara tidak langsung beban perawatan menjadi lebih berat terutama untuk perawatan kesehatan garis depan wanita dan pekerja sosial. Ini juga menyiratkan bahwa mereka mungkin menghadapi potensi terpapar Covid-19 lebih besar dibanding para pekerja lainnya. Sayangnya, kebijakan kesehatan terkait perempuan di tengah Pandemi belum cukup maksimal.

Salah satu contohnya, pada 25 April 2020 total 1.971 orang tinggal di fasilitas karantina di Gaza; 42,8% adalah perempuan.³²⁴ Organisasi wanita telah memetakan dan mendokumentasikan kebutuhan wanita dan anak perempuan di fasilitas karantina di Gaza yang meliputi obat-obatan, makanan tertentu (misalnya sayuran dan susu), telepon seluler, dan perlengkapan kebersihan/haid. Meskipun peralatan “kebersihan” disediakan oleh aktor yang berbeda, menurut perempuan di fasilitas karantina, peralatan tersebut dianggap tidak cukup untuk durasi penuh 21 hari (dapat diperpanjang hingga 28 hari). Banyak perempuan dan gadis yang mengungkapkan perlunya konseling psikososial terutama bagi mereka yang sakit atau terpisah dari anak-anak mereka, di mana ibunya dikarantina dan anak-anaknya berada di Gaza.³²⁵

³²³ COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming Findings of a Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine.

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/06/UNWOMENRPT_090620.pdf. Diakses pada 25 Desember 2020.

³²⁴ <http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Eng.-25-4.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2020.

³²⁵ COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming Findings of a Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine.

https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/06/UNWOMENRPT_090620.pdf. Diakses pada 25 Desember 2020.

Buruknya Penanganan Kalangan Lanjut Usia

Kelompok lanjut usia adalah salah satu kelompok paling rentan di dunia yang membutuhkan penanganan spesial. Hal ini tidak hanya sebagai respons atas kebutuhan mereka tetapi juga sebagai jalan pengakuan dan apresiasi atas peran mereka dalam membangun masyarakat dan membawa perubahan di masanya masing-masing. Menurut WHO, kelompok lanjut usia adalah mereka yang berada pada kisaran umur 60 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah lanjut usia telah mencapai kurang lebih 900 juta orang di seluruh dunia.³²⁶ Banyak di antara kelompok lanjut usia ini mengalami berbagai kekerasan baik psikis maupun fisik tetapi kurang mendapat perhatian lebih dari para pengambil kebijakan.

Dalam konteks Palestina, yang patut menjadi perhatian adalah kelompok perempuan lanjut usia yang lebih rentan statusnya dibanding laki-laki. Situasi lainnya menunjukkan bahwa pada 2019, 8% dari kelompok lanjut usia terpapar setidaknya satu bentuk kekerasan oleh keluarga mereka baik di dalam maupun di luar rumah.³²⁷ Lalu sebagian kelompok lanjut usia lainnya mengalami kerentanan fisik dan tidak mendapat banyak perhatian.

Secara umum, selama konflik Palestina-Israel, ada beberapa bentuk kekerasan yang baik langsung maupun tidak langsung di alami oleh kelompok lansia, antara lain:³²⁸

1. Banyak di antara kelompok lanjut usia menderita karena kekerasan ekonomi sebagai akibat pelarangan mengakses lahan dan sawah mereka;
2. Lahan penghasilan paling penting bagi kelompok lanjut usia di Palestina adalah agrikultur. Selain itu, Banyak kalangan ini yang tidak

³²⁶ 10 Facts on Ageing and Health, WHO 2017. <https://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/>. Lihat juga Ageing, the United Nations 2019. <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html>. Diakses pada 26 Desember 2020.

³²⁷ Palestinian Central Bureau of Statistics. Preliminary results of the Violence Survey in Palestinian Society 2019. Ramallah, Palestine 2019. <http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2020.

³²⁸ Inas Tina. (2019). *Violence Against the Elderly: Palestine*. ditranslasi dari bahasa Arab oleh Work With Words. Hal. 42-45.

mendapatkan akses kesehatan yang sepatutnya karena tercegah mengakses wilayah Jerusalem Timur yang dikenal memiliki fasilitas kesehatan cukup baik;

3. Selanjutnya, mereka juga mengalami dampak dari okupasi berkepanjangan sepanjang hidup mereka yang mengguncang psikologis, karena tidak hanya menimpa mereka sejak muda, namun juga keluarga dan orang sekitar mereka;
4. Kalangan lanjut usia juga secara langsung mengalami penyerangan fisik baik oleh penduduk Israel maupun dari anggota militernya.³²⁹

Tantangan Kelompok-Kelompok Rentan di Palestina

Pada 15 Desember 2020, UN-OCHA dan Otoritas Palestina mengeluarkan rilis kampanye bersama untuk membantu 1,8 juta kelompok rentan Palestina dengan total nilai USD 417 juta. Dari 2,45 juta warga Palestina (47% dari populasi penduduk Palestina), 1,8 juta di antaranya adalah kelompok rentan.³³⁰ Perhatian dunia internasional dan Otoritas Palestina ini pada kelompok rentan memang sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih, melihat bahwa kelompok ini merepresentasikan mayoritas penduduk Palestina.

Pada 2019, angka anak muda di Palestina mencapai 39,3% yang berusia di bawah 15 tahun dengan proporsi 36,3% di Tepi Barat dan 41,4% di Jalur Gaza. Kemudian, jumlah perempuan Palestina merepresentasikan setengah dari jumlah populasi Palestina. Dengan kata lain, dengan jumlah penduduk Palestina pada pertengahan 2020 yang mencapai sekitar 5,10 juta

³²⁹ Inas Tina,Hal. 42-45.

³³⁰ UN-OCHA, *346,000 Filastini intaqalu min al-Hajah al-Mutawasitah ila al-Hajah al-Massah, Ithlaq Khutha bimablaq Qadruh 417 Milyoun Dular li al-Wafa' al-Hajah al-Insaniyah li al-Filistiniyiin*, terakhir diakses 22 Desember 2020, <https://www.ochaopt.org/ar/content/346000-palestinians-pushed-moderate-severe-need-assistance>

jiwa terdiri dari 2,59 juta jiwa laki-laki (51%) dan 2,51 juta jiwa perempuan atau 49%.³³¹

Selanjutnya, jumlah kelompok lansia di Palestina hanya 3.3% dari total penduduk Palestina.³³² Secara umum tantangan utama yang dihadapi kelompok rentan ini adalah okupasi Israel. Tindakan pelanggaran dan usaha menghalangi rakyat Palestina untuk mendapatkan hak asasi mereka. Anehnya pelanggaran Israel ini disahkan oleh undang-undang Israel, misalnya undang-undang yang membolehkan penangkapan anak-anak di bawah umur karena tuduhan melempar batu dengan hukuman kurungan dari lima bulan hingga 20 tahun penjara.³³³

Pelanggaran dan kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina terus berlanjut hingga saat ini tanpa bisa dihentikan oleh dunia internasional. Bagian ini secara khusus menyoroti penderitaan dan tantangan yang dihadapi anak-anak, perempuan dan distabilitas yang menjadi kelompok paling rentan kehilangan hak asasi mereka di tengah konflik bersenjata dan okupasi Israel.

Perampasan Hak Asasi Anak

Ada tujuh hak asasi anak yang dijamin dunia internasional yang kerap dilanggar oleh Israel yaitu: hak hidup, hak mendapatkan tingkat kehidupan yang layak, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak bermain dan berwisata, hak keamanan jiwa dan kedamaian,³³⁴ hak pendidikan,³³⁵ dan hak kebebasan.³³⁶

³³¹ Pusat Informasi Palestina, Info.wafa.ps, *Waqi' al-Mar'ah fi Falastin*, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/wgZh

³³² The Palestine Strategic Report 2018-2019, *Markaz al-Zaitunyah li al-Dirasaat*, Beirut 2020, hal. 75.

³³³ *Mu'tamar al-Usari al-Dauli al-Tsalits, Athfal al-Filistiniyun wa Siyasat al-I'tiqal al-Israiliyah ..*, 2017, hal. 35.

³³⁴ Ahmad al-Hilah, *Markaz al-Zaitunyah li al-Dirasat wa al-Istisarat, Muanat al-Thifl al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili*, Beirut, 2008, hal. 19-24.

³³⁵ Hayat al-Duda, *Markaz al-Zaitunyah li al-Dirasat wa al-Istisarat, Muanat al-Thalib al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili*, Beirut, 2015, hal. 5-9.

³³⁶ Ahmad al-Hilah, *op.cit*, hal. 19-24.

Dari Penangkapan Hingga Pembunuhan

Anak-anak Palestina menghadapi kompleksitas permasalahan dan tantangan yang merampas hak asasi mereka yang telah dirampas oleh Israel. Pusat Informasi Palestina mencatat pada sejak meletusnya Intifadha hingga akhir tahun 2004, anak-anak Palestina menjadi korban kekerasan Israel. Setidaknya lebih 676 anak di bawah 18 tahun dibunuh, lebih 9000 anak terluka, dan ribuan anak-anak Palestina lainnya mengalami keguncangan jiwa akibat mengalami dan menyaksikan peristiwa yang mengerikan berupa kekerasan oleh Israel.

Kemudian, Israel juga menangkap lebih 3.000 anak-anak Palestina dalam peristiwa Intifadha. Sekitar 300 anak-anak Palestina yang berada dalam penjara Israel dengan kondisi yang tidak manusiawi dalam tahanan.³³⁷ Terkait dengan penangkapan anak di bawah umur, pada tahun 2014 di Jerusalem Timur terjadi penangkapan 792 anak Palestina.

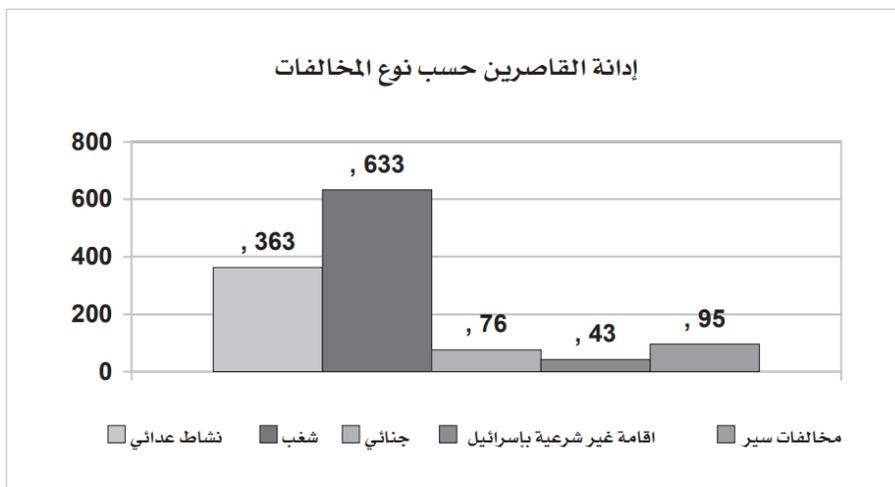
Sementara di akhir tahun 2015, 398 anak di bawah umur yang ditangkap di wilayah Jerusalem Timur.³³⁸ Penangkapan anak di bawah umur kebanyakan karena kasus tuduhan melempar batu kepada aparat tentara Israel. Penangkapan dilakukan dengan tanpa mendapatkan hak pendampingan dari pengacara. Mereka mendapatkan ancaman hukuman mulai dari 5 bulan, 3 tahun, 5 tahun hingga 20 tahun.

Bentuk hukuman yang diberikan tidak hanya ancaman hukuman kurungan, tetapi juga menyasar ke sektor lain yang berkaitan dengan anak, seperti kemungkinan lain adalah membayar denda bagi orang tua anak yang melanggar, terancam dicabut segala alokasi seperti beasiswa, jaminan negara, dan jaminan hari tua dan janda bagi orang tua yang melanggar

³³⁷ *Markaz al-Ma'lumat al-Wathani al-Filastini - Wafa, Waqi' al-Thifl al-Filistini fi Dzilli Ittifaqiyah Huquq al-Thifl*, terakhir diakses 25 Desember 2020, t.ly/mm6l

³³⁸ Nasrin Alyan, *I'tiqal Qashirin Filistiniyin fi al-Aradhi al-Muhtallah wa Ihalatihim ila al-Qadha*, presentasi pada konferensi tawanan ketiga di Ramallah - Palestina, hal. 31.

aturan.³³⁹ Pada tahun 2015, sebanyak 1.210 kasus anak Palestina dijatuhi hukuman di Mahkamah Militer Israel dan ada lima dakwaan utama dinisbahkan kepada anak di bawah umur yaitu kerusakan, aktivitas permusuhan, pelanggaran lalu lintas, tindak pidana, tinggal ilegal di dalam Israel.³⁴⁰



Jumlah Dakwaan Anak di bawah umur di Mahkamah Militer Israel
(Sumber: Konferensi Tawanan Ketiga di Ramallah, 2017)

Laporan Komisi Urusan Tawanan (*Commission of Detainees and Ex-Detainees Affair*) menyebutkan selama tahun 2019 setidaknya jumlah anak-anak di bawah umur 16 tahun yang ditangkap Israel mencapai 889 anak. Jumlah tawanan anak-anak di penjara Israel mencapai sekitar 200 anak di akhir tahun 2018.³⁴¹

Laporan *Al Mezan Center for Human Rights* menyebutkan bahwa dalam *Great Return March* menunjukkan adanya kesengajaan Israel untuk membunuh anak-anak Palestina dan membuat mereka menderita. Data *Al Mezan* menyebutkan dari 217 warga Palestina yang dibunuh oleh Israel sebanyak 48 orang anak Palestina, 48% di antaranya meninggal akibat

³³⁹ Nasrin Alyan, *op.cit*, hal. 36.

³⁴⁰ Nasrin Alyan, *ibid*, hal. 42.

³⁴¹ Rasd.news, *Fi dzikr Istisyhad al-Durra, Athfal Filistin Baina Rahy al-Rashah wa al-Faqr*, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/fkb5

terluka pada bagian tubuh atas mereka dan 83% dari mereka terkena tembakan senjata.³⁴²

Penahanan terhadap anak-anak ini juga berdampak pada karakter dan kepribadian anak. Dalam penelitian terhadap 316 orang yang ditahan, 167 di antaranya adalah anak-anak (berusia 12-19 tahun) yang ditahan di penjara Israel antara tahun 2000–2015. Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan ini berdampak pada sikap dan kepribadian mereka seperti kepribadian yang relatif tertutup dengan orang lain dan menarik diri dari lingkungan, kesehatan mental yang terganggu, dan peningkatan anak-anak yang mengonsumsi alkohol dan merokok.³⁴³

Kekerasan terhadap Anak dari Lingkungan hingga Sekolah

Kekerasan dan pelanggaran yang dilakukan Israel juga sangat berdampak pada pola asuh dan pendidikan anak-anak yang berkembang di Palestina. Masyarakat Palestina banyak menghadapi permasalahan sosial ekonomi seperti terus bertambahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hak-hak dasar pada berbagai elemen masyarakat Palestina yang tidak terpenuhi, dan kompleksitas masalah yang dihadapi lembaga-lembaga Palestina dalam berbagai tingkatannya dalam mengembangkan dan melakukan tugas resminya. Semua ini semakin menambah kompleksitas krisis kemanusiaan Palestina secara umum dan secara khusus terhadap anak-anak Palestina.³⁴⁴

Salah satu dampak dari krisis sosial ekonomi yang dihadapi penduduk Palestina ini adalah meningkatnya tingkat kekerasan terhadap anak di dalam keluarga Palestina. Data UNICEF tahun 2018 menyebutkan 61% pelajar Palestina mengalami kekerasan fisik di sekolah, sementara itu 91% anak-

³⁴² *Al Mezan Center for Human Rights, Intihak Quwat al-Ihtilal al-Israili Bihag al-Athfal fi Masiirat al-Audah wa Faq al-Hishar fi Qitha Gaza*, terakhir diakses 25 Desember 2020, <http://mezan.org/uploads/files/1585556648506.pdf>

³⁴³ Dr. Firdaus Abdelrabbah al-Isa, *al-I'tiqal wa Atsruh ala al-Simat al-Shakhshiyah al-Athfal wa Shihhatihim an-Nafsiyah*, 2017, Hal. 61-71.

³⁴⁴ Wafa, *op.cit*, terakhir diakses 25 Desember 2020, t.ly/mm6l

anak Palestina mengalami kekerasan psikologis dan hukuman fisik. Hal ini juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik anak-anak Palestina.³⁴⁵ Penghancuran rumah-rumah Palestina, sumur air dan infrastruktur oleh Israel juga berdampak luas terhadap pengusiran 3.120 anak pada tahun 2018. Anak-anak Gaza juga terhalangi mendapatkan layanan kesehatan akibat pembatasan mobilitas tersebut.³⁴⁶

Fenomena Putus Sekolah

Fenomena putus sekolah yang terjadi di semua jenjang pendidikan Palestina telah menjadi kekhawatiran publik Palestina. Sektor pendidikan menjadi senjata utama menghadapi hegemoni dan okupasi Israel. Fenomena ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, dan pemuda-pemuda Palestina menjadi eksploitasi pasar kerja Israel, serta meningkatnya tindakan amoral dan kejahatan. Tingkat putus sekolah dasar tahun ajaran 2010/2011 di Palestina mencapai 1,3% siswa dan siswi 0.6%, sementara putus sekolah SMP mencapai 3.2% siswa dan 3.3% siswi. Data UNICEF tahun 2018 menyebutkan ada sekitar 25% anak laki-laki pada umur lima belas tahun, dan 7% anak perempuan.³⁴⁷ Dari kajian yang dilakukan UNICEF bersama lembaga-lembaga Pendidikan Palestina menunjukkan penyebab fenomena putus sekolah terjadi karena sebab-sebab berikut:

- (1) Guru yang tidak hadir karena terhalang oleh pembatas-pembatas Israel;
- (2) Kekhawatiran keluarga akan keselamatan anak-anak mereka dari militer dan pemukim Yahudi;
- (3) Tekanan dan ancaman militer dan pemukim Yahudi kepada siswa-siswa dalam perjalanan mereka ke sekolah;

³⁴⁵ UNICEF, *al-Athfal fi Daulati Falastin*, terakhir diakses 25 Desember 2020, <https://www.unicef.org/sop/media/346/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>

³⁴⁶ UNICEF, *op.cit*, hal. 10

³⁴⁷ UNICEF, *op.cit*, hal. 8

- (4) Banyaknya pos-pos pemeriksaan dan pembatas militer dalam perjalanan ke sekolah;
- (5) Terancam ditangkap;
- (6) Lokasi sekolah di tempat yang tidak aman;
- (7) Sekolah banyak mendapat serangan dan pemeriksaan militer;
- (8) Banyak sekolah yang ditutup oleh militer;³⁴⁸
- (9) Selain pembatasan mobilitas dan ancaman keamanan, kurangnya fasilitas infrastruktur sekolah juga menjadi penyebab putus sekolah, seperti di Area yang dikuasai Israel, 36% wilayah penduduk tidak memiliki sekolah dasar hal tersebut karena pembatasan yang dilakukan Israel yang menghalangi pembangunan sekolah yang memadai.³⁴⁹

Penderitaan Perempuan Palestina

Perempuan Palestina menghadapi beragam penderitaan dan diskriminasi di berbagai lini kehidupan yang merampas hak-hak asasi mereka; hak sosial, hak ekonomi, hak politik, hak kesehatan dan hak pendidikan. Secara umum semua kelompok perempuan Palestina sangat rentan menghadapi kekerasan dan diskriminasi baik di berbagai tempat seperti tempat kerja, Lembaga, sekolah, dan lingkungan dengan beragam jenis kekerasan mulai dari kekerasan verbal, fisik hingga kekerasan seks. Namun, dua kelompok perempuan Palestina yang paling rentan mendapat diskriminasi dan kekerasan yaitu (1) pengungsi perempuan yang berada di kamp pengungsian dengan kondisi kehidupan yang jauh dari manusiawi.³⁵⁰

³⁴⁸ Hayat al-Duda, *Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisarat, Muana al-Thalib al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili*, Beirut, 2015, hal. 18-19.

³⁴⁹ UNICEF, *al-Athfal fi Daulati Falastin*, hal. 8, terakhir diakses 25 Desember 2020, <https://www.unicef.org/sop/media/346/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>

³⁵⁰ Rima Katanah, Badil, Resource Center for Palestinian Recidency & Refugee Rights, *Haula Muana al-Mar'ah al-Filistiniyah al-Lajiah*, terakhir diakses 28 Desember 2020, <http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item/301-article05.html>

Yang jumlahnya mencapai 1,5 juta pengungsi dan tersebar di 59 camp pengungsian. Dan kelompok (2) adalah perempuan disabilitas, kelompok ini menjadi paling rentan mengalami kekerasan dan perlakuan diskriminasi ganda baik di sekolah, lingkungan maupun di tempat kerja atau oleh orang asing, bahkan jika dibandingkan dengan laki-laki distabilitas, perempuan distabilitas jauh lebih rentan menjadi korban kekerasan dan juga memiliki peluang lebih sedikit untuk menghindari atau keluar dari kekerasan.³⁵¹

Dilihat dari sumber dan pemicunya, mayoritas penderitaan dan diskriminasi ini faktor utamanya adalah okupasi Israel dengan segala derivasinya yang berdampak secara umum pada warga Palestina dan kelompok rentan perempuan pada khususnya³⁵², sebagian lagi dipicu oleh kondisi lingkungan sosial mereka yang masih melakukan diskriminasi terhadap perempuan seperti lingkungan kerja, lembaga, sekolah dan lingkungan keluarga. Faktor kedua ini juga tak lepas dari faktor pertama okupasi Israel. Penjajah Israel oleh PBB dianggap sebagai penghalang utama bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, tak hanya menghalangi kemajuan perempuan Palestina tapi juga menghalangi perempuan Palestina untuk mendapatkan hak asasi manusia mereka yang paling dasar yang dijamin oleh undang-undang internasional.³⁵³

Apa yang dialami dan dihadapi oleh warga Palestina akibat okupasi Israel dengan segala kebijakannya seperti blokade wilayah Palestina baik laut, udara dan darat, mendirikan dinding-dinding pembatas dan membatasi mobilitas barang dan manusia, serta pembatasan air, listrik dan sebagainya, juga dirasakan oleh kelompok perempuan. Bahkan kelompok perempuan dapat dikatakan sebagai kelompok yang paling menderita karena selain itu

³⁵¹ *Markaz Syuun al-Mar'ah - Gaza (Women's Affair Center - Gaza), Al-Unf al-Ladzi Tataarradhu Lahu an-Nisa Dzawatu al-Iqah fi Amakin al-Amal*, Hal. 2.

³⁵² Pusat Informasi Palestina - WAFA - *al-Mar'ah al-Filistiniyah wa al-Ihtilal al-Israili*, terakhir diakses 28 Desember 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3189

³⁵³ Fehah Abdel Hady, *Al-Mar'ah al-Filastiniyah wa Tahaddiyat Mutawashilah*, Al-Watanvoice.com, terakhir diakses 27 Desember 2020, t.ly/UkxG

menghadapi tantangan dan penderitaan akibat okupasi Israel, mereka juga menghadapi tekanan internal dalam keluarga dan lingkungan mereka.

Dampak Okupasi Israel terhadap Hak-Hak Wanita dan Anak Perempuan

Berdasarkan Kesepakatan Oslo tahun 1993 antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel, maka didirikanlah Otoritas Palestina sebagai otoritas yang berkuasa atas wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.³⁵⁴ Kemudian Kesepakatan Oslo Kedua tahun 1995 menyepakati pembagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dipecah menjadi tiga area, yakni Area A, B, dan C.

Area A adalah wilayah yang sepenuhnya baik keamanan maupun administrasi berada di bawah kekuasaan Palestina. Kemudian Area B merupakan wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina secara administrasi, namun sektor keamanannya dikontrol Israel. Sedangkan Area C adalah wilayah yang sepenuhnya dikuasai Israel baik administrasi maupun keamanan.³⁵⁵ Sejatinya sesuai kesepakatan, Area C yang luasnya mencapai 60 persen Tepi Barat akan diserahkan ke Otoritas Palestina, namun yang terjadi hingga saat ini, Israel semakin menguasai total Area C hal ini menghambat Otoritas Palestina untuk melaksanakan regulasinya di Area C juga menghambat tersedianya layanan publik yang sangat penting seperti layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan wanita dan anak perempuan di area yang berisiko dan semua layanan ini tidak disediakan Israel, padahal kesepakatan internasional mensyaratkan layanan-layanan ini.³⁵⁶

³⁵⁴ ESCWA, *Al-Lajnah al-Iqtishadiyah wa al-Ijtima'iyah Li Garby Asia, Al-Wadh' al-Ijtima'iyah wa al-Iqtishadi li An-Nisa wa al-Fatayat al-Filistiniyat*, Beirut, Januari 2019, https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic_compressed.pdf

³⁵⁵ Republika, Indonesia: Palestina Harus Selesai dengan Solusi Dua Negara, 30 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q4vof5366/indonesia-palestina-harus-selesai-dengan-solusi-dua-negara> diakses 27 Desember 2020.

³⁵⁶ ESCWA, *op.cit*, hal. 2.

Pada tahun 2007, Israel memberlakukan blokade darat, laut dan udara yang melumpuhkan Jalur Gaza.³⁵⁷ Selain itu, Israel juga kerap membombardir Gaza yang telah terputus dari dunia luar, semua faktor-faktor ini melahirkan bencana kehidupan di antaranya meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, krisis listrik yang berkepanjangan, dan rusaknya kualitas air dan sanitasi.³⁵⁸ Laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mendapati blokade Israel terhadap jalur Gaza membuat tidak mungkin bagi penduduk Palestina di sana membangun ekonomi mereka. Dan mengingatkan wilayah kecil itu dalam waktu tidak lama bisa menjadi tidak layak dihuni jika keadaan sekarang tidak diatasi. Dan yang paling terdampak, menurut laporan UNCTAD adalah kelompok perempuan dan orang muda.³⁵⁹

Berbagai kebijakan dan pelanggaran Israel ini juga berdampak terhadap tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan Palestina. Kebijakan Israel misalnya membatasi suplai listrik ke Gaza yang mengakibatkan terjadinya krisis listrik berdampak pada meningkatnya tingkat kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bahkan menghadapi ancaman kematian akibat krisis listrik. Penelitian *Women's Affair Center – Gaza* (2017) menunjukkan kondisi ekonomi dan kehidupan wanita yang telah menikah memburuk dengan persentase 82,92%, kondisi kesehatan dan lingkungan mereka juga menurun dengan persentase 79,69%. Akibat lain dari krisis listrik, beban rumah wanita yang telah menikah juga semakin bertambah 81,86% sementara gadis Palestina menghadapi beban akibat krisis listrik dengan persentase 74,12%.

³⁵⁷ Republika.co.id, Kondisi Gaza yang Kian tak Menentu Sejak Blokade Israel 2007, 1 Juli 2019, terakhir diakses 27 Desember 2020, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/07/01/ptxwmd320-kondisi-gaza-yang-kian-tak-menentu-sejak-blokade-israel-2007>

³⁵⁸ ESCWA, *op.cit*, hal. 2.

³⁵⁹ Voaindonesia.com, PBB: Akibat Blokade Israel, Jalur Gaza Bakal Tak Layak Huni Tahun 2020, 14 September 2018, terakhir diakses 27 Desember 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-akibat-blokade-israel-jalur-gaza-bakal-tak-layak-huni-tahun-2020/4570828.html>

Tak hanya itu, bahkan akibat krisis listrik, kelompok ini juga menghadapi ancaman kematian dengan terbakar (65,75%) dan perceraian sebesar 74,41%, juga menghalangi kelompok ini untuk lebih banyak bereaksi dan berintegrasi (68.93%).³⁶⁰ Sementara pada sektor kerja, perempuan Palestina menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi. Statistik Palestina pada kuartal kedua tahun 2020 menyebutkan angka pengangguran kerja mencapai sekitar 321 ribu (118 ribu di Tepi Barat dan 203 ribu di Jalur Gaza) dengan perbedaan yang jauh antara Jalur Gaza dan Tepi Barat yaitu 15% dan 49% di Jalur Gaza. Dan di tengah pandemik Covid-19, angka pengangguran ini meningkat menjadi 26.6% pada kuartal kedua tahun 2020.³⁶¹

Kelompok Disabilitas

Angkat disabilitas di Gaza tahun 2017 terhitung tinggi dengan angka tertinggi yaitu disabilitas laki-laki yang mencapai 72.425 orang atau sekitar 7.6, sementara disabilitas perempuan mencapai 55.537 orang atau sekitar 6%.³⁶² Sementara itu data UNICEF 2018 menyebut 3 hingga 7% anak Palestina menderita disabilitas dan 42% anak disabilitas memiliki lebih dari satu jenis disabilitas.³⁶³ Pada sektor kerja dan ekonomi, partisipasi perempuan disabilitas di dunia kerja terhitung lebih sedikit 4% dibanding partisipasi kerja penderita disabilitas laki-laki yang mencapai 21%. Sementara tingkat diskriminasi terhadap perempuan disabilitas mencapai 85% dan 92% adalah kekerasan psikologis, dengan bentuk-bentuk kekerasan yang beragam seperti diskriminasi di dalam keluarga yang mencapai 81,6% dalam bentuk bentakan, penghinaan 81.3%, melihat rendah dan menghina yang antara

³⁶⁰ Dr. Shady al-Kafaranah, *Markaz Syuun al-Mar'ah - Gazza 2017, Azmah Inqitha al-Kahruba wa al-Unf al-Usari fi Qitha Gazza*, hal. 6

³⁶¹ Masarat.ps, *Nahwa Siyasat Tuhmi al-Fiat al-Hissyah fi al-Aradhi al-Filistiniyah fi Dzilli Jaihah Kuruna*, hal. 2-3, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/t9wp

³⁶² *Markaz Syuun al-Mar'ah -Gaza, Al-Unf al-Ladzi Tata'arradhu lahu al-Nisa Dzawat al-Iaqah fi Amakin al-Amal*, hal. 3

³⁶³ UNICEF, *op.cit*, hal. 14.

74% - 76%. Sementara kekerasan fisik mencapai 65% dengan bentuk kekerasan fisik seperti pukulan dan dorongan 81.6% dan 80.3% dan kekerasan seksual sebesar 13.3%. Pada sektor kerja, perempuan disabilitas juga menghadapi kekerasan ekonomi mencapai 85.3%, di antaranya adalah larangan menggunakan barang-barang milik mereka, tidak mendapatkan biaya harian, tidak mendapatkan kepemilikan dan hak harta warisan.³⁶⁴

Advokasi terhadap Hak-Hak Kelompok Rentan dari Dunia Internasional

Di kalangan internasional, isu tentang konflik Palestina bukanlah hal yang baru. Bagi sebagian parlemen, organisasi internasional, isu tersebut menjadi bagian agenda penting. Banyak komunitas internasional baik pemimpin negara, parlemen, partai politik maupun organisasi yang menjadikan isu Palestina menjadi salah satu prioritas mereka dan melakukan advokasi terhadap rakyat Palestina, khususnya kelompok rentan yang terdiri dari anak-anak, perempuan, lansia dan difabel.

Advokasi terhadap Hak Anak-Anak Palestina

Setidaknya ada 500 dan 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di pengadilan militer Israel setiap tahun. Sejak tahun 2000, lebih dari 10.000 anak telah menjadi sasaran sistem pengadilan militer, yang tidak menjamin hak mereka atas proses hukum, menyoroti sistem keadilan dua tingkat di wilayah Palestina yang diduduki — pengadilan sipil Israel untuk pemukim Israel, dan militer Israel pengadilan untuk orang Palestina.

Menyoroti hal ini, dunia internasional baik secara personal, organisasi atau parlemen memberikan perhatian mendalam dalam merespons pelanggaran yang dilakukan pihak penjajah ini. UNICEF melalui program Perlindungan Anak memastikan bahwa anak-anak Palestina, terutama yang paling rentan, mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan

³⁶⁴ *Markaz Syuun al-Mar'ah -Gaza, Al-Unf al-Ladzi Tata'arradhu lahu al-Nisa Dzawat al-laqaq fi Amakin al-Amal, op.cit. hal. 2-4>*

pelanggaran berat agar anak-anak lebih mampu mencapai potensi pendidikan mereka, mendapat jaminan hasil kesehatan yang lebih baik, dan menjalankan peran mereka sebagai anggota masyarakat, komunitas, dan keluarga yang produktif. Setiap anak Palestina memiliki hak di lingkungan tempat mereka tinggal untuk dapat mencapai potensi bawaan mereka.³⁶⁵

Pada tahun 2017, Gereja Kristen dan Persatuan Gereja Kristus AS mengadopsi resolusi di Majelis Umum dan Sinode Umum mereka, mengadvokasi hak-hak anak-anak Palestina yang hidup di bawah pendudukan militer Israel.³⁶⁶ Resolusi ini meminta perhatian pada penderitaan anak-anak yang hidup di bawah pendudukan militer Israel yang berkepanjangan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza.³⁶⁷ Secara khusus, resolusi ini menyebutkan situasi traumatis anak-anak yang hidup dengan ketakutan terus-menerus akan penangkapan, penahanan, dan kekerasan di tangan pasukan Israel. Mereka menyerukan Menteri Umum dan Presiden Persatuan Gereja Kristus untuk mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Israel dan Duta Besar Israel, meminta mereka untuk menjamin hak-hak dasar proses hukum dan menerapkan larangan mutlak terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap anak-anak yang ditahan oleh otoritas Israel. Resolusi ini menegaskan bahwa, dari saat penangkapan, semua operasi dan prosedur yang diberlakukan pada anak-anak Palestina harus dilakukan sesuai dengan standar peradilan anak internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, yang diratifikasi Israel pada tahun 1991.³⁶⁸

³⁶⁵ Child protection. <https://www.unicef.org/sop/what-we-do/child-protection>

³⁶⁶ Resolutions Regarding Children Under Israeli Military Occupation.

https://www.globalministries.org/resolutions_regarding_children_under_israeli_military_occupation

³⁶⁷ 2017 General Assembly: A Call for the Christian Church (Disciples of Christ) to Advocate for the Rights of Children Living Under Israeli Military Occupation.

<https://ga.disciples.org/wp-content/uploads/2017/04/GA-1719-Rights-of-Children-Living-Under-Israeli-Military-Occupation.pdf>

³⁶⁸ 2017 General Synod: A Call for the United Church of Christ to Advocate for the Rights of Children Living Under Israeli Military Occupation.

<https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/globalministries/pages/7857/attachments/original>

Pada tanggal 30 April 2019, anggota kongres AS Betty McCollum mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU tersebut diupayakan untuk memangkas atau menghalangi dana AS yang dikucurkan ke Israel untuk memfasilitasi pelanggaran HAM yang berdampak pada anak-anak. Tujuan regulasi tersebut adalah mempromosikan serta melindungi HAM anak-anak Palestina dan memastikan dana pembayar pajak di AS tidak digunakan untuk mendukung penahanan militer terhadap anak-anak Palestina dan untuk menyediakan USD 19 juta untuk organisasi non-pemerintah (LSM) yang memantau pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan penahanan anak-anak oleh militer Israel dan penyediaan perawatan fisik, perawatan psikologis, dan emosional serta dukungan untuk anak-anak Palestina yang menjadi korban penahanan, pelecehan, dan penyiksaan militer Israel.³⁶⁹

Selain persatuan gereja, anggota kongres, beberapa LSM yang membela hak-hak anak juga turut memberikan advokasi untuk Palestina. Defence for Children International – Palestine dan War Child, juga memberikan advokasi terhadap anak-anak Palestina yang ditahan oleh militer Israel. Organisasi tersebut mengampanyekan untuk memajukan hak dan perlindungan bagi anak-anak Palestina menggunakan strategi advokasi.³⁷⁰ Bekerja sama dengan organisasi mitra lainnya telah membantu meningkatkan usia mayoritas tahanan anak Palestina di Israel dari 16 menjadi 18 tahun. Mereka juga memberikan bantuan hukum kepada anak-anak Palestina yang ditahan dan diadili dalam sistem hukum Israel. Unit ini telah mewakili rata-rata 150 kasus di pengadilan militer Israel dan telah

[I/1510667205/Resolution_-_The_Rights_of_Children_Living_Under_Israeli_Military_Occupation.pdf?1510667205](https://www.globalministries.org/advocate_for_the_rights_of_palestinian_children)

³⁶⁹ Advocate for the Rights of Palestinian Children.

https://www.globalministries.org/advocate_for_the_rights_of_palestinian_children

³⁷⁰ NO PLACE FOR A CHILD: PROTECTION FOR PALESTINIAN CHILDREN.

<https://www.warchildholland.org/projects/no-place-for-a-child/>

mengembangkan reputasi berhasil membatasi waktu yang dihabiskan anak-anak dalam penahanan.³⁷¹

Sebelumnya pada tahun 2015, Palestina menulis surat terbuka³⁷² yang isinya menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan untuk anak-anak Palestina, merujuk pada situasi kritis yang sedang berlangsung di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan kenyataan pahit yang dihadapi oleh anak-anak Palestina sebagai akibat langsung dari pendudukan militer Israel.

Advokasi terhadap Hak Perempuan Palestina

Setidaknya lebih dari 10.000 wanita Palestina telah ditahan oleh otoritas Israel sejak tahun 1967. Saat ini, 47 wanita menderita kondisi kehidupan yang tak tertahankan di penjara-penjara Israel, hak asasi manusia dasarnya dicabut, termasuk hak privasi dan hak atas pendidikan. Tidak hanya itu, Palestina masih memiliki budaya patriarki yang kuat, stereotip gender, dan sikap sosial bias gender yang telah membatasi hak perempuan dan kesetaraan gender.

Hal tersebut memicu perhatian mendalam dunia internasional untuk lebih menyoroti hak-hak perempuan Palestina. Pusat Urusan Wanita (WAC),³⁷³ adalah organisasi nirlaba Palestina independen yang didirikan pada tahun 1991 untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam masyarakat Palestina, dengan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengatasi masalah dalam konteks kehidupan mereka yang sulit. Dalam laporan mereka menyebutkan

³⁷¹ Palestine - Defence for Children International. https://www.dci-palestine.org/how_we_work

³⁷² State of Palestine calls on international community. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176128/>

³⁷³ ADVOCATING FOR WOMEN RIGHTS IN PALESTINE. <https://www.cidse.org/2016/06/07/advocating-for-women-rights-in-palestine/>

bahwa perempuan Gaza mengalami kesulitan terkait dengan memburuknya situasi politik, ekonomi dan sosial, yang mempengaruhi semua aspek kehidupan Palestina. Misi WAC adalah memberdayakan perempuan, melakukan penelitian tentang kebutuhan mereka, dan mengadvokasi hak-hak mereka, berpedoman pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional, partisipasi masyarakat, non-diskriminasi, dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan martabat bagi semua wanita.

Persatuan Umum Wanita Palestina dan Koalisi Wanita Nasional untuk Implementasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) di Palestina, dengan dukungan dari PBB, menerapkan kebijakan yang diperlukan atau mengadopsi langkah-langkah, intervensi dan prosedur untuk memulai harmonisasi hukum dalam mengatasi segala bentuk permasalahan yang dihadapi perempuan Palestina. Dalam laporannya pada tahun 2017 meminta agar negara Palestina (1) mengamandemen dan mengubah peraturan perundang-undangan, mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan isi CEDAW dan menempatkan mekanisme yang sesuai untuk pelaksanaannya, (2) untuk melakukan survei dan statistik khusus tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas, (3) Mendesak negara Palestina untuk meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, mengakui Konvensi dalam Undang-Undang Dasar dengan ketentuan yang jelas dan eksplisit, dan menerapkan mekanisme yang sesuai untuk pelaksanaannya.³⁷⁴

Selanjutnya ada Pusat Bantuan dan Konseling Hukum Wanita (WCLAC), sebuah organisasi non-pemerintah Palestina, nirlaba, dan independen yang berusaha untuk mengembangkan masyarakat Palestina yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial. Visi WCLAC adalah untuk memberdayakan wanita Palestina sehingga

³⁷⁴ Report on The status of women and girls in the State of Palestine.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PSE/INT_CEDAW_NGO_PSE_29031_E.pdf

mampu hidup dalam masyarakat Palestina yang adil dan setara di mana mereka menikmati semua hak asasi manusia mereka. Didirikan di Yerusalem pada tahun 1991, organisasi ini memiliki status konsultatif khusus dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC).³⁷⁵ Dengan menempe visi feminis berdasarkan kesetaraan dan keadilan sosial, WCLAC memainkan peran penting dalam menangani kekerasan berbasis gender dalam masyarakat Palestina di bawah pendudukan dengan mendokumentasikan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional yang diberlakukan oleh pendudukan Israel.

Pada dasarnya, organisasi-organisasi Palestina maupun dunia yang menyuarakan tentang Hak Perempuan Palestina memiliki visi dan misi yang hampir sama, yaitu memberikan advokasi, memberdayakan perempuan Palestina serta menghapuskan diskriminasi terhadap mereka.

Advokasi terhadap Hak Lansia Palestina

Kelompok rentan Palestina selanjutnya adalah lansia. Dalam laporan UNFPA (Dana Penduduk PBB) tentang kekerasan yang dialami oleh kaum lansia Palestina meningkat yang diakibatkan pendudukan Israel. Studi tahun 2005 menunjukkan bahwa 30,1% individu dalam masyarakat Palestina mengalami kekerasan politik oleh pasukan atau pemukim Israel. Selain itu, 15,1% individu terpapar kekerasan politik di daerah pemukiman tempat mereka tinggal, dan 53,6% keluarga Palestina terpapar kekerasan terhadap properti dan ekonomi oleh pasukan atau pemukim Israel. Meskipun angka-angka ini tidak dipisahkan berdasarkan usia, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa para lansia, yang merupakan bagian integral dari

³⁷⁵ PALESTINIAN WOMEN UNDER PROLONGED ISRAELI OCCUPATION.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Palestine-UPR_web-2-5.pdf

struktur masyarakat Palestina, menjadi sasaran kekerasan politik dalam skala besar.³⁷⁶

Menyikapi hal tersebut, badan PBB seperti UNRWA, UNHCR memiliki program perlindungan bagi para pengungsi lansia Palestina³⁷⁷. Selain PBB, LSM internasional HelpAge³⁷⁸ juga berfokus terhadap lansia, dan menjadi satu-satunya organisasi internasional yang hadir di wilayah pendudukan Palestina (oPt) yang berfokus pada kebutuhan lansia, yang menjadi minoritas penting dengan kebutuhan khusus dalam hal perlindungan, perawatan kesehatan, dan mata pencaharian.

Peran Indonesia bagi Kelompok Rentan Palestina

“Tidak terpenuhinya Hak-hak dasar rakyat Palestina selama ini yang diperparah dengan rencana pembangunan pemukiman illegal baru di tanah Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM yang harus segera diselesaikan,”
(Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi)³⁷⁹

Pernyataan Menlu RI Retno LP Marsudi disampaikan dalam High Level Segment Dewan HAM PBB ke 43 di Jenewa, Swiss. Hal ini merupakan bentuk permasalahan dasar yang tidak pernah selesai dalam masalah Palestina yang terus diperparah oleh bentuk arogansi Israel terhadap tanah Palestina. Artinya, tekanan fisik maupun non-fisik secara konsisten terus dilakukan Israel. Hal ini tidak bisa dilepaskan juga dari instrumen hak-hak

³⁷⁶ Violence Against the Elderly: Palestine.
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/violence_against_the_elderly_palestine.pdf

³⁷⁷ CONDITION OF ELDERLY IN PALESTINIAN OCCUPIED TERRITORIES, COUNTRIES IN ECONOMIC TRANSITION AMONG ISSUES RAISED IN AGEING ASSEMBLY.
<https://www.un.org/press/en/2002/soc4614.doc.htm>

³⁷⁸ Gaza. <https://www.helpage.org/tags/gaza/>

³⁷⁹ Data diakses dari <https://news.okezone.com/read/2020/02/25/18/2173952/menlu-ri-angkat-isu-perempuan-hak-rakyat-palestina-di-sidang-ham-pbb>

dasar yang meliputi perhatian terhadap isu perempuan, anak dan lansia khususnya di Palestina sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius.

Pada bagian ini membahas bagaimana peran dan kontribusi Indonesia dalam merespon isu tersebut. Berbicara mengenai peran dan kontribusi Indonesia maka tidak hanya akan mengetengahkan langkah strategis yang diambil di level pemerintah melainkan juga bagaimana kontribusi yang dijalankan kelompok-kelompok *civil society*.

Peran dan Kontribusi Pemerintah Indonesia



Pernyataan Menlu RI Retno LP Marsudi dalam kegiatan 'International Training of Trainers on Business Planning for Women in Refugess Camp'

Di level pemerintah, penyelenggaraan 'International Training of Trainers on Business Planning for Women in Refugee Camp: Women Empowerment Program to Achieve SDGs' di Amman, Yordania pada 4-8 Maret 2019 yang dilakukan Kementerian Luar Negeri RI dan KBRI Amman menunjukkan komitmen Indonesia dalam merespon isu perempuan Palestina.³⁸⁰

Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari 3-Year Activity Plan dalam The 3rd Conference on Cooperation of East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) pada 2018. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan ini juga memperkuat komitmen kerja sama Selatan-

³⁸⁰ Data diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01307781/indonesia-beri-pelatihan-untuk-perempuan-palestina-di-kamp-pengungsi>

Selatan Indonesia dalam konteks The New Asian-African Partnership (NAASP) 2015.³⁸¹

Kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan terkait dengan kewirausahaan, business mentorship dan pengembangan model bisnis skala kecil melalui business model canvas. Salah satu poin menarik dari kegiatan ini adalah pelibatan berbagai latar belakang baik pengurus, relawan ataupun pemangku kepentingan yang fokus kepada penanganan perempuan dan pengungsi Palestina seperti UNRWA, Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO), East Jerusalem Young Men Christian Association (YMCA), Al Thouri Silwan Women's Centre, dan Wafaa Palestina. Keterlibatan ragam organisasi tersebut menunjukkan bahwa semangat kolaborasi perlu dibentuk dalam merespon isu perempuan Palestina.³⁸²

“Anak-anak merupakan korban paling rentan akibat okupasi dan konflik yang terjadi di wilayah Palestina, yang menuntut tanggung jawab masyarakat internasional untuk mencari solusi bagi masa depan mereka.”

Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil tetap RI untuk PBB di New York, AS

Dukungan lain ditunjukkan Pemerintah Indonesia khususnya dalam isu anak-anak Palestina. Pernyataan di atas merupakan bagian dari pertemuan virtual Indonesia dengan Save The Children yang membahas mengenai nasib anak-anak Palestina sebagai dampak dari penjajahan Israel.³⁸³

³⁸¹ Ibid.

³⁸² Ibid.

³⁸³ Data diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200815/19/1279670/ri-minta-tanggung-jawab-internasional-atas-nasib-anak-anak-palestina> dan <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1558/berita/indonesia-bersama-save-the-children-bahas-nasib-anak-anak-palestina-di-forum-pbb>

Peran dan Kontribusi Civil Society

Peranan *civil society* Indonesia dalam merespon isu-isu kelompok rentan Palestina secara umum merupakan bagian penting dari skema bantuan kemanusiaan yang menjadi perhatian. Namun, memang disadari bahwa program yang menysasar khusus kepada ketiga isu kelompok rentan tersebut cukup terbatas dalam informasi terbuka yang didapatkan. Namun demikian, tetap ada beberapa bentuk peran dan kontribusi yang dimainkan oleh kelompok ini di Indonesia.

Nusantara Palestina Center (NPC) secara aktif memberikan perhatian terhadap aspek pendidikan anak-anak Palestina khususnya dengan dibangunnya sekolah gratis di Gaza, Palestina. Pembukaan Sekolah gratis 'TK Nurani Indonesia' menjadi kontribusi nyata yang diberikan. Pengelolaan sekolah ini dilakukan bekerja sama dengan NGO lokal di Gaza yaitu Daarul Sabil Foundation.³⁸⁴

“Sejak tahun 2016 silam, sekolah ini full menggratiskan segala kegiatan dan keperluan sekolah, di antaranya gratis biaya sekolah, seragam, sepatu, tas, alat tulis hingga transportasi antar jemput siswa-siswi,”
(Abdillah Onim, Pendiri dan Dewan Pembina NPC)

Di samping NPC, lembaga kemanusiaan ACT juga berkontribusi dalam isu rentan ini. Distribusi makanan siap saji yang diolah di Dapur Umum Indonesia yang ditujukan bagi siswa Sekolah Dasar Shohadaa Al Sakikh Ridwan menjadi gambaran nyata.³⁸⁵ Tidak bisa dipungkiri bentuk kontribusi

³⁸⁴ Data diakses dari <https://www.npc.or.id/peduli-pendidikan-anak-anak-palestina-npc-buka-sekolah-gratis-di-jalur-gaza/>

³⁸⁵ Data diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1453250/15/senyum-siswa-di-gaza-palestina-sambut-relawan-act>,
<https://www.liputan6.com/global/read/3669116/indonesia-siapkan-beasiswa-perguruan>

konkret terkait dengan isu anak-anak Palestina adalah aspek pendidikan. Aspek ini yang terlihat dari fokus bantuan yang diberikan dua lembaga baik NPC maupun ACT. Di samping itu, hal juga terkait pendidikan yang telah berjalan lebih dahulu, yaitu orang tua asuh dan beasiswa pendidikan baik yang digagas oleh lembaga kemanusiaan, pemerintah Indonesia maupun institusi pendidikan di Indonesia.³⁸⁶

Selain bentuk bantuan, simpati yang ditunjukkan masyarakat Indonesia kepada perempuan Palestina juga ditunjukkan melalui partisipasi kelompok *civil society* seperti Adara Relief Internasional dalam gerakan internasional seperti gerakan 'Kita Semua Maryam'. Gerakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap perempuan Palestina melalui kampanye #kitasemuamaryam #weareallmary #weareallmaryam. Partisipasi luas dari publik dan ragam stakeholders menunjukkan perhatian yang begitu besar dari masyarakat terkait dengan isu ini yang berlangsung dari 28 Januari hingga 8 Maret 2019.³⁸⁷

Adara Relief Internasional tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu lembaga kemanusiaan Indonesia yang secara aktif mengampanyekan isu perempuan dan anak Palestina. Lembaga ini menggagas terbentuknya Forum Ormas dan Lembaga Perempuan Indonesia untuk Palestina (FOL-PIP) berikut juga membentuk crowdfunding website dalam menggalang donasi masyarakat Indonesia untuk Palestina.³⁸⁸

Lembaga lainnya seperti Wanita Persatuan Umat Islam (PUI), Wanita Al Irsyad, Muslimat Mathlul Anwar, Al Muslimat Al Wasliyah, Muslimat Dewan Dakwah Islam Indonesia, Salimah, Wanita PUI, Wanita PERTI, IGRA

tinggi-untuk-ribuan-warga-palestina dan <https://suarapalestina.com/post/7419/rumah-yatim-indonesia-luncurkan-program-orang-tua-asuh-tahap-i>

³⁸⁶ Data diakses dari <https://www.bsmi.or.id/post/orang-tua-asuh-untuk-akses-pendidikan-warga-palestina/7>

³⁸⁷ Data diakses dari <https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZnvjEK-indonesia-deklarasikan-kita-semua-maryam-untuk-perempuan-palestina>

³⁸⁸ Data diakses dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1535908/15/ormas-perempuan-indonesia-pertegas-komitmen-bantu-palestina?showpage=all>

Nasional, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia (Alpind) dan Adara Relief Internasional menggagas berdirinya Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al Quds dan Palestina (KPIQP) pada 17 Agustus 2020. Keberadaan aliansi ini sebagai bentuk afiliasi dari Koalisi Global untuk Al Quds dan Palestina di Turki.³⁸⁹

Bentuk lain kontribusi Indonesia dapat terlihat dari bidang seni dan budaya. Karya baik berupa puisi, novel, dan cerpen karya sastrawan Indonesia seperti Helvy Tiana Rosa menjadi wujud bentuk lain perhatian dalam isu kelompok-kelompok rentan Palestina. Puisi 'Seorang Ibu yang mendobrak Pulazi' dan Novel Hayya menjadi jembatan dalam membangun kesadaran solidaritas Indonesia dan Palestina.

Di samping itu, aktivis Palestina Abdillah Onim juga menjadi contoh menarik dalam kontribusi terhadap isu perempuan, anak dan lansia Palestina. Melalui akun Youtube-nya menjadi jembatan penting dalam membangun solidaritas bahkan komunikasi antara Indonesia dengan Palestina. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020 di Gaza melalui penyelenggaraan upacara dan berbagai lomba penting dalam menjaga hubungan Indonesia-Palestina.³⁹⁰

Secara umum sangat terbatas sumber informasi yang menerangkan kontribusi Indonesia baik di level pemerintah maupun kelompok *civil society* terkait dengan isu perempuan, anak dan lansia Palestina. Keterbatasan sumber informasi terbuka dapat dilihat sebagai bentuk masih terbatasnya bentuk kontribusi yang dilakukan Indonesia terhadap pembangunan sumber daya manusia khususnya terhadap ketiga kelompok rentan tersebut.

Dari penggambaran di atas terlihat meskipun sifatnya masih sangat terbatas, perhatian terhadap kelompok perempuan dan anak-anak masih

³⁸⁹ Data diakses dari <https://pui.or.id/ormas-dan-lembaga-perempuan-indonesia-bentuk-koalisi-membela-kemerdekaan-palestina/>

³⁹⁰ Data diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/19/anak-anak-palestina-di-gaza-ikuti-lomba-17-an-dari-balap-karung-hingga-ambil-koin-dalam-tepung> dan YouTube Abdillah Onim Official

ditemukan yang dilakukan Indonesia secara khusus. Hal ini berbeda dengan terhadap kelompok rentan seperti lansia. Namun, dapat disadari bahwa kelompok rentan seperti lansia merupakan isu yang berkelindan dengan isu-isu dan bantuan lain seperti dalam konteks bantuan kesehatan, bantuan persiapan menghadapi musim dingin, bantuan pangan, air bersih, listrik dan sebagainya.

Keterbatasan yang ditemukan tersebut dapat disebabkan beberapa hal. Pertama, bahwa Indonesia baik di tingkat pemerintah maupun *civil society* cenderung fokus memberikan simpati dan bantuan kepada aspek yang lebih umum terkait dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan. Artinya, belum secara konsisten melihat perlunya ada fokus perhatian terhadap pemberdayaan perempuan dan anak. Sebenarnya gagasan mengundang perempuan Palestina seperti yang pernah digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam rangka memberikan bantuan pelatihan di Indonesia pada tahun 2012 perlu menjadi satu catatan menarik. Skema Kerja Sama Selatan-Selatan dengan menyertakan kerja sama lintas sektor serta melibatkan keberadaan mitra pembangunan sudah seharusnya dapat dilakukan Indonesia.

Kedua, kita dihadapkan pada realitas sentralisasi perhatian *civil society* Indonesia dalam isu perempuan, anak-anak dan lansia Palestina masih terbatas kepada inisiasi kelompok Islam. Hal ini yang menjadi kerja berat karena ketiga isu rentan yang ada dan berkembang adalah sebuah isu universal. Tantangan membangun kesadaran dari kelompok *civil society* tanpa melihat ragam latar belakang menjadi keniscayaan dalam merespon ketiga isu kelompok rentan Palestina.

-oOo-

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

- aawsat.com, *Tawaqquf mahathah taulid al-kahruba al-wahid fi Gaza an al-amal*, shorturl.at/plRU9, terakhir diakses, 21 Agustus 2020.
- Al-Jihaz al-Markazi li Al-Ihsha' al-Filastin* (PCBS), *Ada' al-Iqtishad al-Filastini 2019*, Mei 2020.
- Al-Jihaz al-Markazi li Al-Ihsha' al-Filastin* (PCBS), *al-Faqr Mutaaddid al-Ab'ad fi Falastine*, 2017, Juni 2020.
- Donna Lee and Brian Hocking (2010) "Economic Diplomacy" in Robert A. Denemark (ed). *The International Studies Encyclopedia*.,Vol. II pp 1216-1227 Wiley Blackwell
- http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9252. Diakses 22 Agustus 2020.
- http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/unemployment-by-gov2000-2019-3-e.html. Diakses pada 24 Agustus 2020
- <http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3787> terakhir diakses 23 Agustus 2020.
- http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/507/default.aspx. Diakses pada 24 Agustus 2020.
- <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/14/indonesia-opens-honorary-consulate-for-palestine-in-ramallah.html> Diakses pada 27 Juli, 2020.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1152968/dua-produk-dari-palestina-ini-bebas-bea-masuk-ke-indonesia>. December 6, 2018 diakses pada 1 Agustus 2020
- <https://dunia.tempo.co/read/1228415/pebisnis-indonesia-diajak-berinvestasi-di-palestina/full&view=ok>. Diakses pada 25 August 2020
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128641/indonesia-fasilitasi-ekspor-produk-palestina#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%20US%243%2C5%20juta>.Diakses pada 28 Juli 2020.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190725/12/1128641/indonesia-fasilitasi-ekspor-produk-palestina#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,mencapai%20US%243%2C5%20juta>.Diakses pada 29 Juli 2020.
- <https://fakta.news/internasional/melalui-program-ukm-indonesia-tegaskan-komitmen-ke-palestina> diakses pada 25 Agustus 2020
- <https://institute.global/advisory/israeli-palestinian-trade-depth-analysis>. Diakses pada 27 Juli, 2020
- <https://kemlu.go.id/amman/en/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>. Diakses pada 27 Juli, 2020

<https://pflp.ps/post/7709/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9> Diakses 22 Agustus 2020.

<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/understanding-agriculture-palestine-and-how-aid-can-help>. Data diakses pada 1 Agustus 2020

<https://republika.co.id/berita/q4vof5366/indonesia-palestina-harus-selesai-dengan-solusi-dua-negara> diakses 25 Agustus 2020.

<https://republika.co.id/berita/qbdk09459/uni-1.eropa-sokong-pendanaan-ukm-palestina-terdampak-covid19> diakses pada 25 Agustus 2020

<https://socialsciences.mcmaster.ca/kubursi/ebooks/water.htm>. Diakses pada 24 Agustus 2020.

<https://socialsciences.mcmaster.ca/kubursi/ebooks/water.htm>. diakses pada 24 Agustus 2020

<https://suarapalestina.com/post/9294/gaza-ekspor-tiga-ton-strawberry-ke-negara-teluk>. 05 Dec 2019. diakses pada 1 Agustus 2020

<https://tirto.id/kurma-dan-zaitun-di-antara-perdagangan-bebas-indonesia-palestina-cK7z>. Diakses pada 27 Juli 2020.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2015d1_en.pdf. Diakses pada 24 Agustus 2020

https://www.cjme.org/fs_174. Diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.danchurchaid.org/articles/palestinian-olive-trees-are-being-destroyed-danchurchaid-is-planting-new-ones> diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.ecoi.net/en/document/1006795.html>. Diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.grin.com/document/358860>. Diakses pada 24 Agustus 2020.

<https://www.kavlaoved.org.il/en/areasofactivity/palestinian-workers/>. Diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.middleeastmonitor.com/20180926-gaza-farmers-have-dates-but-have-nowhere-to-sell-them/> diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.msn.com/id-id/berita/other/sadis-tank-tank-israel-tembaki-gaza-tiap-malam-ratusan-bayi-terancam/ar-BB18bJyJ?li=AAfuke3> terakhir diakses 21 Agustus 2020.

<https://www.ochaopt.org/content/gaza-s-fisheries-record-expansion-fishing-limit-and-relative-increase-fish-catch-shooting> Diakses pada 24 Agustus 2020.

<https://www.palestineconomy.ps/en/Article/149/Hebron-Grape-Profits-Reach-35-Million-per-Year>. diakses pada 24 Agustus 2020

<https://www.voaindonesia.com/a/menlu-indonesia-tegaskan-komitmen-bantu-palestina/4616847.html>. Diakses pada 27 Juli, 2020.

- <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/palestinian-economic-dependence-on-israel>. diakses pada 24 Agustus 2020
- <https://www.worldbank.org/en/country/westbankandgaza/publication/economic-update-april-2020>. Diakses pada 24 Agustus 2020.
- <https://zatoun.com/more-about-olives-and-olive-oil-in-palestine/>. Diakses pada 24 Agustus 2020
- Implementing Arrangement of The Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The State of Palestine on Trade facilitation for Certain products Originating Form Palestinian Territories. Pdf.
- Institut Kajian Politik Ekonomi Palestina (MAS), *Tasyji' al-Itimad ala Mashadir al-Taqa' al-Mutajaddidah. Hal Tuhadzi Hajiz al-Syiarat*, 2015.
- Mankiw, Gregory. 2006. Makroekonomi. Ed.6, Jakarta: Erlangga.
- Maria Rita, Jurnalis Tempo dalam Webinar Mengukur Kesehatan Ekonomi Palestina pada 15 Agustus 2020
- Markaz Al-Zaituniyah li Ad-Dirasat wa al-Istisyarat, Beirut, *Al-Taqrir al-Istratiji al-Filistini 2018-2019* pdf.
- McCombie, J.S.L dan A.P Thilwall, 1994, Economic Groth and the Balance of Payment Constraint. New York: St Martins.
- PCBS, *Ihsha'at al-Tijarah al-Kharijiah al-Marshudah al-Sila' al-Khadamat 2018*, Oktober 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.126/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
- Peraturan menteri Keuangan No.11/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
- Peraturan presiden nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina Tentang Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu yang Berasal Dari Wilayah Palestina
- Pusat Kajian PLO, *Syuun Filistiniah, Al-Shinaah al-Tabaiyah: Al-Haimanah Al-Isti'mariyah (1967-1993) wa Muhawalat al-Infikak Anha*, edisi 278-279 (2019-2020)
- Rashid, H.U, 2005. Economic Diplomacy in South Asia. Address to the Indian Economy & Business Update
- Shehab News, 90% *min mashani gaza muhaddah bitawaqquf anil amal bisabab taqaqquf mahatha al-Kahruba*, shorturl.at/nyT17 terakhir diakses 21 Agustus 2020.
- Sukirno, Sadono. 2008. Teori Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith, 2008, Pembangunan Ekonomi, ed.9, Jakarta: Erlangga

Woolcock, S. 2007a. "Theoretical Analysis of Economic Diplomacy" dalam Bayne, N & Woolcock, S (eds). *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiations in International*

BAB II

Al Abd, George Taufik. *Ma'had Abhats al-Siyasat al-Iqtishadiyah al-Filastiny (MAS), al-Iqtishad al-Filastiny: al-Thariq ila al-Mustaqbal*, 2016

Aljazeera.net, *Waqfu Idarah Tramp Tamwil al-Unraw.. Ma al-Ahdaf?* 9 September 2018, <https://bit.ly/33IIIDR6>

Anadolu Agency, *35.4 Milyar Dular Musaadat Dauliah Munzu Ta'sis Al-Sulthah Al-Filistiniah*, 13 Februari 2020, <https://bit.ly/35vsOtJ>

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47095082.html>

Brookings Doha Center, Sultan Barakat dan Farras Masri, *In'asy Amaliah l'adah l'mar Gaza al-Mutaatsirah*, Agustus 2017

Country Evaluation Brief. Report No. 5/2017. Chr. Michelsen Institute. Juni, 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181112122459-120-345838/bantuan-qatar-masuk-palestina-pns-gaza-akhirnya-gajian>

<https://www.dailysabah.com/politics/palestine-receives-turkish-aid-to-stem-coronavirus-pandemic/news>

<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/peternak-ikan-palestina-belajar-teknologi-inseminasi-buatan-di-indonesia>

<https://english.wafa.ps/Pages/Details/90701>

https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/palestine_en

<https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/nih7pp/dapat-bantuan-palestina-akhirnya-bisa-bayar-gaji-pns>

<https://www.jica.go.jp/english/office/topics/190208.html>

<https://en.jhco.org.jo/SubDefault.aspx?PagelD=186&MenuId=110>

Kajian Akademik: Pembentukan *Single-Agency* Kerja Sama Selatan-Selatan dan Traingular Indonesia, Tim Koordinasi Nasional KSST, (Jakarta: 2017), https://ktln.setneg.go.id/pdf/publikasi_01_12072018.pdf.

https://kemlu.go.id/portal/en/read/23/halaman_list_lainnya/the-palestinian-issue

<https://kemlu.go.id/amman/id/news/1271/indonesia-hadiri-pertemuan-cepad-pertama-di-tanah-palestina>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Beri-Pelatihan-tentang-Cyber-Crime-dan-Digital-Forensic-bagi-Polisi-Palestina.aspx>

<https://mepc.org/journal/missing-mark-foreign-aid-palestinians>

Markaz al-Zaituniah Li al-Dirasaat wa al-Istisyyarat, al-Taqrir al-Istratiji al-Filastiny 2018-2019.

Markaz al-Zaituniah, In'ikas Jaihah Corona Ala al-Wad'aen al-Filastiny wa al-Israily, 2020.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/227580-indonesia-palestina-dan-politik-luar-negeri>

Nathan J. Brown. *Time to Rethink, But Not Abandon, International Aid to Palestinians*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace. 2018.

Nora Lester Murad. *Donor Complicity In Israel's Violations of Palestinian Rights*. al-shabaka: the palestinian policy network. 2014.

NN.PS, Ajzu al-Muwazanah Aktsar min 1,4 milyar dular, Curuna Yukabbidu al-Iqtishad al-Filastiny Khasair Tuqaddir bi 3 Milyarat Dular, 26 Agustus 2020, <https://nn.ps/news/Report-1/2020/08/26/326897/>

<https://www.npc.or.id/bayar-gaji-asn-palestina-uni-eropa-salurkan-donasi-sebesar-23-juta-euro/>

OFFICE OF THE QUARTET (OQ). Report to the Ad Hoc Liaison Committee. 2 Juni 2020.

OCHAOPT.ORG, *Halah al-Thaware al-Najimah an Fairus Kuruna (COVID19) Taqrir al-Halah al-Sadisah Asyar* (Agustus 2020), 28 Agustus 2020, <https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-16>

<https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/presscenter/articles/2019/renewable-energy-for-all-project-in-gaza.html>

https://www.ps.undp.org/content/papp/en/home/operations/projects/poverty_reduction/infrastructure-development.html

<https://www.pu.go.id/berita/view/6641/indonesia-berikan-pelatihan-project-cycle-untuk-palestina>

<https://republika.co.id/berita/qcev25459/indonesia-komitmen-tingkatkan-bantuan-untuk-palestina>

Shunichiro Honda. *Japan's Triangular Cooperation Mechanism: With a Focus on JICA's Activities*. (Tokyo: JICA Research Institute, 2014): 20. https://www.jica.go.jp/jica-ri/publication/booksandreports/jrft3q00000029sbatt/Triangular_Cooperation_Mechanisms_2_for_web.pdf

Turner, Mandy. *International Aid in the Absence of Palestinian Sovereignty: Notes towards a Strategy in the Aftermath of the Trump "Peace Plan"*. <https://www.jadaliyya.com/Print/40706>

<https://www.unicef.org/sop/what-we-do/wash-water-sanitation-and-hygiene>

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-189022/>

<https://www.unrwa.org/about-unrwa>

<https://www.un.org/unispal/document/with-funds-from-the-kingdom-of-saudi-arabia-undp-and-unrwa-sign-us10-million-agreement-for-reconstruction-and-repair-of-272-affected-houses-in-gaza/>

<https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/>

UN.ORG, *Al-UNRAW, Ta'ahudad bi Taqdim 130 Milyoun Dular, Li Al-Laji' Filastin wa al-Amin al-Am Yuakidu Anna Tsamatu Hajah Lil Al-Mazid*, 23 Juni 2020, <https://news.un.org/ar/story/2020/06/1057072>

- UNCTAD, Taqir an al-Musa'adah Allati Yuqaddimuha al-Unkad ila al-Sya'ab al-Filastiny: al-Tathawwurat fi Iqtishad al-Ardh al-Filistinia al-Muhtalla, 5 September 2020
- Virgianita, Asra, et al, Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia yang Lebih Baik. (Jakarta: PT Pentas Grafika, 2019)
- https://www.tika.gov.tr/en/news/envoy_praises_turkey_s_help_in_palestine_development
- <https://thearabweekly.com/uae-delivers-14-tonnes-medical-supplies-palestinians-fight-pandemic>
- <https://www.timesofisrael.com/palestinians-again-refuse-planeload-of-virus-aid-from-uae/#gs.glvcd8>
- <https://web.archive.org/web/20160303195418/http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/AHLCMainReportfinalSept18%26cover.pdf>
- Webinar “Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan oleh CDC El-Sharq dan Nusantara Palestina Center (NPC) pada 26 September 2020.
- <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/14/us12-million-boost-for-efforts-to-expand-access-to-electricity-for-the-palestinian-people>
- <https://www.youtube.com/watch?v=slsTukvhRRY>
- Youm7.com, *al-Umam al-Muttahidah Tuthliq al-Taqir al-Sanawy Limu'tamar (al-Unktad) Haula Musaadaat al-Filastiniin*, 8 September 2020. <https://bit.ly/3hyBeCJ>

BAB III

- Ajindah al-Siyasat al-Wathaniyah 2017-2022, hal. 12. Data diakses dari <http://www.palestinecabinet.gov.ps/WebSite/Upload/Documents/GOVPLAN/NPA%20Arabic.pdf>
- Al-Lajnah al-Iqtishadiyah wa al-Ijtima'iyah li Garbie Asia (ESCWA) United Nations, Taqir al-Miyah wa al-Tanmiyah al-Tsamin, Ahdaf al-Tanmiyah al-Mustadamah al-Mutaaliqah bi al-Miyah fi al-Manthiqah al-Arabiyah, 2020, hal. 34.
- Al-Mustauthanat al-Israiliyah wa Atsaruha al-Iqthishadiyah wa al-Ijtima'iyah ala al-Ardh al-Filisthinyah wa Qitha al-Amal, Wizarah al-Amal*, 2013, hal. 4
- Al-Umam al-Mutahidah, *Majlis Huquq al-Insan, Halah Huquq al-Insan fi Falastin wa al-Aradhi al-Arabiah al-Ukhra*, hal. 4.
- Al-Zaytouna Center, Mu'anat al-Biah wa al-Fallah al-Filasthiny tahta al-Ihtilal al-Israili, 2013, hal. 80-90 diakses dari http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/BooksZ/AmINotaHuman-12-Pal_Environment_Farmer.pdf

al-Ziraiyah fi al-Mantiqah al-Arabiyah, Taqirir Dirasah al-Halah fi Falasthin. Data diakses dari <https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/uploads/national-assessment-report-palestine-arabic.pdf>

Amnesty International Publications (2009). *Troubled Waters – Palestinians Denied Fair Access To Water Israel-Occupied Palestinian Territories*. United Kingdom: Amnesty International Publications. Hal. 3-10.

Asra Virgianita et al., *Kiprah Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan: Maju Bersama Menuju Dunia yang Lebih Baik*. (Jakarta: PT Pentas Grafika, 2019): 60.

Atsar al-Musta'marat al-Israiliyah ala al-Biah al-Filistiniyah,, Markaz al-Ma'lumat al-Wathani al-Filastiny – Wafa. Data diakses dari https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4073 pada 18 Oktober 2020

EPRS paper on Water in the Israeli-Palestinian conflict. Data diakses dari FAO, *al-Istratijiah al-Wathaniyah Lisalamah al-Aqziyah 2017-2022*, Hal. 11. <http://www.fao.org/3/i8861ar/l8861AR.pdf>

Global Report on Food Crises (GRFC 2020). *Global Networks Against Food Crisis*. Hal. 153. Data diakses dari <http://www.fao.org/3/ca8786en/CA8786EN.pdf>

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573916/EPRS_BRI\(2016\)573916_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573916/EPRS_BRI(2016)573916_EN.pdf)

http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_29-3-2017-LD-en.pdf

<https://ayobandung.com/read/2020/07/22/109375/rabbani-dan-act-bantu-palestina-hadapi-krisis-kemanusiaan-terberat> pada 30 Oktober 2020

<https://bekasi.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-12748370/palestina-alami-krisis-air-bersih-indonesia-salurkan-1-juta-liter-air-bersih-ke-gaza> pada 30 Oktober 2020

<https://bit.ly/2HKrFVc>. Diakses pada 18 Agustus 2020.

<https://bit.ly/3842Xu7>. Diakses pada 18 Agustus 2020,

https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/voucher-assistance-palestine-more-just-food-food-insecure-palestinians_en

<https://internasional.kompas.com/read/2017/04/20/10291891/kehabisan.bbm.pembangkit.listrik.di.gaza.berhenti.beroperasi?page=all> pada 30 Oktober 2020.

https://jabarprov.go.id/index.php/news/16269/Palestina_Belajar_Pertanian_di_Bandung pada 1 November 2020

<https://m.tribunnews.com/internasional/2020/07/16/tidak-hanya-dukungan-politik-ini-yang-sudah-dilakukan-indonesia-untuk-bela-palestina?page=all> pada 1 November 2020

<https://news.act.id/berita/bersiap-humanity-food-truck-segera-hadir-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

<https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-bertambah-di-gaza-perluas-ketersediaan-air-bersih> pada 30 Oktober 2020

<https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-hadir-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

<https://news.act.id/berita/sumur-wakaf-salah-satu-maslahat-wakaf-dermawan-indonesia-untuk-palestina> pada 30 Oktober 2020

<https://peacenow.org.il/en/methods-of-confiscation-how-does-israel-justify-and-legalize-confiscation-of-lands>. Diakses pada 18 Agustus 2020,

<https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/02/07/118219/act-kirim-bantuan-bahan-bakar-untuk-delapan-rumah-sakit-di-palestina> pada 30 Oktober 2020

<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/wfp-palestine-country-brief-august-2018> pada 30 Oktober 2020
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/unsco_ahlc_report_april_2019.pdf
<https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150272009en.pdf>
<https://www.antaranews.com/berita/1031066/sembako-dari-indonesia-untuk-palestina-cerita-dari-gaza#mobile-src> pada 30 Oktober 2020
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40327125>
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41679267> pada 30 Oktober 2020.
<https://www.eib.org/en/publications/financing-provided-by-the-eib-in-gaza-and-west-bank> . Diakses pada 18 Agustus 2020,
<https://www.globalwakaf.com/id/berita/read/2645/palestina-masih-dirundung-krisis-air-bersih> pada 30 Oktober 2020
<https://www.jpnn.com/news/dizalimi-israel-warga-gaza-hanya-bisa-nikmati-listrik-4-jam-setiap-hari> pada 30 Oktober 2020.
<https://www.middleeastmonitor.com/20200428-world-bank-to-fund-development-of-palestine-energy-sector/>
<https://www.mofa.gov.qa/en/statements/hh-the-amir-directs-allocation-of-480-million-usd-in-support-of-palestinian-people>
<https://www.npc.or.id/kemenkes-palestina-umumkan-kondisi-darurat-akibat-krisis-listrik/> pada 30 Oktober 2020.
<https://www.npc.or.id/krisis-air-makin-mengancam-npc-distribusikan-500-000-liter-air-di-gaza/> pada 30 Oktober 2020
<https://www.ochaopt.org/theme/foodsecurity#:~:text=An%20estimated%201.6%20million%20Palestinians,a%20high%20cost%20of%20living.&text=Although%20food%20is%20available%2C%20it,out%20of%20reach%20for%20many> pada 30 Oktober 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/09/23/py9syu366-israel-padamkan-listrik-di-sejumlah-wilayah-tepi-barat> pada 30 Oktober 2020.
<https://www.rmoljabar.id/palestina-krisis-air-act-sediakan-armada-pengangkut-air-ke-gaza> pada 30 Oktober 2020
<https://www.suara.com/news/2018/01/09/152059/indonesia-bantu-palestina-ubah-air-laut-jadi-layak-minum> pada 1 November 2020
<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-202913/>
<https://www.usaid.gov/wbg/misc/WRI/INP%20fact%20sheet.pdf>
<https://www.wfp.org/countries/palestine>
<https://www.wfp.org/countries/palestine> pada 30 Oktober 2020
Ma'had Abhats al-Siyasat al-Iqtishadiyah al-Filastiny (MAS), Ab'ad Muadhalah Qitha al-Kahruba fi Falasthin Baina al-Qitha al-Aam wa al-Qitha al-Khash: Halah Syirkah Kahruba al-Quds, 2019, hal. 1.
Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, al-Tsarwah al-Maiyah fi Dhiffa al-Garbiyah wa Qitha Gazza, Baina al-Hajah al-Filasthiniyah wa al-Intihakat al-Israiliyah, Beirut 2008, Hal. 24
MAS, Ma'had Abhats al-Siyasiyah al-Iqtishadiyah al-Filastiny, 2017, Tadaiyat al-Ijtimaiah wa al-Iqthishadiyah li al-Azma al-Kahruba' fi Gaza hal. 5. Data diakses dari <https://www.mas.ps/files/server/20170810094345-2.pdf>
MAS, Ma'had Abhats al-Siyasiyah al-Iqtishadiyah al-Filastiny, 2017, Tadaiyat al-Ijtimaiah wa al-Iqthishadiyah li al-Azma al-Kahruba' fi Gaza hal. 5. <https://www.mas.ps/files/server/20170810094345-2.pdf>

- Muanaat al-Biah wa al-Fallah al-Filasthiny Tahta al-Ihtilal al-Israili, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, 2013, hal. 49.
- Munazzamah al-Shihah al-Alamiyah (WHO), Taqir an Taqyim Maidani li al-Ahwal al-Shihyah fi al-Ardh al-Filistiniyah al-Muhtallah, 2016, hal. 9.
- Nashashibi, K. & Gal, Y. (2019). Gaza Electricity Reform & Restoration: Fast Track Approach to Economic Revival. Abu Tor Economic Research Collaborative Konrad-Adenauer-Stiftung Palestinian Territories. Hal. 15-20.
- Palestine Humanitarian Response Plan 2019. <https://www.un.org/unispal/document/fao-palestine-humanitarian-response-plan/>
- Palestinian News and Info Agency, Wafa, al-Akhtar al-Lati Tuwajihu Qitha al-Miyah, terakhir diakses 2 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2231
- Palestinian News and Info Agency, Wafa, Waqi Qitha al-Miyah fi Falasthin, terakhir diakses 2 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=9252
- Palestinian Water Authority, Taqir Sulthah al-Miyah 2015-2017, Injazat Ragmah al-Tahdid, <http://www.pwa.ps/userfiles/server/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2.pdf>
- Paparan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun pada webinar “Krisis Pangan, Listrik dan Air Palestina” yang diselenggarakan Nusantara Palestina Center (NPC) dan Center for Dialogue and Civilizations (CDC) El Sharq pada 28 Oktober 2020.
- Paparan Manajer Regulasi Palestine Energy Authority Karmel Manaa dalam webinar “Krisis Pangan, Listrik dan Air Palestina yang diselenggarakan Nusantara Palestina Center (NPC) dan Center for Dialogue and Civilizations (CDC) El Sharq pada 28 Oktober 2020.
- Paparan Mantan Pelaksana Tugas Palestina KBRI Amman Yordania merangkap Negara Palestina Niko Adam dalam Webinar “Bantuan Internasional untuk Palestina” yang diselenggarakan Nusantara Palestina Center (NPC) bersama Center for Dialogue and Civilizations (CDC) El Sharq pada 26 September 2020 .
- UNCTAD, Qitha al-Ziraah al-Filastiniyah al-Muhashir, 2015, hal. 13-27, https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2015d1_ar.pdf
- UN-ESCWA 2019, Taqyim Ta'tsir al-Taqyiraat fi al-Miyah al-Mutahah ala Intajiyah al-Mahashil
- UN-ESCWA, al-Lajnah al-Iqthishadiya al-Ijtimaiyah Ligarbi Asia, Da'm al-Sya'b al-Filasthiny: Tadaiyat al-Ihtilal al-Israili wa Mumarasatihi, 2018, hal. 5-7, https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/dm_lsh_b_flstyny_tdyt_lhtll_lsrlyly_wmmrsth.pdf
- UN-OCHA, al-Ardh al-Filasthiny al-Muhtallah Arqam wa Haqaiq Insaniyah, hal. 5.
- UNOCHA, Ta'tsir Azmah al-Kahruba'wa al-Waqud fi Gaza ala al-Audha' al-Insaniyah, 2015,hal 1
- Wafa.ps, Atsar al-istithan al-Israiliy ala al-Miyah fi Falastin, terakhir diakses 16 Oktober 2020, https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4077

Wawancara Mendalam

- Wawancara mendalam dengan Kepala *Council on International Relation-Palestine* Dr. Basem Naim pada 24 Oktober 2020.

World Bank Group. (2018). Securing Water for Development in West Bank and Gaza. Water Global Practice Sector Note. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Hal. 2-4.

BAB IV

Abdul Fattah al-Qilqilih, *Al-Huquq al-Insaniyah li al-Lajjin al-Filistiniyiin fi al-Duwal al-Mudhifa*, Badil Center, 2012.

Abdul Rahman Abo al-Nasr, Universitas Al-Azhar Gaza, 2008, *Al-Lajjun Al-Falastiniyun Baina Waqi al-Luju' wa Haq al-Audah wafqan liahkam al-Qanun al-Duwal al-Am*.

Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang. (2013). *Progress, challenges, diversity Insights into the socio-economic conditions of Palestinian refugees in Jordan*. Norway: Allkopi AS.

Al-Lajjun al-Falastiniyun, tanpa penulis dan penerbit.

Al-Markaz al-Filastiny li al-Abhats al-Siyasiyah wa al-Dirasat al-Istratijiyyah - Masarat, Waraqah Haqaiq: Kuruna wa Tahaddiyat al-Ta'lim al-iliktruny fi al-Madaris al-Filistiniyah, terakhir diakses, 4 Desember 2020, <https://bit.ly/33CyRL1>

Al-Taqrir al-Istratiji al-Filastiny 2018-2019, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, Beirut Libanon, Cet. Pertama 2020. http://www.alzaytouna.net/wp-content/plugins/extrawatch-pro/components/com_extrawatch/extrawatch.php?origin=frontend&task=ajax&action=download&env=ExtraWatchWordpressEnv&file=arabic/data/attachments/PlsStrRep/STR2018-19/PSR-18-19_FullBook_HD.pdf

Biannual magazine of BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights *al majdal* Magazine. (March, 2017). Issue No. 59.

Campbell, Elizabeth. "*Iraq's Displaced: A Stable Region Requires Stable Assistance*", Refugees International, 16 February 2011. Diakses pada 5 Desember 2020. <http://www.dakta.com/news/887/indonesia-bantu-pengungsi-palestina-rp-918-juta-pada-26-november-2020>

<http://www.teropongsenayan.com/31281-indonesia-akan-dorong-pengembalian-pengungsi-palestina-ke-wilayah-asal-pada-26-november-2020>

<https://investor.id/international/dato-sri-tahir-sumbang-rp-20-miliar-untuk-pengungsi-palestina-pada-26-november-2020>

<https://kemlu.go.id/portal/i/read/797/berita/kendaraan-medis-bagi-kamp-pengungsi-palestina-kontribusi-kemanusiaan-indonesia-pada-26-november-2020-pukul-10.00-WIB>.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/251/berita/indonesia-serukan-penghentian-pembangunan-pemukiman-illegal-israel-di-palestina-pada-3-desember-2020>

<https://www.npc.or.id/dihadiri-dubes-ri-npc-salurkan-bantuan-alat-kesehatan-untuk-pengungsi-palestina-di-yordania/>, <https://www.npc.or.id/nusantara->

palestina-center-distribusikan-777-paket-bantuan-perlengkapan-sekolah-untuk-anak-anak-pengungsi-palestina-di-yordania/, <https://www.npc.or.id/gandeng-jhco-npc-salurkan-paket-sembakokepada-pengungsi-palestina-di-yordania/>, dan <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01385165/meski-covid-19-indonesia-terus-beri-dukungan-ratusan-pengungsi-palestina-di-yordania-dapat-bantuan?page=2> pada 3 Desember 2020.

Dr. Issam M.A Adwan, Mantan Urusan Pengungsi Palestina Gaza, Palestina dalam kajian pengungsi Palestina bersama CDC El-Sharq, 27 November 2020.

Dr. Mohsen Muhammad Shalih, *Waraqah Amal, Audhau al-Lajiiin al-Falastiniyiin wa Qadhayahum fi al-Alam al-Arabi*, 2015.

<https://www.msf.org/great-march-return>. Diakses pada 4 Desember 2020.

<https://www.msf.org/great-march-return-depth>

<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinianrefugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assinstance%20with%20the%20United%20Nations.>, diakses pada 4 Desember 2020.

<https://www.middleeasteye.net/opinion/forgotten-and-without-future-syrias-palestinian-refugees>. diakses pada 5 Desember 2020.

<https://www.thenewhumanitarian.org/report/89571/middle-east-palestinian-refugee-numberswhereabouts>, diakses pada 4 Desember 2020.

<https://www.un.org/unispal/document/palestine-refugees-in-syria-a-tale-of-devastation-and-courage-unrwa-commissioner-general-op-ed/>, diakses pada 5 Desember 2020.

IMEMC Agencies, *EU Observer: Palestinians Joining Exodus to EU, according to Erekat*, IMEMC news,

Markaz al-Jazirah li al-Dirasat, al-Lajiiun al-Filastiniyun fi al-Wathan al-Arabi, al-Waqi wa al-Afaq, Doha, 2013.

Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyyarat, Al-Lajiiun al-Filastiniyun fi al-Iraq, Beirut, 2009.

Maryam I'tany, *Muanat al-Laji al-Filastiny, Markaz al-Zaituniyah wa al-Istisyyarat*, Beirut, 2010.

Namr Ahmad Mahmoud Aboliyah, *al-Auda' al-Ijtimaiyah wa al-Iqtishadiyah li al-Lajiiin al-Filastiniyiin fi Mukhayyamat Syimal al-Diffah al-Garbiyah wa Afaaq al-Tanmiyah*, Tesis Master, Universitas Al-Quds, 2007.

Nidhal al-Izzah, *Al-Nidzam al-Duwali al-Khas bi Himayah al-Lajiiin al-Filastiniyiin*, *Majalah Haq al-Audah Markaz al-Filastiny li Mashadir Huuq al-Muwathanah wa al-Lajiiin*, Februari 2012 Hal. 5, Februari 2012.

<https://www.fmreview.org/sustainable-livelihoods/elabel#:~:text=Some%2050%2C000%20Palestinian%20refugees%20live,many%20restrictive%20laws%20and%20regulations.&text=Palestinians%20were%20regarded%20as%20equal,and%20to%20work%20without%20restrictions> pada 5 Desember 2020.

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). The International Day of Refugees 2019.

Prof. Bahauddin Salem, *al-Tahaddiyat al-Muasharah allati Tuwajihu al-Lajie al-Filastiny fi Dzilli al-Azamat al-Rahinah wa Subul al-Tagallub Alaiha*, Universitas Al-Quds al-Maftuhah.

Prof. Shubhi Yusuf, *Musykilah al-Lajiin al-Filistiniin, Dirasah fi al-Jugrafiyah al-Siyasiah*, Universitas al-Azhar Gaza, 2009.

Report of the Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2019). General Assembly Official Records Seventy-fourth Session Supplement No. 13. 1 January–31 December 2018.

Rex Brynen and Roula El-Rifai (Ed). (2007). *Palestinian Refugees Challenges of Repatriation and Development*. New York: I.B.Tauris & Co Ltd and the International Development Research Centre.

The Danish Immigration Service. (2020). *Palestinian Refugees Access to registration and UNRWA services, documents, and entry to Jordan*. Country Report June 2020 Country Of Origin Information (COI).

<https://waronwant.org/palestinian-right-return>

<https://www.refworld.org/pdfid/56cc95484.pdf>. The Situation of Palestinian Refugees in Lebanon February 2016.

<https://www.unrwa.org/userfiles/2010011791015.pdf>. Diakses pada 4 Desember 2020. The United Nations and The Palestinian Refugees.

<https://www.un.org/unispal/document/two-years-on-people-injured-and-traumatized-during-the-great-march-of-return-are-still-struggling>

<http://www.reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=541>. UN Resolutions 242 and 338.

<https://republika.co.id/berita/qcev25459/indonesia-komitmen-tingkatkan-bantuan-untuk-palestina>

https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/ar_un_report_2020_modification-min.pdf.

<https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/what-is-great-return-march>. Diakses pada 4 Desember 2020.

Why Palestinians have a right to return home.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2011/9/23/why-palestinians-have-a-right-to-return-home/>

<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations>. Diakses pada 4 Desember 2020.

<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinian-refugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations>. Diakses pada 4 Desember 2020.

<https://al-awda.org/learn-more/faqs-about-palestinianrefugees/#:~:text=There%20are%20about%207.2%20million,assistance%20with%20the%20United%20Nations.>, diakses pada 4 Desember 2020.

Tianshe Chen (2009) Palestinian Refugees in Arab Countries and Their Impacts, *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 3:3, 42-56, DOI: 10.1080/19370679.2009.12023136.

<https://www.ayojakarta.com/read/2019/03/06/75/indonesia-sediakan-program-pelatihan-bisnis-untuk-pengungsi-palestina> pada 26 November 2020 pukul 10.15 WIB

<https://www.theatlantic.com/photo/2011/05/palestinian-protests-on-israels-borders/100067/>. Diakses pada 4 Desember 2020.

<https://palsolidarity.org/2012/03/declaration-of-support-for-the-global-march-to-jerusalem/>

<https://www.aljazeera.com/news/2019/3/30/gazas-great-march-of-return-protests-explained>. Diakses pada 4 Desember 2020.

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/05/israels-refusal-to-grant-palestinian-refugees-right-to-return-has-fuelled-seven-decades-of-suffering/#:~:text=There%20are%20currently%20more%20than,in%20Israel%20or%20the%20OPT>. diakses pada 5 Desember 2020.

BAB V

2017 General Assembly: A Call for the Christian Church (Disciples of Christ) to Advocate for the Rights of Children Living Under Israeli Military Occupation. <https://ga.disciples.org/wp-content/uploads/2017/04/GA-1719-Rights-of-Children-Living-Under-Israeli-Military-Occupation.pdf>

2017 General Synod: A Call for the United Church of Christ to Advocate for the Rights of Children Living Under Israeli Military Occupation. https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/globalministries/pages/7857/attachments/original/1510667205/Resolution_The_Rights_of_Children_Living_Under_Israeli_Military_Occupation.pdf?1510667205

- Ahmad al-Hilah, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyyarat, Mu'nat al-Thifl al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili, Beirut, 2008.
- Al Mezan Center for Human Rights, Intihak Quwat al-Ihtilal al-Israili Bihag al-Athfal fi Masiirat al-Audah wa Faq al-Hishar fi Qitha Gazza, terakhir diakses 25 Desember 2020, <http://mezan.org/uploads/files/1585556648506.pdf>
- Chapman, Audrey & Carbonetti, Benjamin. (2011). Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. *Human Rights Quarterly*. 33. 682-732. 10.1353/hrq.2011.0033.
- COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming Findings of a Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine. https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/06/UNWOMENRPT_090620.pdf. Diakses pada 25 Desember 2020.
- COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications for Policy and Programming Findings of a Rapid Gender Analysis of COVID-19 in Palestine. https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2020/06/UNWOMENRPT_090620.pdf. Diakses pada 25 Desember 2020.
- Dr. Firdaus Abdelrabbah al-Isa, al-I'tiqal wa Atsruh ala al-Simat al-Shakhshiyah al-Athfal wa Shihhatihim an-Nafsiyah, 2017,
- Dr. Shady al-Kafaranah, Markaz Syuun al-Mar'ah - Gazza 2017, Azmah Inqitha al-Kahruba wa al-Unf al-Usari fi Qitha Gazza.
- El-Far, Mira. Anton. Vershina, Natalia. Stuck in the middle of what?": the pursuit of academic careers by mothers and non-mothers in higher education institutions in occupied Palestine. (2020). DO - 10.1007/s10734-020-00568-5.

ESCWA, Al-Lajnah al-Iqtishadiyah wa al-Ijtimaiyah Li Garby Asia, Al-Wadh' al-Ijtimai wa al-Iqtishadi li An-Nisa wa al-Fatayat al-Filistiniyat, Beirut, Januari 2019,

https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/social-economic-situation-palestinian-women-2016-2018-arabic_compressed.pdf

Fehah Abdel Hady, Al-Mar'ah al-Filastiniyah wa Tahaddiyat Mutawashilah, Al-Watanvoice.com, terakhir diakses 27 Desember 2020, t.ly/UkxG
Hayat al-Duda, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, Muanat al-Thalib al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili, Beirut, 2015.

Hayat al-Duda, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasat wa al-Istisyarat, Muanat al-Thalib al-Filistini Tahta al-Ihtilal al-Israili, Beirut, 2015.

<http://pcbs.gov.ps/Downloads/book2480.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2020.

http://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/11973_Chapter_5.pdf, diakses pada 24 Desember 2020.

<http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/hagelawda-ar/item/301-article05.html>. Diakses pada 28 Desember 2020.

http://www.mediterraneas.org/article3_id_article_47.html, diakses pada 25 Desember 2020.

<http://www.moh.gov.ps/portal/wp-content/uploads/2020/04/Corona-Eng.-25-4.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2020.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200815/19/1279670/ri-minta-tanggung-jawab-internasional-atas-nasib-anak-anak-palestina>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1558/berita/indonesia-bersama-save-the-children-bahas-nasib-anak-anak-palestina-di-forum-pbb>

<https://nasional.sindonews.com/berita/1453250/15/senyum-siswa-di-gaza-palestina-sambut-relawan-act>,

[https://www.liputan6.com/global/read/3669116/indonesia-siapkan-beasiswa-perguruan-tinggi-untuk-ribuan-warga-palestina dan](https://www.liputan6.com/global/read/3669116/indonesia-siapkan-beasiswa-perguruan-tinggi-untuk-ribuan-warga-palestina-dan)

<https://suarapalestina.com/post/7419/rumah-yatim-indonesia-luncurkan-program-orang-tua-asuh-tahap-i>

<https://nasional.sindonews.com/berita/1535908/15/ormas-perempuan-indonesia-pertegas-komitmen-bantu-palestina?showpage=all>

<https://news.okezone.com/read/2020/02/25/18/2173952/menlu-ri-angkat-isu-perempuan-hak-rakyat-palestina-di-sidang-ham-pbb>

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Women%20and%20Girls%20with%20Disabilities_0.PDF. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://pui.or.id/ormas-dan-lembaga-perempuan-indonesia-bentuk-koalisi-membela-kemerdekaan-palestina/>

<https://republika.co.id/berita/q4vof5366/indonesia-palestina-harus-selesai-dengan-solusi-dua-negara> diakses 27 Desember 2020.

<https://www.aljazeera.com/features/2014/3/25/upsurge-in-palestinian-honour-killings>.

<https://www.annalindhfoundation.org/members/palestinian-general-union-people-disability>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.bsmi.or.id/post/orang-tua-asuh-untuk-akses-pendidikan-warga-palestina/7>

<https://www.cidse.org/2016/06/07/advocating-for-women-rights-in-palestine/>. Diakses pada 16 Desember 2020.

https://www.dci-palestine.org/how_we_work. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-Africa/disability-rights-programme/>. Diakses pada 16 Desember 2020.

https://www.globalministries.org/advocate_for_the_rights_of_palestinian_children. Diakses pada 16 Desember 2020.

https://www.globalministries.org/resolutions_regarding_children_under_israeli_military_occupation. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.helpage.org/tags/gaza/> Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.ibtimes.com/israels-blockade-gaza-puts-palestinian-childrens-health-risk-report-702821>, diakses pada 24 Desember 2020.

<https://www.unicef.org/sop/media/341/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>. Diakses pada 24 Desember 2020.

https://www.ilo.org/beirut/countries/occupied-palestinian-territory/WCMS_532917/lang--en/index.htm. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.jpost.com/Middle-East/PA-Outlaws-Child-Marriage-606874>. Diakses pada 25 Desember 2020.

<https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZnvjEK-indonesia-deklarasikan-kita-semua-maryam-untuk-perempuan-palestina>

<https://www.npc.or.id/peduli-pendidikan-anak-anak-palestina-npc-buka-sekolah-gratis-di-jalur-gaza/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01307781/indonesia-berpelatihan-untuk-perempuan-palestina-di-kamp-pengungsi>

<https://www.qader.org/about-us/601.html>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/07/01/ptxwmd320-kondisi-gaza-yang-kian-tak-menentu-sejak-blokade-israel-2007>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/19/anak-anak-palestina-di-gaza-ikuti-lomba-17-an-dari-balap-karung-hingga-ambil-koin-dalam-tepung> dan YouTube Abdiilah Onim Official

<https://www.un.org/en/sections/issues-depth/ageing/index.html>. Diakses pada 26 Desember 2020.

<https://www.un.org/press/en/2002/soc4614.doc.htm>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176128/>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.unicef.org/sop/media/346/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>. Diakses pada 25 Desember 2020.

<https://www.unicef.org/sop/what-we-do/child-protection>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.unrwa.org/what-we-do/disability?program=25801>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.warchildholland.org/projects/no-place-for-a-child/>. Diakses pada 16 Desember 2020.

<https://www.who.int/features/factfiles/ageing/en/>. Lihat juga Ageing, the United Nations 2019. Diakses pada 16 Desember 2020.

Inas Tina. (2019). Violence Against the Elderly: Palestine. ditranslasi dari bahasa Arab oleh Work With Words.

Khouloud Daibes: Israeli soldiers forcing women to submit to strip searches at checkpoints". Ma'an News Agency. June 30, 2007. Diakses pada 25 Desember 2020.

Markaz al-Ma'lumat al-Wathani al-Filastini - WAFA, Waqi' al-Thifl al-Filistini fi Dzilli Ittifaqiyah Huquq al-Thifl, terakhir diakses 25 Desember 2020, t.ly/mm6l

Markaz Syuun al-Mar'ah - Gaza (Women's Affair Center - Gaza), Al-Unf al-Ladzi Tataarradhu Lahu an-Nisa Dzawatu al-Ilaqah fi Amakin al-Amal,

Markaz Syuun al-Mar'ah -Gaza, Al-Unf al-Ladzi Tata'arradhu lahu al-Nisa Dzawat al-Ilaqah fi Amakin al-Amal.

Masarat.ps, Nahwa Siyasat Tuhmi al-Fiat al-Hissyah fi al-Aradhi al-Filistiniyah fi Dzilli Jaihah Kuruna, hal. 2-3, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/t9wp

Mu'tamar al-USari al-Dauli al-Tsalits, Athfal al-Filistiniyun wa Siyasat al-I'tiqal al-Israiliyah ..., 2017.

Nasrin Alyan, I'tiqal Qashirin Filistiniyin fi al-Aradhi al-Muhtallah wa Ihalatihim ila al-Qadha, presentasi pada konferensi tawanan ketiga di Ramallah – Palestina.

Palestinian Disability and Human Rights Groups Submit to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities for its List of

Issues on Israel's Initial Report.

<https://www.alhaq.org/advocacy/17185.html>

PALESTINIAN WOMEN UNDER PROLONGED ISRAELI OCCUPATION.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Palestine-UPR_web-2-5.pdf

Paola Perezniето, dkk. Tackling childhood poverty and vulnerability: making the Palestinian National Cash Transfer Programme more effective for children. Overseas Development Institute and United Nations Children's Fund 2014.

Pius Suratman Kartasasmita. Studi Literatur Tentang Kerentanan Sosial (Social Vulnerability). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Katolik Parahyangan. 2018.

Pusat Informasi Palestina - Wafa - al-Mar'ah al-Filistiniyah wa al-Ihtilal al-Isra'ili, terakhir diakses 28 Desember 2020,
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=3189

Pusat Informasi Palestina, Info.wafa.ps, Waqi' al-Mar'ah fi Falastin, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/wgZh

Rasd.news, Fi dzikr Istisyhad al-Durra, Athfal Filistin Baina Rahy al-Rashah wa al-Faqr, terakhir diakses 22 Desember 2020, t.ly/fkb5

Report on The status of women and girls in the State of Palestine.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PSE/INT_CEDAW_NGO_PSE_29031_E.pdf

The Palestine Strategic Report 2018-2019, Markaz al-Zaituniyah li al-Dirasaat, Beirut 2020.

UNICEF, al-Athfal fi Daulati Falastin, terakhir diakses 25 Desember 2020,
<https://www.unicef.org/sop/media/346/file/Children%20in%20the%20State%20of%20Palestine.pdf>

UN-OCHA, 346,000 Filastini intaqalu min al-Hajah al-Mutawasitah ila al-Hajah al-Massah, Ithlaq Khutha bimablaq Qadruh 417 Milyoun Dular li al-Wafa' al-Hajah al-Insaniyah li al-Filistiniyiin, terakhir diakses 22 Desember 2020,

<https://www.ochaopt.org/ar/content/346000-palestinians-pushed-moderate-severe-need-assistance>

Violence Against the Elderly: Palestine.

https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/violence_against_the_elderly_palestine.pdf

Voaindonesia.com, PBB: Akibat Blokade Israel, Jalur Gaza Bakal Tak Layak

Huni Tahun 2020, 14 September 2018, terakhir diakses 27

Desember 2020, [https://www.voaindonesia.com/a/pbb-akibat-](https://www.voaindonesia.com/a/pbb-akibat-blokade-israel-jalur-gaza-bakal-tak-layak-huni-tahun-2020/4570828.html)

[blokade-israel-jalur-gaza-bakal-tak-layak-huni-tahun-](https://www.voaindonesia.com/a/pbb-akibat-blokade-israel-jalur-gaza-bakal-tak-layak-huni-tahun-2020/4570828.html)

[2020/4570828.html](https://www.voaindonesia.com/a/pbb-akibat-blokade-israel-jalur-gaza-bakal-tak-layak-huni-tahun-2020/4570828.html)

Waseem Burghal. Analytical Study: Status of Vulnerable and Marginalized

Youth Groups in Palestine. United Nations Population Fund,

UNFPA.

Nusantara Palestina Center Jembatan Amanah Indonesia untuk Palestina

Nusantara Palestina Center (NPC) berkomitmen untuk senantiasa mengadvokasi isu kemanusiaan di Palestina. Perjuangan NPC di Palestina bermula sejak 2009 ketika pendiri sekaligus pembina NPC; Abdillah Onim, S.E.I atau yang akrab disapa “Bang Onim” mewakafkan diri untuk mengabdikan pada dunia kemanusiaan.

Perjuangan yang tidak mudah ini akhirnya membuahkan kepercayaan yang luar biasa dari Masyarakat Indonesia. Selama hampir 15 tahun di Jalur Gaza, Bang Onim berhasil membuktikan kinerjanya di bidang kemanusiaan yang mendapat apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kedutaan Republik Indonesia di Amman Jordan.

Atas prestasi dan kontribusi tersebut, pada Agustus 2017, Bang Onim dan keluarga diundang khusus bertemu Dubes RI untuk Kerajaan Yordania dan Negara Palestina, H. E. Drs. Andy Rachmianto, M.Phil., dalam momentum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Bang Onim adalah mata dan telinga saya di Jalur Gaza,” sebut Dubes Andy di hadapan belasan pemimpin lembaga kemanusiaan dan sosial saat rapat bersama utusan UNRWA PBB di kantor Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, 18 Februari 2018.

Nalurnya sebagai Aktivistis Kemanusiaan senior mendorongnya untuk terus meningkatkan kinerja dan kapasitas dirinya serta tim untuk bekerja secara konsisten, transparan dan profesional seperti dasar dan prinsip kerja yang dijalankan selama ini.

Maka pada bulan Maret 2018, ide untuk mendirikan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kemanusiaan akhirnya tercapai. Lembaga tersebut bernama Nusantara Palestina Center (NPC), di mana Bang Onim dalam Akta Pendirian atau sesuai Akta Notaris Nomor 7 tanggal 8 Maret 2018, tercatat sebagai Pendiri dan Pembina NPC.

NPC resmi berdiri dan berbadan hukum pada tanggal 8 Maret 2018. Saat ini mengerahkan ratusan staf dan relawan di berbagai tempat di Palestina, Mesir, dan Indonesia. NPC beralamat kantor di Jl. Bina Marga No.

25, C99 Business Park, Kaveling 9N, RT.08 / RW.03 Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Selaras dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “..untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..” , NPC ikut berpartisipasi memberikan kemanfaatan lewat misi-misi kemanusiaan dan perdamaian dunia.



Peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia (World Humanity's Day) di Kantor Pusat NPC, Cipayung, Jakarta Timur

NPC menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan dengan berbagai pendekatan seperti edukasi, *charity*, pemberdayaan, dan *emergency*. Berkaitan dengan hal tersebut, NPC banyak berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat di Jalur Gaza seperti pelatihan menjahit, tahfidz al-Qur'an, pelatihan skill dan pengembangan diri, dan penugasan misi relawan kemanusiaan. NPC juga memiliki program fokus dalam negeri yang dirancang oleh Unit Nusantara Care. Beberapa program tersebut menysasar pada bidang strategis seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, kebencanaan, dakwah, pangan, dan kesehatan sebagai salah satu kontribusi untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia.

Sejak berdirinya pada tahun 2018, NPC telah memfasilitasi ratusan ribu transaksi donasi kebaikan. Kumpulan donasi tersebut kemudian didistribusikan dengan sangat transparan dalam bentuk program-program bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan di Palestina dan Indonesia. Antusias dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap NPC meneguhkan komitmen dan misi NPC sebagai “Jembatan Amanah Indonesia untuk Palestina.”



Distribusi satu juta liter air di Gaza, palestina oleh Nusantara Palestina Center

Terhitung usianya yang sangat dini, NPC selalu komitmen pada sistem kerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Aziz Fiby Ariza (KAP AAFA), Jumat (3/9/2021) siang. Direktur Pelaksana NPC; Ihsan Zainuddin, Lc. Dipl menuturkan bahwa NPC memberanikan diri untuk diaudit lebih awal demi membuktikan kepada publik bahwa lembaga ini amanah dan akuntabel dalam menjalankan kepercayaan masyarakat.



Penyerahan hasil audit Laporan Keuangan NPC tahun 2020 dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh KAP Abdul Aziz Fiby Ariza

Kehadiran NPC di Palestina, menurut Bang Onim, panggilan familier Abdillah Onim, SE.I sebagai sebuah perjuangan mulia dan bersejarah. Hingga saat ini NPC telah banyak mengatasi berbagai variabel masalah-masalah kemanusiaan dan berperan aktif sebagai mediator dan fasilitator NGO Indonesia dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, Palestina.

PERJUANGAN BELUM SELESAI;

PALESTINA

dan Sejumlah Tantangan Sosial-Ekonomi

“Sebagai Pendiri dan Pembina NPC, saya terus mendorong agar NPC menjadi lembaga terdepan di dalam aksi-aksi sosial dan kemanusiaan di Palestina, karena itu spirit awal lahirnya NPC. Namun lebih dari itu NPC harus bekerja lebih baik dan terarah, dan upaya menuju ke sana kita buktikan dengan karya seperti ini, Pesan mendalam dari buku ini adalah ajakan peduli sesama, merangkul, memotivasi, tidak pilih kasih dalam berbuat baik”

Abdillah Onim, SE.I

(Pendiri dan Pembina Nusantara Palestina Center).

“Buku ini tampil di tengah kelangkaan referensi tentang Palestina di tanah air. Buku ini menyajikan pengalaman aktifis kemanusiaan Indonesia membantu rakyat dan pengungsi Palestina. Selain faktual, buku ini juga menjadi bukti bahwa perjuangan Palestina belum selesai. Karena itu, dukungan politik, ekonomi, kerjasama teknik dan bantuan kemanusiaan perlu terus dilanjutkan. Indonesia selalu bersama Palestina!”

Andy Rachmianto

(Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, 2017-2020).

“Palestina adalah epicentrum kawasan Timur Tengah. Dinamika di Palestina sangat mempengaruhi kondisi global secara umum. Kontribusi Indonesia bagi kemerdekaan Palestina sangatlah penting karena ini akan separoh lebih masalah dunia. Indonesia harus semakin memperkuat perannya demi mewujudkan two states solution dan perdamaian abadi bagi dunia.”

Yon Machmudi, Ph.D

“Harapan kami, buku ini mampu menjadi booster bagi kita bangsa Indonesia, ummat Islam terbesar di dunia, agar lebih memainkan peran strategisnya seraya terus turut bergerak berbuat dan berkontribusi bagi keberlangsungan kemanusiaan Palestina, sebagaimana telah didedikasikan dan dirintis dengan istiqomah oleh Nusantara Palestina Center (NPC) yang kita banggakan ini.”

Ahmad Arafat Aminullah

Ketua Umum Prima DMI